



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU  KKP
INDONESIA EMAS 2025

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIWULAN II
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Tahun 2025 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

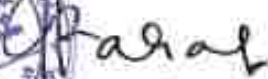
LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode triwulan II tahun 2025 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 14 Juli 2025

BK Kepala Balai Besar KIPM Makassar




Rahayu Setyaningsih





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis	3
4. Sistematika dan Penyajian	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan Strategis	7
3. Sasaran, Indikator dan Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	10
1. Capaian Kinerja	10
2. Analisis dan evaluasi	12
IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	13
IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	23
IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	31
IK4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	38
IK5. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	42
IK6. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	55
IK7. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	61
IK8. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	67
IK9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	74
IK10. Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	80



IK11.	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	85
IK12.	Penilaian Penilaian Mandiri SAXIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	97
IK13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	102
IK14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIPUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	106
IK15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	112
IK16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	119
IK17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)	130

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan	142
2. Rekomendasi	142
3. Tindak lanjut	143



LAMPIRAN

Lampiran Capaian Kinerja (LCK)

IK1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	1
IK2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produk-produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	11
IK3.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	20
IK4.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Lokasi)	23
IK5.	Rasio Eksport Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan eksport lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	27
IK6.	Nilai pemerluhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	35
IK7.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	39
IK8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	43
IK9.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	48
IK10.	Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	53
IK11.	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	56
IK12.	Penilaian Penilaian Mandiri SAXIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	63
IK13.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	66
IK14.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	69
IK15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berprediksi menuju wilayah bebas	77
IK16.	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	82
IK17.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar. (Nilai)	87



RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebesar 114,85 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Dari 17 (Tujuh belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2025 ada 4 Indikator Kinerja Utama yang capainnya turun dari Triwulan sebelumnya yaitu :

- a) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ;
- b) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
- c) Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
- d) Survei Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp 11,879,526,000 dan realisasi Rp 4,946,552,842 atau 49,16%





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instrument pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Dalam peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKJ Interim) maupun tahunan (LKJ Tahunan). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah mengukur kinerja evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja.



Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas dan Struktur Organisasi Latar Belakang

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.



1.3. Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan Perikanan dengan didukung 1). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi Primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Lokasi Pengawasan Mutu hasil eklautan dan perikanan sektor prosuksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Lokasi pengawasan mutu hasil kelautan sektor produksi pasca panen lingkup UPT



- Balai Besar KIPM Makassar, 5) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai Besar KIPM Makassar
- 2) Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar yang didukung 1). Nilai kualitas penerapan sistem mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.
- 3) Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang didukung 1). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 2). Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 3). Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 4). Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 5). Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 6). Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 7). Persentase rencana umum pengadaan PBI yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 8). Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, 9). Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM, 10). Survey Kepuasan masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar.

1.4 Sistematika dan penyajian

Sistematika dan penyajian LKJ Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a) Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;



LAPORAN KINERJA 2025

- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.2 Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2025 – 2029 maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *output/impact* yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka Balai Besar KIPM Makassar telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

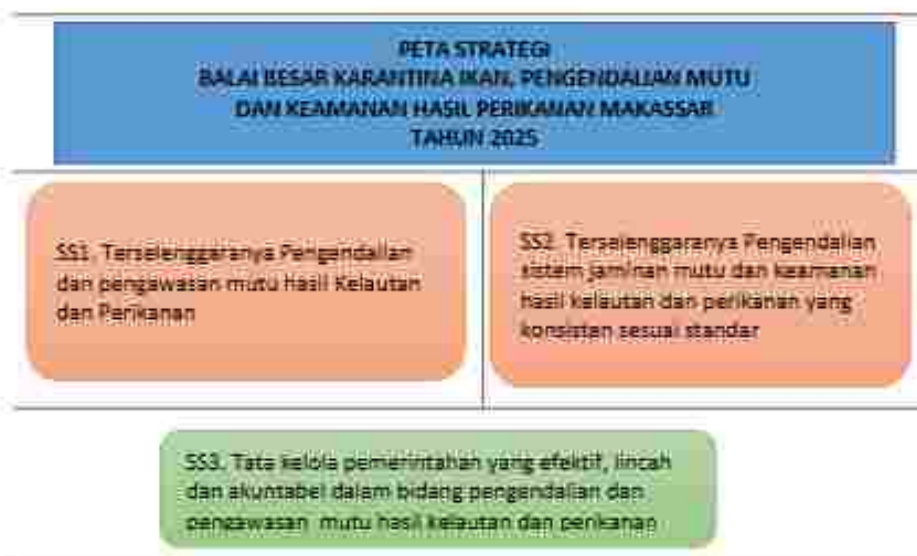
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya Pengendalian dan pengawasan mutu hasil Kelautan dan Perikanan |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan |

3.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai Besar KIPM Makassar pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BPPMHKP.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2025. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk triwulan II tahun 2025 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Triwulan I 2025 (Jan - Mar)					Triwulan II 2025 (Apr - Jun)				
			2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Daya Saai Balai Besar KIPM Makassar	1	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dan manajerial sebagai tenaga KIPM Balai Besar KIPM Makassar	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis dan manajerial sebagai tenaga KIPM Balai Besar KIPM Makassar	1	1	1	1	100	100	100	100	100	
	3	Jumlah Pegawai Tetap dan Perantara sebagai tenaga KIPM Balai Besar KIPM Makassar					1	1	1	1	1	
	4	Jumlah Pegawai Tetap dan Perantara sebagai tenaga KIPM Balai Besar KIPM Makassar					1	1	1	1	1	
	5	Jumlah Pegawai Tetap dan Perantara sebagai tenaga KIPM Balai Besar KIPM Makassar	1	100	100	100	100	100	100	100	100	



LAPORAN KINERJA 2025

Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	Perencanaan 2025-2026					Tercapai 2025				
		2025	2026	2025	2026	2026	Target 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Target 2025
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan masyarakat	1. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	2. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	5. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	6. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	7. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	8. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	9. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	10. Rasio tenaga kesehatan yang terampil	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kinerjanya dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperlukan dukungan 5 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 5 indikator kinerja tersebut disajikan pada table dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 70 %
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 70 %
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 1 Lokasi
4. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 1 Lokasi
5. Rasio Ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 99 %



IK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Indikator Kinerja	Kategori Risiko (%)	Periode Tahun 2023 - 2024					Tahun 2025					Periode Tahun 2025 - 2026	
		2023	2023	2023	2023	2024	Tetapan 2025	Tetapan 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Semester I Tahun 2025	Realisasi Semester II Tahun 2025	Tetapan 2026	Realisasi Semester I Tahun 2026
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.

Balai Besar KIPM Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya



dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :

- a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIK);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
 - Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIK) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
 - Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.



- Cara Pembuatan pakan Ikan yang baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Cara Distribusi Ikan yang Baik yang selanjutnya disebut CDOIIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIIB
yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan



F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPiB Kapal

Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

$$A/B/C/D/E/F = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang terbit}}{\text{Jumlah permohonan}} \times 100\%$$

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Permohonan Yang Lolos Verifikasi Berkas	Jumlah Sertifikat yang Terbit	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Sertifikasi
1	Sertifikasi CPiB Kapal	8	8	100 %
2	Sertifikasi CBiB	2	2	100 %
3	Sertifikasi CPIB	0	0	0
4	Sertifikasi CPPiB	0	0	0

Dengan demikian realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan II adalah 100 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Triwulan I Tahun 2025 maka realisasi pada triwulan II adalah sama yaitu 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru.

Pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat Permohonan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) namun telah dilakukan surveilan dalam rangka penilaian dan verifikasi konsistensi dan efektivitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit pembenihan yang telah tersertifikasi Cara



Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) sebanyak 4 unit. Adapun kegiatan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) untuk triwulan II tahun 2025 tidak dapat terealisasi karena sampai dengan akhir triwulan II belum ada permohonan masuk.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Pada tanggal 5 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi *Plan Of Action (PoA)* dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit DG Sante Uni Eropa secara hybrid di Aula Kantor Badan Mutu KKP Makassar yang diikuti oleh 88 orang peserta yang terdiri dari perwakilan BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Surabaya I, Pelabuhan Perikanan Untia, DPMPTSP, para kordinator penyuluh perikanan dari kabupaten/kota sentra perikanan, perusahaan eksportir dan pengolah hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Selatan, Jakarta dan Surabaya yang memiliki pemasok bahan baku dari Sulawesi Selatan.
- Pada tanggal 19 Mei 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia terkait percepatan sertifikasi CPIB Kapal Perikanan
- Pada tanggal 27 Mei 2025 mengikuti pertemuan reguler I Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) tuna provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MPDI).
- Mengikut help desk yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer setiap hari selasa pada bulan Juni 2025 yang membahas terkait progres percepatan sertifikasi primer dan kendala kendala yang dihadapi
- Pada tanggal 24 Juni 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Persamaan Persepsi pengisian checklist Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).



- Pada tanggal 25 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan PT. Ocean Champ Seafood terkait percepatan sertifikasi CPIB Kapal.

Sumberdaya Manusia

- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CBIB pada TW II sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 Inspektur Mutu Balai Besar KIPM Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB pada TW II sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 Inspektur Mutu Balai Besar KIPM Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB Kapal pada TW II sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 Inspektur Mutu dan 1 Asisten Inspektur Mutu Balai Besar KIPM Makassar.

ANGGARAN

- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.
- Untuk anggaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi produksi primer semula Rp. 18.820.000 menjadi Rp. 24.600.000 karena adanya revisi anggaran (relaksasi blokir).

PROGRAM NASIONAL

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan Ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP, yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SIKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

ASPEK PEMANFAATANNYA

- Pemanfaatan realisasi anggaran sampai dengan TW II Tahun 2025 sebesar Rp. 8.430.000,- atau sebesar 34,27 % dengan rincian sebagai berikut :

NO	Uraian	PASOK (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
1.	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	24.600.000	8.430.000	16.170.000
	JUMLAH	24.600.000	-	16.170.000

Akar masalah

- Adanya persyaratan pemenuhan ijin terkait dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan sertifikasi
- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPiB Kapal perikanan.



Rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

- Melakukan kordinasi dengan pihak BPSPL Makassar dalam rangka percepatan penerbitan PKKPR
- Melakukan koordinasi dengan PP Untia dan Dinas Perikanan Kab. Sinjai terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis;

Hasil Tindakan lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

- Tindak lanjut rekomendasi 1 : Pada tanggal 5 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan perwakilan BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Surabaya I, Pelabuhan Perikanan Untia, DPMPTSP (pendamping GSS) selaku narasumber, para kordinator penyuluh perikanan dari kabupaten/kota sentra perikanan, perusahaan eksportir dan pengolah hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Selatan, Jakarta dan Surabaya yang memiliki pemasok bahan baku dari Sulawesi Selatan
- Tindak lanjut rekomendasi 2 : pada tanggal 19 Mei 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia terkait Percepatan Sertifikasi CPIB Kapal di Aula Kantor Balai Besar KIPM Makassar
- Tindak lanjut rekomendasi 3 : Setelah mendapatkan informasi dari PJ Pusat bahwasanya untuk sertifikasi kapal perikanan dibawah 5 GT sudah dapat dilaksanakan proses sertifikasi.

Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi CBIB Triwulan II Tahun 2025

No.	Nama UPR	Produk	Grade	No. Sertifikat
1	PT Sinar Sukses Persada	Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	B	ID-CBIB-73-P-250104 Tanggal 30 Juni 2025
2	CV. Arya Crustacea Cemerlang	Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)	B	ID-CBIB-73-P-250105 Tanggal 30 Juni 2025



Kegiatan Survei dan Cara Pemberian Ikan yang baik di Mutiara Benur Jalangge

DAFTAR SERTIFIKASI CPIB KAPAL TRIWULAN II TAHUN 2025

No	WILAYAH	LOKASI	KELOMPOK UMUR	PEKERJA	PERALATAN	KETERANGAN DAN JENIS POKOK	WAKTU	WAKTU LAKSANA	STATUS
1	PA. Karamba	Desa Karamba RT 001 RW 001, Desa Karamba Kecamatan Mutiara Benur Jalangge	20-30	Warga	20000	Survei	10.000	10.000	1
2	PA. Karamba	Desa Karamba RT 002 RW 001, Desa Karamba Kecamatan Mutiara Benur Jalangge	20-30	Warga	20000	Survei	10.000	10.000	2
3	PA. Karamba	Desa Karamba RT 003 RW 001, Desa Karamba Kecamatan Mutiara Benur Jalangge	20-30	Warga	20000	Survei	10.000	10.000	3
4	PA. Karamba	Desa Karamba RT 004 RW 001, Desa Karamba Kecamatan Mutiara Benur Jalangge	20-30	Warga	20000	Survei	10.000	10.000	4
5	PA. Karamba	Desa Karamba RT 005 RW 001, Desa Karamba Kecamatan Mutiara Benur Jalangge	20-30	Warga	20000	Survei	10.000	10.000	5
6	PA. Karamba	Desa Karamba RT 006 RW 001, Desa Karamba Kecamatan Mutiara Benur Jalangge	20-30	Warga	20000	Survei	10.000	10.000	6
7	PA. Karamba	Desa Karamba RT 007 RW 001, Desa Karamba Kecamatan Mutiara Benur Jalangge	20-30	Warga	20000	Survei	10.000	10.000	7
8	PA. Karamba	Desa Karamba RT 008 RW 001, Desa Karamba Kecamatan Mutiara Benur Jalangge	20-30	Warga	20000	Survei	10.000	10.000	8



Kegiatan Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal



Kegiatan Rapat Koordinasi Plan Of Action (POA) dan Tindaklanjuti Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal



Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pelabuhan Plan Of Action (POA) dan Tindaklanjuti Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal



IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sektor Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Masa Tercapai 2022-2025					Tahun 2025					Target Realisasi 2025	
		2022	2023	2024	2025	2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025
Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan (UPH) dan Perikanan	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan



berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan II 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Kegiatan Sertifikasi Pasca Panen merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua dan ke empat KKP yaitu

- Prioritas kedua KKP yaitu Penerapan sistem kuota dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya dimana, setiap hasil tangkapan harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.
- Prioritas keempat KKP yaitu Pengembangan budidaya perikanan di laut, pesisir, dan darat yang memperhatikan aspek keberlanjutan dimana, setiap hasil

budidaya harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kegiatan inspeksi/sertifikasi SKP dan HACCP diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten- ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

CARA PENGUKURAN

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{Xn} \times 100\%$$

Dimana

- X = Persentase hasil kelulusan dan penerapan sektor pasca panen yang memanti standar mutu dan keamanan pangan
- A = Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
- B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSCP
- Xn = Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :



$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah rekomendasi yang masuk}} \times 100\%$$

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP, sedangkan persyaratan dalam penerbitan sertifikasi HACCP mengacu pada Permen KP NO 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TWT 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	69	62	89,85%
2	Sertifikasi SKP (B)	108	84	77,78%

Catatan :

- Realisasi sertifikat HACCP hanya mencapai 89,85%
- Realisasi sertifikasi SKP mencapai 77,78% karena terdapat beberapa rekomendasi dari bulan sebelumnya yang baru memenuhi persyaratan sehingga baru terbit sertifikatnya, dan masih terdapat 24 rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{89,85 + 77,78}{2} \\ &= 83,81 \% \end{aligned}$$



Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 83,81 %, dari target 70%. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 119,73 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP perlu segera melakukan sertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa.

Namun demikian pelaksanaan SPDI mengalami kendala karena dasar hukum yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Risiko belum memuat ketentuan terkait pelaksanaan SPDI. Atas dasar tersebut telah terbit Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No 31 Tahun





2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier, maka menjadi acuan dalam menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier pada Triwulan II Tahun 2025.

Pada Triwulan II Tahun 2025, inspeksi penerapan HACCP di Supplier dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) unit pemasok dan telah diterbitkan sertifikat Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier sebanyak 18 (delapan belas) lembar sesuai ruang lingkup sertifikasi.

Penyerapan anggaran pada Triwulan II 2025 sebesar Rp. 3,343,000., atau sebesar 35,49%. Tidak adanya realisasi pelaksanaan inspeksi CPIB Supplier triwulan II 2025 dikarenakan belum adanya permohonan pengajuan inspeksi pada unit pemasok, sebagaimana realisasi pelaksanaan inspeksi penerapan HACCP di Supplier berdasarkan permohonan dari unit pemasok.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikanan dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional Inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang



penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 169.228.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 40.772.000,- realisasi triwulan II sebesar Rp.34.001.000,- atau sebesar (83,39%). Jika dibandingkan dengan TW I tahun 2025 sebesar Rp.22.365.000,- atau sebesar (38,43%) mengalami sebesar 44,96%.

Akar Masalah

- Inspektur Mutu belum memahami secara detail Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko;

Rekomendasi rencn aksi triwulan

- Melaksanakan kegiatan Sharing Session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu

Hasil Tindakanjuz rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

- Untuk meminimalisir kelemahan inspeksi secara virtual maka Inspektur Mutu telah melakukan desk audit secara lebih mendetail untuk mendapatkan gambaran kondisi UPI yang akan diinspeksi dengan lebih lengkap;
- Telah dilakukan koordinasi dengan PJ. Pembinaan CDIB dari Direktorat Teknis Penguatan Daya Saing Perikanan dan Kelautan melalui via Whatsap dan telepon (dokumentasi terlampir);
- Telah dilakukan Koordinasi percepatan Kep. Ka. Badan No 31 Tahun 2025 pada tanggal 12 Juni 2025 (dokumentasi terlampir).



Kegiatan Inspeksi Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) di UPI



Kegiatan Inspeksi Konsistensi Penerapan HACCP di UPI



Kegiatan Inspeksi CP/B di Supplier

IK.3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kategori/Strategi	Lokasi/Tempat (A)	Tahun/Termin 2020 - 2024					Tahun 2025					Kumulatif Balai Besar KIPM Makassar 2020-2025	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target 2025 2025	Realisasi 2025 2025	3. Laporan Berkas Target 2025 2025	4. Laporan Berkas Target Tahun 2025	Target 2025	5. Catatan Tambahan Target Realisasi
Pertanggungjawaban Organisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dan Perikanan	5. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar						1	1	1	100.00	100.00	1	1

Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung.

Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer



BPPMHKP pada, tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

- Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
- Pengambilan Contoh : uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (*Pb*, *Cd*, *Hg*) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli*, *Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoksine* dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung Asta



Cita ke - 2 Presiden RI yaitu Mementapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan melalui kegiatan monitoring cemaran perairan di perlukan sumberdaya manusia (Inspektur mutu) yang berkompeten ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Kegiatan monitoring cemaran perairan, berdasarkan program Tahunan yang telah disusun pada tahun 2025 memiliki 1 target lokasinya yaitu TPI Beba Kab. Takalar. Kegiatan monitoring cemaran perairan telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 dengan titik lokasi monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar.

Adapun ikan sampel yang diambil adalah :

- Ikan demersal (Ikan Katamba, Ikan Baracuda, Ikan Kanekes) untuk pengujian parameter pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg) dan ciguatoksin dan pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *E. Coli*





- Untuk parameter pengujian logam berat yaitu (Pb, Cd, Hg) dan pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *E. Coli* dilakukan pengujian di Laboratorium penguji Balai Besar KIPM Makassar, sedangkan untuk pengujian kimia untuk parameter ciguatoksin dilakukan sub kontrak di laboratorium penguji BUSPM Jakarta.
- Hasil pengamatan sarana dan prasarana sesuai dengan ceklist yang tersedia pada lokasi monitoring cemaran perairan tahun 2025 pada triwulan II tahun 2025 didapatkan nilai kesesuaian sebesar 62,5 % dan nilai ketidaksesuaian sebesar 37,5 %. Adapun ceklist sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan

Tabel Hasil pengujian monitoring cemaran perairan di PPI Beba

No	Lokasi	Jenis Ikan	Parameter Uji				Hasil Uji
			Logam Berat (Hg, Cd, Pb)	Ciguatera	Salmonella	E coli	
1	PPI Beba	Ikan Barakuda	✓	✓	✓	✓	Bawah ambang batas
		Ikan kaneka	✓	✓	✓	✓	Bawah ambang batas
		Ikan Katamba	✓	✓	✓	✓	Bawah ambang batas

Dengan terlaksananya tersebut di atas, maka realisasi kegiatan monitoring cemaran perairan triwulan II tahun 2025 telah tercapai 100%. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh sampel dinyatakan memenuhi standar atau berada di bawah ambang batas.



Adapun kondisi sarana dan prasarana pada lokasi target cukup memadai namun terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu mendapatkan perhatian dari instansi terkait :

- Lokasi memiliki tata ruang yang memadai, namun bangunan yang ada tidak mampu menampung seluruh penjual ikan, sehingga masih ada penjual ikan melaksanakan aktifitas di luar bangunan yang disediakan
- Lantai bangunan sudah memakai keramik, namun pembersihan lantai hanya dilakukan pada saat kegiatan selesai dilakukan. Selain itu konstruksi lantai belum dirancang dengan kemiringan yang memungkinkan air dapat mengalir ke saluran pembuangan yang disediakan
- Pertemuan antara lantai dan dinding tidak melengkung sehingga sulit dibersihkan
- Saluran pembuangan tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga air tidak mengalir dengan lancar
- Belum dilengkapi dengan keranjang yang dapat diangkat untuk menampung limbah padat (menggunakan kantong plastik)
- Saluran air hanya dibersihkan pada saat ada kegiatan berlangsung saja
- Belum tersedia program pembersihan untuk langit-langit
- Jumlah, desain dan fasilitas toilet tidak memadai begitu juga dengan jumlah lokasi, desain dan fasilitas pencuci tangan juga tidak memadai.
- Toilet tidak dilengkapi dengan desinfektan (sabun)
- Belum semua penjual ikan menggunakan es dalam jumlah yang cukup untuk menjaga sistem rantai dingin sehingga masih ditemukan ikan yang suhunya rata-rata melampaui batas standar yang ditentukan yakni suhu maksimal antara 4-5 °C
- Timbangan yang digunakan tidak dilakukan kalibrasi secara periodik
- Alat yang digunakan memindahkan ikan belum tersedia alat angkut khusus





- Peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang kontak langsung dengan produk belum terjamin kebersihannya sehingga masih memungkinkan terjadinya kontaminasi. Masih ada penjual ikan yang belum menggunakan meja atau tempat khusus pada saat menjual ikan, sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi pada produk yang diperjualbelikan.

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 4 orang Inspektur Mutu .

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- setelah buka blokir anggaran bernilai Rp. 8.240.000,-

Realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.3.010.000,- atau sebesar 36,53% yang digunakan untuk pembelian sampel, computer supplies, biaya pengujian dan biaya perjalanan dinas biasa.

Sebagai perbandingan anggaran triwulan I sebesar Rp.380.000,- atau sebesar (8,15%) yang digunakan untuk pembelian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik sedangkan pada triwulan II tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.010.000,- atau sebesar 36,53%, sehingga terjadi kenaikan realisasi dari triwulan I ke triwulan II sebesar Rp.2.630.000,- atau sebesar 6,92 %

Anggaran Kegiatan monitoring cemaran perairan triwulan II tahun 2024 pagu sebesar Rp. 86.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.516.000,- atau sebesar 11,07 %.





Akar masalah

Potensi masalah dapat terjadi jika Inspektur mutu kurang akurat dalam proses pengambilan sampel monitoring cemaran perairan sehingga memungkinkan hasil monitoring tidak menggambarkan kondisi cemaran perairan

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikut

Melakukan refreshment cara pengambilan dan penanganan sampel.

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Telah melakukan Refreshment/Sharing session peningkatan kompetensi Inspektur mutu melalui bincang inspiratif terkait Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan



Kegiatan Refreshment/sharing session peningkatan kompetensi Inspektur mutu melalui bincang inspiratif



Kegiatan surveilan monitoring cemaran peraliran pada PPI Beba

IK 4. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kategori	Lokasi Pengawasan (No.)	Kawasan I (No. 1-5)					Kawasan II (No. 6-10)					Kawasan III (No. 11-12)	
		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12
Pengawasan Pengawasan Pengawasan Pengawasan	1. Lokasi Pengawasan 2. Lokasi Pengawasan 3. Lokasi Pengawasan 4. Lokasi Pengawasan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman



konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu :

- Program Prioritas Kedua KKP yaitu penerapan sistem kuota dalam penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, dimana pada kegiatan pengawasan mutu Balai Besar KIPM Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Program Prioritas Ketiga KKP yaitu pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu Balai Besar KIPM Makassar memastikan produk hasil perikanan hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain:



1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan, diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten. ASN harus terus belajar mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik. Balai Besar KIPM Makassar hanya melaporkan hasil pengawasan perikanan domestik yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025 dan



telah diverifikasi oleh tim BPPMHKP Oleh Pusat Mutu Pasca Panen. Kegiatan selanjutnya dilakukan pada triwulan III 2025.

Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 sebesar Rp. 31.500.000,- Anggaran indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.188.660.000,- yang terealisasi pada TW II tahun 2024 sebesar Rp. 57.858.086,- atau 4,9%.

Akar Masalah

Potensi masalah yang terjadi pada triwulan II tahun 2025 adalah pemahaman inspektur mutu terhadap detil kegiatan pengawasan mutu domestik yang dirangkalkan dengan pengawasan produk perikanan pada hari raya besar keagamaan perlu ditingkatkan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Melakukan sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Telah melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan instansi terkait mengenai pengawasan mutu domestik pada triwulan II tahun 2025.



IK 5. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan Ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Daerah Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2022-2023					Tahun 2023				Rasio Ikan Ikan (R) (Rasio 2022-2023)	
		2022	2023	2023	2023	2023	Target 2023	Target 2023	Target 2023	Target 2023	Target 2023	Target 2023
Peningkatan ekspor ikan dan hasil perikanan ke negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	Rasio Ikan Ikan (R) (Rasio 2022-2023)	1	1	64,4	64,4	100,0	100	100	100	100	100	100

Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara pengekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor.

Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektivitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit



Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan Ikan serta hasil pengujian contoh.

Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budi daya.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyalpan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.



Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

IKU ini menggunakan formulasi diatas sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(3.125 - 1)}{3.125} \times 100\% = 99,96\%$$

Berdasarkan formula diatas, realisasi IKU ini di triwulan II tahun 2025 adalah 99 %. Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan penurunan persentase antara Triwulan I tahun 2025 dan triwulan II tahun 2024 sebanyak 1%. Data pada triwulan II Tahun 2025 menunjukkan terdapat 1 (satu) kali notifikasi penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan yaitu Rusia pada produk gurita beku. Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP telah mengeluarkan surat bernomor R.468/BPPMHKP.2/KI.530/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 tentang Pemberlakuan Internal Suspend CV: Prima Indo Tuna (RR.B-049-27). Unit Pengolahan Ikan tersebut



juga telah diinvestigasi oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP bersama Inspektur mutu BPPMHKP Makassar pada tanggal 7 Mei 2025.

Pada triwulan II tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 65.462,64 ton senilai Rp. 4,004 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 3.125 sertifikat. Sebagai perbandingan, pada triwulan I tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47.986,71 ton (koreksi data LCK Triwulan I tahun 2025 sebesar 45,04 ton) senilai Rp. 1,5 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.840 sertifikat (koreksi data LCK triwulan I tahun 2025 sebanyak 2.798 sertifikat).

Volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 24.435 ton senilai Rp. 1,4 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.156 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan II tahun 2025 dan triwulan II tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah sertifikat ekspor sebesar 44,94 % di triwulan II tahun 2025. Hal ini juga terlihat dari peningkatan volume ekspor di triwulan II tahun 2025 jika dibandingkan triwulan II tahun 2024 sebesar 167%.

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu sebanyak 18 orang serta didukung oleh tenaga PPNP sebanyak 12 orang dan PILP sebanyak 12 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan kompetensi untuk mendukung IKU ini telah diikuti oleh petugas pelayanan maupun inspektur mutu antara lain sebagai berikut :



No.	Nama Kegiatan	Penyenggara	Waktu Kegiatan
1.	Briefing Staff Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	10 April 2025
2.	Sincang Inspiratif Penguatan Program Kerja Badan Mutu KKP Dalam Menunjang Program Prioritas KKP	BPPMHKP Makassar	9 Mei 2025
3.	Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Mutu Lingkup Badan Mutu KKP	Sekretariat BPPMHKP	14 – 16 Mei 2025
4.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	15 Mei 2025
5.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	24 Juni 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

I. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Pada triwulan II tahun 2025 belum dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV tahun 2025. Sasaran dari kegiatan ini adalah UPI yang sedang bermohon penerbitan nomor registrasi untuk negara tujuan China serta UPI yang belum memanfaatkan secara maksimal nomor registrasi ke negara tujuan.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP

Pada triwulan II tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 8 (delapan) UPI yang melaksanakan ekspor ke negara tujuan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini.



No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	PT. Multi Monodon Indonesia	25 April 2025	Mohammad Zamrud Suprianto
2.	PT. Mitra Kartika Sejati	28 April 2025	Waode Suharni Wara Zakaria Sapan
3.	CV. Bintang Megah Jaya Perkasa	2 Mei 2025	Kamaruddin Taufiq
4.	PT. Rika Rayhan Mandiri	6 Mei 2025	Andi Rahmawati Muzakki
5.	PT. Biru Laut Nusantara	8 Mei 2025	Putrawati Arfandi
6.	PT. Dunia Marine Products	2 Juni 2025	Waode Suharni Fatima Tayang
7.	PT. Keumang Industri Indonesia	3 Juni 2025	Anugrah Ekayani Taufiq
8.	PT. Bumi Laut Pertiwi	5 Juni 2025	Kamaruddin Arfandi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada UPI dilakukan berdasarkan profiling Unit Pengolahan Ikan dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan monev adalah memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan Balai Besar KIPM Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan monev ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan tanpa menggunakan APBN karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan belum adanya buka blokir sehingga dilaksanakan secara mandiri oleh inspektur mutu.



III. Investigasi Kasus Penolakan Ekspor Di Negara Tujuan

Pada triwulan II tahun 2025 tidak ada notifikasi penolakan ekspor dari negara tujuan di UPT Balai Besar KIPM Makassar, namun Balai Besar KIPM Makassar menerima surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP sebagai berikut :

- Nomor R.468/BPPMHKP.2/KI.530/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 tentang Pemberlakuan Internal Suspend CV. Prima Indo Tuna (RR.B-049-27).
- Nomor T.379/BPPMHKP.2/KI.530/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian Informasi DWPE 16 – 81 PT. Phillips Seafoods Indonesia
- Nomor T.380/BPPMHKP.2/KI.530/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian Informasi DWPE 16 – 81 PT. Wahyu Pradana Binamulla.

Sebagai catatan, untuk PT. Wahyu Pradana Binamulla tidak terdapat notifikasi penolakan ekspor karena Amerika Serikat bukan negara mitra yang dipayungi oleh MRA (Mutual Recognition Arrangement) dengan Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II tahun 2025 adalah melakukan pendampingan pada kegiatan investigasi penolakan ekspor di negara tujuan yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP. Kegiatan pendampingan investigasi tersebut untuk mencari akar masalah terjadinya kasus produk perikanan pada tahun sebelumnya. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPT	Waktu Kegiatan	Produk	Penyebab	Investigasi Mutu
1.	CV. Prima Indo Tuna	7 Mei 2025	Frozen Cephalopod	Arsenik yang melebihi ambang batas	Wara Zakaria Anugra Ekayanti
2.	PT. Wahyu Pradana Binamulla	8 Mei 2025	Frozen Tuna	Salmonella	Mohammad Zamrud Muzakdir
3.	PT. Phillips Seafoods Indonesia	9 Mei 2025	Frozen Tuna	Salmonella	Suprianto Fatima Tayang

Berdasarkan tabel diatas, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan investigasi pada 3 (tiga) UPI di Sulawesi Selatan oleh Inspektur mutu Balai Besar KIPM Makassar. Untuk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia dikenakan status *Detention Without Physical Examination (DWPE)* oleh US FDA yang merupakan ketidaksesuaian yang telah masuk pada *Red List of Import Alert 16 – 81 Detention Without Physical Examination of Seafood Products Due to Presence of Salmonella*. Temuan ketidaksesuaian tersebut menginformasikan terdapat pengujian sampel tuna Ready To Eat (RTE) beku dari beberapa negara Asia Tenggara yang dikumpulkan sejak Mei 2024. Pada pengujian tersebut ditemukan 7 dari 140 sampel dari Indonesia mengandung *Salmonella*. Salah satunya adalah sampel tuna dari produk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia. Untuk PT. Wahyu Pradana Binamulia dan PT. Phillips Seafoods Indonesia tidak menerima notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Adapun untuk CV. Prima Indo Tuna terdapat notifikasi otoritas kompeten Rusia (Roselkhoznadzor) nomor FS-ARV-7/6520-1 didasarkan dari hasil pemeriksaan pengawasan resmi pasar (*official control on the market*) dimana ditemukan produk gurita beku (*frozen octopus*) yang diekspor pada tahun 2024 dengan nomor *Health Certificate* 02.0-03094-2024 mengandung kandungan logam berat (arsenik) melebihi ambang batas yang diperbolehkan yaitu 9,05 mg/kg (ambang batas Rusia < 5 mg/kg). Berdasarkan hasil investigasi terhadap ketiga UPI tersebut maka diperoleh akar masalah dan rekomendasi sebagai berikut :

NO	Nama UPI	Akar Masalah	Rekomendasi
1.	CV. Prima Indo Tuna	Pengendalian terhadap potensi kontaminasi logam berat (arsenik) belum optimal dijalankan	1. Pemutakhiran data pengujian logam berat sesuai dengan lokasi asal bahan baku. 2. Perlu adanya monitoring logam berat.



2.	PT. Wahyu Pradana Sinamulla	1. Pelaksanaan prosedur sanitasi belum konsisten dijalankan 2. Pengendalian proses perlu ditingkatkan	1. Program swab peralatan untuk dibuat lebih detail sehingga seluruh peralatan dapat terwakili 2. Intensitas pelatihan personil terkait sanitasi dan hygiene perlu ditingkatkan 3. Pengendalian terhadap fasilitas yang mensupport proses produksi pada UPI perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan jika terjadi masalah 4. Penyempurnaan sop pada pengendalian proses
3.	PT. Seafoods Indonesia		1. Pemutakhiran pada GMP tahapan penerimaan 2. UPI menyampaikan data terupdate antara lain : - Program pengendalian air dan es - SCIP environmental monitoring procedure - Program pengujian swab peralatan

Kegiatan yang mendukung IXU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran Thn 2025	Persentase Realisasi
1	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Ketentuan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2	3389.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3	3389.BIA.001 Produk perikanan yang dilewati dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0



Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 60.000.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25% dan realisasi pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 15.793.000.

Pada triwulan II tahun 2025 belum ada anggaran yang terealisasi disebabkan belum adanya kebijakan buka blokir. Diharapkan dengan adanya kebijakan buka blokir kegiatan yang mendukung IKU ini dapat terealisasi di triwulan selanjutnya.

Pada triwulan II tahun 2024 terdapat kegiatan pendukung yaitu monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra dengan sisa alokasi anggaran sebesar Rp. 2.859.000. Selain itu, terdapat realisasi anggaran kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor sebesar Rp. 1.675.000.

Akar Masalah

- Masih ditemukan anomali data dalam sertifikasi mutu.
- Terdapat kegiatan pendukung IKU berupa monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra yang perlu diakselerasi pelaksanaannya.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

- Melakukan evaluasi tentang anomali data kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu.
- Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang monev nomor registrasi negara mitra beserta detail pelaksanaannya.

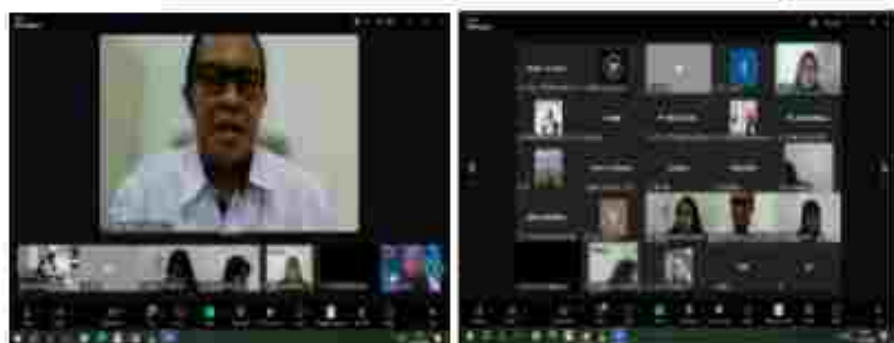
Hasil Tindakan lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan selanjutnya

Telah dilakukan sosialisasi kepada inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan II tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- Briefing siang petugas pelayanan dan inspektur mutu yang dilaksanakan secara luring pada tanggal 10 April 2025.
- Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Penerapan Aplikasi SIAP MUTU yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh pelaku usaha dan inspektur mutu pada tanggal 15 April 2025.
- Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rada Unit Pengolahan Ikan yang dilaksanakan secara luring dan dihadiri oleh inspektur mutu pada tanggal 16 April 2025.



Kegiatan Briefing Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu pada tanggal 10 April 2025



Kegiatan Briefing Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu pada tanggal 10 April 2025



Kegiatan rapat Persiapan Monitoring dan evaluasi Kesesuaian
Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada
tanggal 16 April 2025



Kegiatan Investigasi Ekspor di Negara Tujuan

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar di dukung 1 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 2 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :



Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsistensi sesuai standar 1. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar 2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	1. 75 Nilai 2. 75 Nilai

IK6. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Kategori	Indikator	Nilai 70% (2021-2023)					Nilai 2024				Rata-rata 2021-2024	
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2024	Target 2025	Nilai 2024	Nilai 2025	Target 2024	Target 2025
Pencapaian Pegawai yang memenuhi Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan	Nilai 70% (2021-2023)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan



terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai meliputi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

- $\bar{X}$ = Rata-rata
 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n
 n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan.



Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan II Tahun 2025, terdapat 2.326 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :

1. Pengujian Organoleptik sebanyak 750 kali
2. Pengujian Mikrobiologi sebanyak 956 kali
3. Pengujian Kimia sebanyak 474 kali
4. Pengujian Air dan Es sebanyak 146 kali

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.





Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan II tahun 2025 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 36.537.000,- di Triwulan I Tahun 2025 menjadi Rp. 62.446.000,- di Triwulan II Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 menurun sebesar 10,8% dari sebelumnya sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2024.

Pada Triwulan II Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 13.350.000,- atau sebesar 21,38 % dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 49.096.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan III, dan IV sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu laboratorium untuk kegiatan kalibrasi alat, uji profisiensi, dan uji banding.

Kegiatan Verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji ini dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun. Untuk itu hasil penilaian verifikasi pada Triwulan II Tahun 2025 ini masih mengikut hasil verifikasi pada Triwulan I. Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, berdasarkan Kuisioner Verifikasi Penerapan SMM SNI ISO/IEC 17025:2017 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.

Pada Triwulan II Tahun 2025 ini telah dilakukan Surveilans Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Badan Akreditasi Nasional pada Tanggal 20 Mei 2025. Hasilnya disebutkan bahwa Balai Besar KIPM Makassar masih konsisten dalam pelaksanaan





Sistem Manajemen Mutu Laboratorium, Namun perlu melakukan tindakan perbaikan terhadap 14 temuan ketidaksesuaian Surveilans SMM SNI ISO/IEC 17025:2017.

Akar Masalah:

Tindakan perbaikan surveilans SNI ISO/IEC 17025:2017 masih berlangsung hingga 20 Juli 2025. Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah tindakan perbaikan yang perlu di pantau penyelesaiannya di Triwulan III Tahun 2025.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Penyelesaian tindakan perbaikan Surveilans II SNI ISO/IEC 17025:2017 di Triwulan III Tahun 2025.

Hasil Tindakan lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Telah dilakukan monitoring pelaksanaan Program Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Triwulan II Tahun 2025.



Kegiatan Pengujian Laboratorium



Kegiatan Survei Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 Pengujian Laboratorium



Kegiatan Peningkatan Kompetensi analis laboratorium



IK7. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Jenis Data	Indikator (KPI)	Indikator/Nilai ISO 17020					Skor/Nilai					Rata-rata Skor/Nilai Indikator	
		2021	2022	2023	2024	2025	Target 2025	Target T1 2025	Target T2 2025	Target T3 2025	Target T4 2025	Target 2025	Target 2025
Penerapan persyaratan umum administrasi dan manajemen mutu	1. Apakah terdapat sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Balai Besar KIPM?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan II Tahun 2025, terdapat 77 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.



Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \text{Rata-rata} \\ x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n &= \text{Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n} \\ n &= \text{Banyaknya nilai tingkat pemenuhan} \end{aligned}$$

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.

Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Kompeten dimana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu hulu hingga hilir, ASN inspektur mutu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupdate regulasi-regulasi terbaru.





Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPB Balai Besar KIPM Makassar Triwulan II tahun 2025 yang mengalami perubahan menjadi Rp. 27.304.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000,- di Triwulan I Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 36,52% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,-.

Pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 2.804.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 24.500.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012.

Pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025, belum dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi oleh Pusat Manajemen Mutu pada Balai Besar KIPM Makassar. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu nomor B.827/BPPMHKP.2/TU.210/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025, maka pencapaian IKU Nilai Kualitas Penerapan SMM Lembaga Inspeksi menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu, yaitu pada Triwulan I sebesar 93,33, Triwulan II sebesar 89,93, dan Semester I sebesar 91,58. Sehingga terjadi perubahan capaian kinerja di Triwulan I Tahun 2025 seharusnya adalah 93,33.

Pada Triwulan II Tahun 2025 tepatnya pada tanggal 2 Juni 2025, Balai Besar KIPM Makassar telah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Surveilans HACCP untuk menyamakan persepsi inspektur mutu mengenai pelaksanaan Surveilans HACCP yang sering menjadi perbedaan diantara inspektur mutu. Contohnya adalah penuangan temuan di dalam checklist, penentuan kategori temuan, dan me-review hasil temuan tim teknis dalam penerapan surveilans HACCP.



Akar masalah

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah perbedaan persepsi diantara inspektur mutu yang kemungkinan masih terjadi sehingga diperlukan pemeliharaan kompetensi inspektur mutu.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Pemeliharaan kompetensi inspektur mutu melalui kegiatan sharing session yang dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Berdasarkan hasil monitoring pada Triwulan II, terdapat dua kegiatan yaitu pengecekan antara status kalibrasi peralatan inspeksi dan pelaksanaan surveilan sertifikasi HACCP di UPI/UPRL telah berjalan dengan baik.



Kegiatan Surveilans Penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012



Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Surveilans HACCP tanggal 2 Juni 2025



Sasaran Kegiatan 3

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, untuk mencapai sasaran kegiatan ini diperlukan dukungan 10 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan pencapaian 10 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja:	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :	
1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Lingkup Balai Besar KIPM Makassar)	1. 92 Nilai
2. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	2. 71,5 Nilai
3. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	3. 100 %
4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	4. 87 Indeks
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	5. 86 Nilai
6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	6. 85 persen
7. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/jasa Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	7. 76 Persen
8. Nilai minimal yang di persyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	8. 75 Nilai
9. Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	9. 1 Unit
10. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar	10. 88 Nilai

IK8. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Tahun 2023-2024					Tahun 2025					Tahun 2026-2027	
		2023	2024	2025	2026	2027	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	Target 2031
Pelayanan teknis dan administratif kepada pengguna jasa KIPM Makassar	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPLA) yang menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB:



C) Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

- Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Revisi DIPA bobot 10 %
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA, bobot 15%
- Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10% berubah menjadi 0%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10% berubah menjadi 0%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
- Kualitas hasil pelaksanaan anggaran: merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Total Konversi Bobot pada Aspek pengukuran dan Indikator Kinerja pada Tahun Anggaran 2025 adalah 80%

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 97,28 persen dari target 92 persen. Pada tahun ini berbeda dari tahun 2024



Indikator Kinerja	Periode TW I 2025 (TD2501)		Periode TW II 2025 (TD2502)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Revisi DPA	10	10	10	10
Deviasi Halus DPA	12	12	12	12,02
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	30	30	30	12,79
Saluran Konvensional	0	0	0	0
Penyerapan Tagihan	0	0	0	0
Penyerapan UP dan TUP	10	10	10	10
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	25	25	25	25
Dipembiat SPN (Pengurang)	0	0	0	0
Nilai Total	80	80,00	80	77,82
Nilai IKPA setelah Minus		100,00		97,28
Capaian (Realisasi/Target 0-1)		100		100,79

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai IKPA pada TW II 2025 dibandingkan TW I 2025 sebesar 3,25. Penurunan TW II 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor-S-50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan Indikator IKPA pada periode Triwulan I TA 2025.

Beberapa hal yang mengakibatkan tidak maksimalnya nilai Deviasi halaman 3 DIPA sebagai indikator dari kinerja kualitas Perencanaan anggaran adalah:

- Perencanaan yang tidak akurat: Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran dapat menyebabkan deviasi yang tinggi;
- Kemunduran jadwal belanja: Keterlambatan atau percepatan pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi realisasi anggaran dan menyebabkan deviasi;

Sedangkan penyebab rendahnya dari realisasi anggaran adalah adanya pagu blokir sebagai akibat dari efisiensi anggaran.

Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW II 2025 dan TW II 2024

Indikator Kinerja	Periode TW II 2024 (Rp2000,00)		Periode TW II 2025 (Rp2000,00)	
	Revisi	Nilai Akhir	Revisi	Nilai Akhir
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Revisi DIPA	10	10	10	10
Revisi Realisasi DIPA	10	10	10	10,26
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyusunan Anggaran	10	10,26	10	10,79
Batas Komitmen	10	10	10	10
Pembiayaan Tagihan	10	10	10	10
Pembiayaan Utang TPA	10	10	10	10
Kualitas Realisasi Pelaksanaan Anggaran				
Revisi Output	10	10	10	10
Revisi SPK (Pangusand)	10	10	10	10
Nilai Akhir	100	10,26	100	10,79
Nilai RPA setelah Revisi		10,26		10,79
Capaian (Realisasi/Tarpat 2025)		10,26		10,79

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai IKPA pada TW II 2025 dibandingkan TW II 2024 sebesar 0,26. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan capaian TW II 2025 adalah penetapan target IKPA TA 2025 lebih kecil dari penetapan target TA 2024.

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK



- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tgl 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp23.450.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 0 persen. Pagu kegiatan ini masih terblokir seluruhnya. Output dari layanan manajemen keuangan adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.983.259.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 3.668.191.892 atau 52,53 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp7.006.709.000 dengan realisasi anggaran 3.668.191.892 atau 52,35 persen. sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan II 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp10.632.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.097.000 atau 85,56 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Triwulan II 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan II 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya dan pagu anggaran pada Triwulan II 2024 sangat kecil.



Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita.



Dokumentasi Rapat kegiatan Strategi Penyerapan Anggaran Semester I 2025
(23 Juni 2025)

Akar Masalah

Tidak tercapainya deviasi Hal III DIPA seringkali menjadi salah satu kendala masih rendahnya nilai IKPA-satker Balai Besar KIPM Makassar

Rekomendasi rencana aksi triwulan III 2025

Melakukan komunikasi kepada seluruh jajaran sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan keuangan.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana aksi Triwulan sebelumnya

PPK dan Operator Komitmen telah melakukan penginputan target dan capaian output pada Aplikasi SAKTI Modul Komitmen dan telah mendapatkan nilai 100 persen



IK9. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Kategori Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Revisi Tahun 2022-2023					Tahun 2023					Rata-rata Nilai IK 2022-2023	
		2022	2023	2022	2023	2023	Target 2023	Target 1a 2023	Hasil 1a 2023	Nilai Kinerja Target 1a 2023	Nilai Kinerja Target 1a 2023	Target 2023	Nilai Kinerja Target 2023
Tata usaha Kementerian yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung pembangunan	Nilai kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar	88	87,87	88,2	88,27	88,27	88,27	88,27	88,27	88,27	88,27	88,27	88,27

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi.



Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga, dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

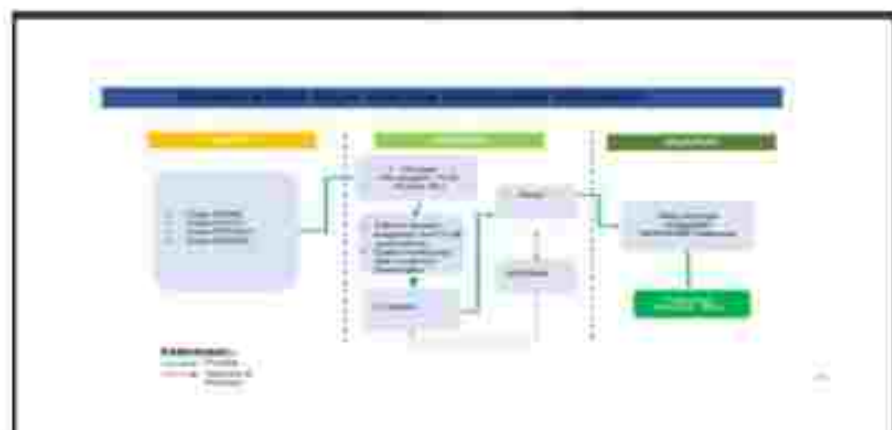
Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran
- Rapat pembahasan percepatan realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 di Balai Besar KIPM Makassar

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu.



Dasboard Aplikasi Monev Kemenkeu

Penjelasan Dasboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II tahun 2025



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 11,02 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48,65 %

Nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 11,02% yang terlihat pada aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> belum dapat menjelaskan kondisi riil nilai kinerja perencanaan anggaran yang ada di Batali Besar KIPM Makassar. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan aplikasi <https://monev.kemenkeu.go.id> belum update yang dibuktikan dengan statemen pada aplikasi yaitu "Nilai Kinerja saat ini baru



dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi”.

Untuk itu perhitungan kinerja perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar diperoleh dari aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id> di login MONEVPA. Nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 adalah 93,44%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

The screenshot shows the SPANINT application interface. At the top, there is a header with the logo and some navigation buttons. Below the header, there is a table with multiple columns. The columns include various indicators and values. The table is titled 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' and contains data for different budget planning periods.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada detail indikator halaman 3 DiPA pada aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id>

The screenshot shows the SPANINT application interface, displaying a table of budget execution performance indicators. The table has multiple columns, including indicators and values. The table is titled 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' and contains data for different budget execution periods.



Berdasarkan table di atas, pada Triwulan II Tahun 2025 nilai perencanaan anggaran belum optimal terutama terlihat pada kode akun belanja 52 yaitu belanja barang. Terpantau nilai deviasi antara perencanaan dan penyerapan anggaran pada bulan April dan Mei Tahun 2025 masih cukup tinggi yaitu 31,36% dan 32,44%, namun pada bulan Juni Tahun 2025 telah dilakukan optimalisasi penyerapan anggaran pada kode akun belanja 52 sehingga terjadi penurunan deviasi yaitu menjadi 14,89%. Namun demikian secara total nilai perencanaan anggaran masih melebihi target yaitu 93,44% dari target 71,5% atau capaian sebesar 130,69%.

Untuk mendukung tercapainya IKU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatanganan SPM;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK.

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.



Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 57.675.000,-. Pada TW II 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 263.504.000,-. Pada TW II 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 31.775.000,-. Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asa cita.

Akar masalah

- Pengelola anggaran kurang konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran diselaraskan dengan pelaksanaan anggaran;
- Kurangnya komunikasi antara perencanaan anggaran dengan ketua tim kerja dan pelaksana kegiatan.



Rekomendasi rencana aksi sebelumnya

Melakukan monitoring dan evaluasi konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Hasil Tindaklanjuti Rekomendasi Rencana Aksi TW II Tahun 2025

- Telah melakukan penginputan target dan capaian output bulan Januari sampai Maret 2025 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen;
- Telah mengoptimalkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025;
- Telah menindaklanjuti hasil monitoring tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.



IK 10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Sumber Strategi	Indikator Kinerja (IK)	Terdapat Tahun 2022 - 2023					Tahun 2024					Terdapat Tahun 2025 - 2026	
		2022	2023	2024	2025	2026	Target 2024	Target Triw II 2024	Realisasi Triw II 2024	% Realisasi Target Triw II 2024	% Realisasi Target Tahun 2024	Target 2025	% Realisasi Target Realisasi
Tim Kerja Pemantauan yang melaksanakan dan memantau pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dan pelaksanaan (KIPM) Makassar	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100	100



Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :



$$\%P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2025;

Pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%. Jika dibandingkan TW I 2025 yaitu 100% dan pada TW II Tahun 2024 capaian realisasinya 100%. Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba". Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp. 159.910.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 135.310.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu semula Rp. 9.000.000,- menjadi Rp. 24.600.000,-;

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 60.916.494,- atau 38% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 47.855.173,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 13.061.321,-





Akar Masalah

Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

Rekomendasi rencana aksi triwulan III tahun 2025

Memastikan kecermatan verifikasi keuangan secara berjenjang (Verifikator Keuangan/Analis Keuangan, PPK dan Bendahara) dengan penggunaan lembar checklist

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW I Tahun 2025

Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist;



Kegiatan Verifikasi keuangan dengan menggunakan lembar checklist BPPMMP

IK 11. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (N)	Kategori 1 (2018-2020)					Kategori 2 (2021-2023)					Rata-rata Nilai Indeks	
		2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2023	2024-2025
Pria	10	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Wanita	10	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Menurut UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran Indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar



pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan
 - c. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Nilai Realisasi IP ASN Semester I Tahun 2024 adalah 90,05, Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.





Nilai Realisasi IP ASN Semester I Tahun 2025 adalah **85.96**

Telah dilakukan update data Pendidikan dan sertifikat pelatihan pada aplikasi MyAsn dan aplikasi SIASN yang dilakukan oleh pegawai dan operator verifikasi/approval.

Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk menjawab tantangan yang selalu berubah (kompeten) dengan kinerja pegawai yang meningkat dibuktikan Aparatur Sipil Negara menginput sertifikat pelatihan yang telah diikuti pada aplikasi Myasn dan nilai Indeks Profesionalitas ASN yang meningkat. Kompetensi meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara Balai Besar KIPM Makassar:

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan fleksibel skill yang telah diikuti akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Nilai IP ASN dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 = -
 - b. Pendidikan S-2 :



- S2 Keahlian : 7 orang
 - c. Pendidikan S-1/D-IV :
 - S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
 - S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
 - S-1 /D-IV Pelaksana : 4 orang
 - d. Pendidikan D-III ;
 - D-III Keterampilan : 4 orang
 - D-III Pelaksana : 1 orang
 - e. SLTA :
 - SLTA Keterampilan : 2 orang
 - SLTA Pelaksana : 4 orang
3. Berdasarkan Surat Pkt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SO/X/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
1. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 2. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 3. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).



Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Pemerataan Pendidikan Minimal Dengan Kriteria Jabatan	Penilaian yang Diperoleh Pegawai (Skor Maksimal)					
				SI	SA	SI / SA	DI	DI / SI, SA, DI	DI / SI, SA, DI
Kualifikasi	Manusia	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DI	25	25	25	10	10	10
		Jabatan Manajerial	SI / DI	25	25	25	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	DI	25	25	25	20	10	10
	Kompetensi	Jabatan Fungsional (Kategori Manajerial)	SLTA	25	25	25	25	20	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Teknis)	DI	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Pelaksana)	SI / DI	25	25	25	10	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Pelaksana)	SI	25	25	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Pdt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari:

- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan
- Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);
 - Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);
 - Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan

Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.

Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Penilaian	Jabatan Manajerial			Jabatan Non-manajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja:					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20



	Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	Kurang / Misconduct	10	10	10	10	10
	Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	Sudah	10	10	10	-	-
	Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	Sudah	-	-	-	10	-
	Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	Sudah	-	-	-	-	10
	Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP setahun					
	PNP					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Aparatur Sipil Negara yang mendapatkan nilai 5 = 22 orang dan mendapatkan nilai dibawah 5 = 13 orang.

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Persentase
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK dan SANGAT BAIK.



6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- Hukuman disiplin ringan;
- Hukuman disiplin sedang; dan
- Hukuman disiplin berat.

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Omnial	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar KIPM Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemuktahiran riwayat kepegawalan pada Siasn BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari aplikasi Siasn BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN;

- c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN / rekonsiliasi data laporan kinerja ke SIASN BKN / data riwayat Kinerja pada SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori; dan
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
 - a. Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).
 9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:
Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i & IP_1 &= W_{1j} \cdot R_{1j} \\
 & & IP_2 &= W_{2k} \cdot R_{2k} \\
 & & IP_3 &= W_{3l} \cdot R_{3l} \\
 & & IP_4 &= W_{4m} \cdot R_{4m} \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Nilai IP ASN = Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai Disiplin

$$85,96 = 21,71 + 34,11 + 25,14 + 5$$

$$IP \text{ ASN BKKIPM Makassar} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN BKKIPM Makassar}}{\text{Jumlah pegawai ASN BKKIPM Makassar}}$$

$$85,96 = \frac{3008,75}{35}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai aktif yang berkedudukan hukum sebagai ASN, meliputi:
- PNS, dan
 - PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.
12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
- Calon PNS (CPNS);
 - Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - Dipekerjakan (DPK); dan
 - Tugas Belajar dibiayai

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut:

1. Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 83,45 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 85,96 masih lebih tinggi dengan selisih 2,51



1. KIPM Makassar

1 20 845 22 351 5 000 1 91 06 703

2. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran dengan nilai IP ASN 83,42 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 85,96 masih lebih tinggi dengan selisih 2,54

1. KIPM Makassar

1 20 845 22 351 5 000 1 91 06 703

Sumber data : <http://ropea.kkp.go.id/4080/ip-asn> pertanggal 10 Juli 2025

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 35 Pegawai yang sebelumnya 38 pegawai yang pensiun (Hasbullah, S. St) , mutasi ke Biro umum (Abdul Mubarak Azis, S.T, dan Poltek Bone (Ir Anwar, M. Si)

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	3
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1



12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	9
	Total	35

Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.285.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 78.833.000
- Realisasi Rp. 73.424.355 (99.46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp. 0

Program Nasional

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Aspek Pemanfaatan



Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu, IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak profesional dalam kaitan pelayanan publik.

Akar masalah

- Efisiensi Anggaran berdampak pada pengembangan kompetensi pegawai sehingga tidak dapat dilakukan pelatihan secara langsung.
- Aparatur Sipil Negara mengikuti pelatihan secara daring

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

- Aparatur Sipil Negara mengikuti pelatihan secara daring

Hasil Tindakan lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya

1. Data Pelatihan di Menu Riwayat Sertifikasi pada aplikasi MyAsn secara otomatis masuk ke data Diklat tanpa verifikasi dan aproval
2. Aparatur Sipil Negara telah menginput sertifikat Pelatihan dengan dibuktikan nilai IP ASN yang meningkat.

No	Nama	Kompetensi (Skill)	Status	Validasi	Validasi	Validasi	Validasi	Validasi	Validasi
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...



Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :

Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2025 yaitu : penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi Renja mencapai 22,5 %.

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pengukuran Kinerja ini telah terselesaikan Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :

Penyusunan Manual IKU tahun 2025 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I dan Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2025 sehingga realisasi tercapai 6,5 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal

dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal realisasi tercapai 12,5%.

Bobot realisasi capaian :

$$= \text{Parameter 1 (22,5\%)} + \text{parameter 2 (30 \%)} + \text{parameter 3 (6,5 \%)} + \text{parameter 4 (12,5 \%)} \\ = 71,5 \%$$

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x Target

$$= \frac{71,5}{86} \times 100 \\ = 83,13 \%$$

Indikator ini di hitung Tahunan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II adalah :

1. Mengikuti Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP sesuai Surat Sekjen Biro Perencanaan nomor B.1694/SK.1/RC.610/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 memberikan pemahaman dan kapasitas aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) serta Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.



2. Tim SAKIP telah melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh KKP melalui aplikasi E-Milia sesuai Surat Tugas Nomor B.1592/88KIPM.MKS/KP.440/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 jumlah pegawai 35 Orang
3. Telah dilaksanakan optimalisasi capaian kegiatan dan dilakukan penginputan pada aplikasi SAKTI dengan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 49.16 %

Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu " Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar.

IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu: "Akuntabel" ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.

Untuk pemanfaatan melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp 42.795.000. Jika dibandingkan pemanfaatan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan pagu Rp 24.998.000 teralisasi anggaran sebesar Rp 5.593.000 atau 22,37%



Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah

Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan secara berkala untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan solusi yang tepat

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya

Telah mengoptimalkan capaian kegiatan melalui evaluasi koordinasi internal yang intensif dan evaluasi capaian secara mendetail (dokumentasi terlampir), sehingga realisasi penyerapan anggaran hingga akhir Triwulan II mencapai 49,16 %





IK 13. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Jenis Bidang	Indikator Kinerja (IK)	Maret 2024 - Desember 2024					Tahun 2025					KIPM Makassar 2025	
		2024 - 2024	2024 - 2024	2024 - 2024	2024 - 2024	2024 - 2024	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025	Target 2025
Pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.





Indikator kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100\%$$

Pada triwulan II Tahun 2025 terdapat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Inspektorat Jenderal KKP yang menghasilkan 1 temuan dengan 4 rekomendasi sesuai dengan LHP Nomor B.137/ITI.4/HP.430/V/2025. Sampai dengan penyusunan laporan ini telah dilakukan tindak lanjut melalui surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU. 210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025, B.2346/BPPMHKP.1/HM.460/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 dan penjelasan tambahan bahwa sampai dengan tanggal 3 Juli 2025, Website SIPPN KemenPAN RB belum dapat diakses, bukti tambahan Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SP Balai Besar KIPM Makassar, serta bukti pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik yaitu jumlah sertifikat yang terbit setiap harinya dan diposting secara harian..

Hasil dari keseluruhan tindak lanjut tersebut menghasilkan nilai realisasi indikator kinerja ini mencapai 94,12%. Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2025 pencapaian nilai realisasi indikator kinerja mencapai 100% demikian pula jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada Tahun 2024 mencapai 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran semula Rp. 1.502.912.000,- setelah adanya revisi buka blokir menjadi Rp.1.852.749.000,- yang sampai dengan triwulan II tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.864.986.923,- atau





46,69% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumisi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp.665.222.000,- terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 278,52%.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba".

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini mencerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.





Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar masalah

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala.
- Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen secara lebih cepat.

Hasil Tindaklanjuti rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode triwulan II Tahun 2025.





IK 14. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Nama Organisasi	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020-2024					Tahun 2025					Rendahnya Biaya (Rp) Tahun 2020-2024	
		2020	2021	2022	2023	2024	Target 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2025	Target 2025	Target 2025
Pada Balai Besar KIPM Makassar yang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	Persentase rencana umum pengadaan barang/jasa yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :





Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SIRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 2.892.982.000}}{\text{Rp. 2.892.982.000}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan II adalah sebesar 100 % dari target 76 % atau capaiannya sebesar 131,57 %. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 99,06 % maka terjadi kenaikan sebesar 0,94 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

1. Menginventarisir kegiatan dan anggaran yang telah direvisi pada RKA- KL;
2. Operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya;
3. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ke dalam aplikasi SIRUP

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Pada triwulan II telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana





Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan diumumkan sebesar Rp.2.892.982.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 5 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp. 114.750.000,-
- b. Paket Penyedia sebanyak 6 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 9.176.000,-
- c. Paket Penyedia sebanyak 21 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 2.694.056.000,-
- d. Paket E-Purchasing sebanyak 1 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 75.000.000,-

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBI yang diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHP persentase capaian IKU ini adalah 100 %

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II sebagai berikut :

1. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 12 Mei 2025;
2. Mengikuti bimbingan/ diskusi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang dipandu oleh Kepala Subbagian Umum/ Ketua Tim Kerja





Dukungan Manajemen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hari Senin, 19 Juni 2025.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 120.504.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.OE Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.OF Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh = Rp. 75.000.000,-

Pada triwulan I 2025 alokasi anggaran untuk IKU ini adalah Rp.0,-, namun dengan adanya kebijakan pembukaan blokir pada triwulan II 2025 maka pagu anggaran nilainya menjadi Rp 120.504.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.145.000,- dengan persentase 2,51 %. Adapun sisa pagu anggaran yang belum terealisasi akan dilaksanakan dan direalisasikan pada triwulan III.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) berbasis Web (*Web based*) mendukung misi Asta Cita ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SIRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.





Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya
3. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional,
4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi Balai Besar KIPM Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Akar masalah

- Ketidaksesuaian nilai paket pengadaan yang diinput dengan nilai paket pengadaan yang terumumkan pada portal aplikasi SiRUP

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SiRUP.go.id agar lebih cermat dan lebih teliti

Hasil tindakanjuz rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Operator telah mengikuti bimbingan/ diskusi terkait Sistem Informasi Rencanaa Umum Pengadaan (SiRUP)) yang dipandu oleh Kepala Subbagian Umum/ Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);





Kegiatan Operator mengikuti bimbingan/diskusi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

IK 15. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

Indikator	Indikator	Rencana Tahun 2023-2025					Tahun 2023					Rencana Tahun 2023-2025	
		2023	2024	2025	2026	2027	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2023	Tahun 2024
Pada tahun 2025, 100% unit kerja yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen	Kualitas yang dihasilkan oleh unit kerja yang telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen						100	100	100	100	100	100	100

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen





pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di Instansi pemerintah;

Balai Besar KIPM Makassar telah memperoleh predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2022 sesuai Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor B.420/ITJ.5/HP.550/XI/2022 tanggal 18 November 2022 Hal Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar KIPM Makassar, diperoleh nilai total sebesar 82,24 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 43,49 (Pemenuhan 21,40 dan Reform 22,09) dan Komponen Hasil sebesar 38,75. Nilai secara total telah memenuhi ambang batas menuju WBK, namun terdapat tiga area di Komponen Pengungkit (satu area pada Pemenuhan yaitu





Penataan Tata Laksana dan dua area pada Reform yaitu Penataan Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen SDM) yang tidak mencapai ambang batas 60%;

Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Ungkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung dan membuktikan implementasi zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :

- (a) Penyiapan dokumen penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
- (b) Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK masing-masing unsur oleh tim sekretariat:
 - Unsur manajemen perubahan (1) dilakukan verifikasi pada tanggal 30 April 2025;
 - Unsur penataan tata laksana (2) telah diverifikasi pada tanggal 11 Juni 2025;
 - Unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3) telah diverifikasi pada tanggal 17 April 2025;
 - Unsur penguatan akuntabilitas, (4) telah dilakukan verifikasi pada tanggal 24 April 2025;
 - Unsur penguatan pengawasan (5) diverifikasi pada tanggal 17 April 2025;



- Unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6) dilakukan verifikasi pada tanggal 22 Mei 2025;
- (c) Internalisasi/sosialisasi penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing unsur pada kegiatan apel pagi :
- Unsur manajemen perubahan (1) pada tanggal 21 April 2025;
 - Unsur penataan tata laksana (2) pada tanggal 28 April 2025;
 - Unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3) tanggal 5 Mei 2025;
 - Unsur penguatan akuntabilitas (4) pada tanggal 19 Mei 2025;
 - Unsur penguatan pengawasan (5) pada tanggal 26 Mei 2025;
 - Unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6) pada tanggal 16 Juni 2025;
 - Unsur penguatan hasil pada tanggal 23 Juni 2025;
- (d) Internalisasi/sosialisasi agen perubahan tentang reformasi birokrasi oleh tim agen perubahan Balai Besar KIPM Makassar pada tanggal 30 Juni 2025;
- (e) Instruksi dari pimpinan dan unsur manajerial terkait konsistensi penerapan zona integritas WBK untuk seluruh pegawai (ASN dan non ASN) lingkup Balai Besar KIPM Makassar dalam briefing petugas pelayanan pada tanggal 15 Mei 2025 dan 14 Juni 2025;
- (f) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaiannya melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
- (g) Penegakan tidak memberikan komisi atau keuntungan dari penyedia kepada pengelola anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, serta penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- (h) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan fasilitas difabel, pengadaan papan informasi digital, dan penataan ruang pelayanan publik;





Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :

- (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- (3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
- (4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15,00;
- (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya Manusia :

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 58 orang, yang terdiri dari ASN 34 orang dan non ASN 24 orang;

Anggaran :

Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi, anggarannya dialihkan menjadi Rp. 0,-. Anggaran untuk operasional zona integritas WBK menyatu dengan anggaran keperluan perkantoran





Program Nasional :

Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam memberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai Besar KIPM Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 "Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 "Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil".

Aspek Pemanfaatan :

Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :

- (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
- (b) Mencegah terjadinya korupsi;
- (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
- (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;





- (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
- (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
- (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, namun pada triwulan II tahun 2025 telah diperoleh hasil penilaian sementara dari BPPMHKP. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,19 atau 100,25% dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,16 dan komponen hasil 38,03. Rekapitulasi hasil penilaian disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Unsur	Sobot Nilai	Perolehan Nilai	%
1	2	3	4	5
A.	Pengungkit :	60,00	37,16	61,93
I.	Pemenuhan :	30,00	27,28	90,94
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,32	83,04
2	Penataan Tataaksana	3,50	2,92	83,33
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,56	87,16
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,47	89,31
5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,22	96,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
II.	Reform :	30,00	9,88	32,92
1	Manajemen Perubahan	4,00	2,83	70,83
2	Penataan Tataaksana	3,50	2,17	61,95
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,50	70,77
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
	Total Pengungkit		37,16	
B.	Hasil	40,00	38,03	95,08
	Total Hasil		38,03	
	Nilai Akhir		75,19	



Akar masalah

Potensi kelambatan verifikasi dan validasi dokumen penerapan zona integritas WBK dikarenakan penanggung jawab unsur lambat menyampaikan dokumen tersebut ke Sekretariat WBK;

Rekomendasi rencana aksi Triwulan berikut

- Para penanggung jawab unsur melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan;
- Tim sekretariat sebagai verifikator melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK sebelum divalidasi oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar;

Hasil Tindakanjuz Rekomendasi rencana aksi triwulan aksi triwulan sebelumnya

- Masing-masing penanggung jawab unsur telah menyampaikan dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan;
- Tim sekretariat telah melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK pada semua unsur;



Kegiatan Operator mengikuti bimbingan/diskusi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Penataan (SIRUP)

IK 16. Inovasi pelayanan public lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

[illegible]

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan melalui kompetisi, inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemerintahan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BMUN dan BUMD, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria Inovasi yaitu :

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;



- b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. Bermamfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. Dapat ditransfer/ direplikasi, yaitu dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/ atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Di dalam peraturan Menteri PANRB No.91 tahun 2021 tentang Pambinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan :

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Pengembangan Inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti Penggunaan Teknologi, Pelatihan, dan Kolaborasi.

a. **Penggunaan teknologi**

- 1. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pemerintah



2. Menggunakan teknologi mobile
3. Menggunakan e-meterai/ meterai digital dan tanda tangan elektronik
4. Menggunakan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE

Verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengakses aplikasi SPBE.

- Verifikasi biometrik

- Teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri fisik atau perilaku unik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata
- Data biometrik disimpan dalam sistem sebagai template digital
- Saat pengguna mencoba mengakses layanan, sistem

- Single Sign On (SSO)

- Sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE
- SSO mengintegrasikan berbagai aplikasi administrasi ke dalam satu sistem
- SSO meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan digital pemerintah
- Penerapan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan memberikan kemudahan bagi pengguna

- Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis



Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik

b. Pelatihan

1. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai sektor publik
2. Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan
3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif

c. Kolaborasi

1. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif
2. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Publik, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan beberapa kegiatan :

- a. Penyampaian kepada seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar disetiap apel senin pagi untuk senantiasa berpedoman pada budaya kerja PNS sebagai nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku Budaya kerja untuk menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat secara efektif dan efisien agar tetap berkomitmen menjadi ASN BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan



kolaboratif, selalu menjaga etika dan integritas, dapat meningkatkan disiplin kerja serta berorientasi pada hasil.

Tujuan penyampaian budaya kerja ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani. Manfaat budaya kerja ini sangat penting bagi individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan.

Manfaat yang diperoleh dari budaya kerja pegawai yaitu meningkatkan produktivitas motivasi pegawai, mendorong kolaborasi dan kerja tim, meningkatkan reputasi instansi, mengurangi konflik internal, mendorong inovasi, serta mampu mempercepat adaptasi terhadap perubahan.

- b. Pada tanggal 15 Mei 2025, tim inovasi SI JEMPOL JALA EKSPOR dan Inspektur mutu BPPMHKP bersama penyuluh perikanan bidang pengolahan KKP melakukan pendampingan pada salah satu pelaku usaha menengah kecil kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan yaitu SMK Neg 9 Makassar. Adapun permasalahan yang diidentifikasi antara lain UMK SMK Neg 9 Makassar tersebut ingin mengembangkan aktivitas bisnisnya dengan membuat kelengkapan Aspek legal terkait sertifikasi SKP, dimana UMK sudah memiliki aspek legal seperti NPWP, IPRT, NIB dan sertifikat halal dengan produk yang sudah diproduksi seperti Dimsum, odeng, ekado, bakpia tuna, dan kripik rumput laut.

Pada kegiatan pendampingan tersebut, inspektur mutu memberikan edukasi/penyadartahuan tentang kesesuaian nomor KBLI pada izin usaha serta melakukan kunjungan lapangan ke calon UMKM yang akan disertifikasi SKP.



Beberapa insight yang diperoleh pada pendampingan ini antara lain Inspektur mutu Makassar mengkomunikasikan ke pt. kegiatan SKP mengenai kondisi tersebut dan kemungkinan untuk dilakukan sertifikasi SKP, kelayakan sistem produksi pada UMKM SMK Neg 9 Makassar.

- c. Pada tanggal 20 Mei 2025 melakukan pendampingan kepada pelaku usaha PT. Sakinah Bahari Indonesia dalam kegiatan Roadshow Inovasi Si Jempol Jala Ekspor terhadap permasalahan yang diidentifikasi antara lain perusahaan tersebut ingin mengembangkan aktivitas bisnisnya dengan membuat sister company pada kawasan yang sama dengan perusahaan yang eksisting saat ini tetapi dengan plant yang berbeda. Sister company yang dibuat tersebut bernama PT. Samalona Bay Seafood dengan rencana ruang lingkup frozen demersal fish, frozen pelagic fish, frozen cephalopod dan frozen slipper lobster. Pihak perusahaan juga sudah melengkapi aspek legal seperti NIB, NPWP, Akta Notaris. Terdapat Sertifikasi Standar yang diberi keterangan belum terverifikasi. Kegiatan pendampingan tersebut, Inspektur mutu memberikan edukasi/penyadartahuan tentang kesesuaian nomor KBLI pada izin usaha serta melakukan kunjungan lapangan ke calon UPI yang akan disertifikasi.
- d. Breafing pagi dan evaluasi petugas pelayanan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar, tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendiskusikan isu-isu terkait pelayanan kepada pelaku usaha, serta penyampaian perlunya inspektur mutu dan petugas pelayanan memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, mengembangkan





pengetahuan yang ada di KKP serta meningkatkan kompetensi dan kapasitas personil dalam menghadapi dinamika informasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang berkembang pesat karena Balai Besar KIPM Makassar sebagai instansi pelayanan publik menjadikan kualitas pelayanan sebagai indikator keberhasilan organisasi dalam mendukung program Asta Cita.

- e. Untuk pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025 lingkup KKP, Balai Besar KIPM Makassar telah mengirimkan proposal kelukutsertaan kegiatan pelaksanaan KIPP dan sesuai Berita Acara Hasil Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik BPPMHKP Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 untuk penilaian tingkat eselon I BPPMHKP maka Inovasi Pelayanan Publik "SI JEMPOL JALA EKSPOR" Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai 80,36 yang terdiri dari penilaian Aspek Keberuan dengan nilai 12,56, Aspek Efektifitas dan Manfaat dengan nilai 43,88, Aspek Adaptabilitas dengan nilai 9,07, serta Aspek Keberlanjutan dengan nilai 14,86. Namun untuk penilaian di tingkat Sekretariat Jenderal sesuai dengan Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025 nomor : B.474/SI/TU.220/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 untuk penilaian proposal inovasi pelayanan publik maka Inovasi Pelayanan Publik "SI JEMPOL JALA EKSPOR" Balai Besar KIPM Makassar belum masuk dalam kategori Proposal Yang Memenuhi Kriteria Penilaian.





Si Jempol Jala Ekspor (Balai Besar KIPM Makassar)

No	Aspek	Bobot Aspek	Sub-Aspek	Bobot Sub-Aspek	Nilai T	Sub-Aspek T	Aspek T
1	Kelembutan	14%	Letter Booking	15%	91,00	17,29	12,56
			Tagihan	22%	99,00	20,42	
			Cara Kerja Inovasi	30%	90,00	27,00	
			Kecanggihan Ide/Gagasan	23%	89,00	20,42	
2	Efektivitas dan Manfaat	52%	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	31%	85,00	25,72	43,86
			Dampak Inovasi	49%	85,00	58,48	
3	Adaptabilitas	17%	Upaya Difusi dan Reproduksi Inovasi	100%	53,33	53,33	9,07
4	Keterjangkauan	17%	Sumber Daya	42%	88,00	30,96	14,86
			Strategi Keterjangkauan	58%	87,00	50,46	
Total Penilai 1							89,36

- f. Dalam mendukung IKU ini terdapat beberapa kegiatan yang diikuti oleh Pegawai Balai Besar KIPM Makassar yaitu :

No	Pelatihan/ Sosialisasi/ Workshop	Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Sosialisasi Kebijakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025	21 April 2025	Fusid Data dan Informasi KKP
2	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025	BPPMHPK
3	Pelatihan Pelayanan Publik	30 April 2025	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Strategi Peningkatan Kualitas Inovasi Pelayanan Publik	30 April 2025	SmartID
5	Sosialisasi penggunaan Sinovik	6 Mei 2025	Bidang Pelayanan Publik Menpan RB
6	Entri meeting Evaluasi Pelayanan Publik	6 Mei 2025	BPPMHPK
7	Microlearning Pelayanan Prima	5 Juni 2025	Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
8	Forum Keterbukaan Informasi Publik	18 Juni 2025	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar negeri





Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan inovasi pelayanan publik adalah seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 59 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 36 pegawai dan pegawai PPNN/PJLP sebanyak 23 pegawai.

Untuk mendukung kegiatan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, anggaran tersedia pada Pagu 3987.EBA.962.051.00 sebesar Rp.3.600.000,-

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 1.267.500,- atau sebesar 35,21%. Ini mengalami kenaikan sebesar 17,61 % dari TW I Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.633.500,- atau 17,60%

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar untuk Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak termasuk dalam kegiatan Program Nasional pada tahun 2025 namun Inovasi Pelayanan Publik umumnya tergolong sebagai kegiatan yang mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing dan kualitas SDM.

Inovasi pelayanan publik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Manfaat inovasi pelayanan publik yaitu :





- **Meningkatkan kualitas layanan**
Inovasi dapat membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga mampu memberikan rasa kepuasan yang lebih tinggi.
- **Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik**
Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika layanan terasa lebih manusiawi, responsive dan pemberi layanan terpercaya.
- **Efisiensi Biaya dan Waktu**
Proses yang tadinya lambat dan birokratis bisa dipangkas serta mampu menghemat anggaran operasional.
- **Mempersiapkan menghadapi perubahan**
Inovasi dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa mendatang.
- **Menjawab kebutuhan masyarakat**
Inovasi dapat membantu pemerintah mengembangkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Akar Masalah

Inkonsistensi tim inovasi dalam melakukan pengumpulan data dukung inovasi

Rekomendasi rencana aksi triwulan III

1. Tim Inovasi lebih proaktif dalam menggali potensi masalah yang dihadapi masyarakat terutama di level UMKM melalui sinergitas penyuluh perikanan.
2. Evaluasi tim kerja inovasi





kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasAN masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 9 (Sembilan) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PMMT/ HACCP)
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)
3. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air
4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan





5. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan
6. Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik
7. Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
8. Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
9. Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$n = \frac{X^2 NP (1-P)}{d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)}$$

X² = Nilai z² atau square tabel = 3.841
 dengan df = 1 dan α = 5% = 0.05
 P = Perkiraan proporsi populasi (jika tidak diketahui maka P = 0.5)
 N = Jumlah Populasi
 d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$n = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times 47} = \frac{3.841 \times 0.5 \times 0.5}{0.0025 \times 47}$$

$$n = \frac{46.092}{0.1175} = 392.706 = 393$$

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 7.932 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 8.000 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 234 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 674, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dari Michael tersebut. Peningkatan jumlah responden ini didukung oleh kesadaran Petugas Pelayanan dan Inspektur





Mutu/Asisten Inspektur Mutu dalam memberikan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Triwulan II ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survey Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kali, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan





meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan II Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 674 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,71 atau sebesar 92,84 setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 105,5%. Apabila data Hasil IKM Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan TW II Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan I - 2025	Triwulan II - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3,733	3,730	↓
2	Kemudahan prosedur	3,731	3,724	↓
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3,724	3,874	↓
4	Kesesuaian biaya	3,711	3,757	↑
5	Kesesuaian produk	3,741	3,737	↓
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3,706	3,665	↓
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3,716	3,653	↓
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3,746	3,740	↓
9	Kualitas isi/sarana	3,706	3,702	↓
	Nilai IKM	93,32	92,84	





Data Rincian Responden survey IKM Trivutian II Tahun 2025 yaitu:



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur unsur kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah), unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk nilai unsur yang paling rendah adalah unsur unsur kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah), unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.





Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya aplikasi SIAP Mutu masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih dirasakan cukup mengganggu bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan Indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan II pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan II 2025 mengalami peningkatan dari 92,54 menjadi 92,84. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan I tahun 2025, maka nilai IKM pada triwulan II 2025 mengalami penurunan dari 93,32 menjadi 92,28. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan I Tahun 2025 ke Triwulan II 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Selama masa transisi aplikasi ini petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan II Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- Pada tanggal 10 April 2025 dilaksanakan Briefing siang Petugas Pelayanan, Verifikator Dokumen dan Penandatanganan SMKHP.





- Pada tanggal 15 April 2025 dilaksanakan Sosialisasi Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2025 secara daring. Disampaikan bahwa saat ini telah diluncurkan platform SIAP MUTU sebagai tools dalam pelayanan sertifikasi ekspor. Beberapa potensi masalah yg terjadi dalam pelayanan antara lain masih relatif tingginya permohonan revisi SMKHP.
- Pada tanggal 15 Mei 2025 dan tanggal 24 Juni 2025 dilaksanakan Briefing Petugas Pelayanan pada inspektur mutu dan petugas pelayanan untuk memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kompetensi dan kapasitas personil dalam menghadapi dinamika informasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang berkembang pesat.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan jumlah responden pada Triwulan II 2025 meningkat dari 197 menjadi 674.

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
6.	PPNPN	12
7.	PJLP	12
	TOTAL	42





Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum ada atau sebesar Rp. 0,-, karena anggaran yang ada masih diblokir dan belum dapat dicairkan.

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu 3987 EBA 994.002.B semula Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 476.445.000,-. Hingga Triwulan II tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak Rp. 165.076.254,- pada langganan daya dan jasa, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 311.368.746,-.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke-5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada Balai Besar KIPM Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan public yang prima.

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap





ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Aspek Pemanfaatan

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar masalah

Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu masih kurang menyampaikan layanan apa yang harus diisi di aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna jasa sesuai layanan yang sudah diberikan. Sehingga Pengguna Jasa masih ada kekeliruan dalam memilih layanan yang sudah didapatkan. Yaitu pengguna jasa harusnya memilih layanan Surveilans/ Jasa Pengujian tapi mengisi layanan Inspeksi/ Penjaminan HACCP.

Petugas Layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu harus lebih aktif meminta kritik saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar.





Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

- Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk lebih aktif meminta kritik saran dan masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik.
- Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP.

Hasil Tindaklanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya

Briefing kepada Petugas Layanan pada tanggal 10 April, 15 Mei dan 24 Juni 2025 tentang 2025 inspektur mutu dan petugas pelayanan memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang hasilnya jumlah responden meningkat di triwulan II 2025 dari 197 menjadi 674.



IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan II Tahun 2025 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar 114,85 (kategori Istimewa).

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak BPSPL Makassar dalam rangka percepatan penerbitan PKKPRIL (IKU1)
2. Melaksanakan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu (IKU2)
3. Melakukan refreshment cara pengambilan dan penanganan sampel (IKU3)
4. Melakukan evaluasi tentang anomali data kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu (IKU5)
5. Penyelesaian tindakan perbaikan Surveillance II SNI-ISO/IEC 17025:2017 di Triwulan III Tahun 2025 (IKU6)
6. Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP (IKU17)

4.3 Tindaklanjuti

Adapun rekomendasi pada triwulan IV tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi Triwulan sebelumnya :

Berkoordinasi dengan penyuluh perikanan yang ada di propinsi sulawesi selatan dan para penyuluh yang ada di kabupaten dalam rangka pendampingan ke UPR yang akan mengajukan sertifikasi melalui QSS; (IKU 1)

Tindaklanjuti :

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak BPSPL Makassar dalam rangka percepatan penerbitan PKKPRIL
- b) Melakukan koordinasi dengan PP Untia dan Dinas Perikanan Kab. Sinjai terkait akselerasi Sertifikat awak kapal sebagai bagian upaya pembinaan dari Dirjen Teknis.

2. Rekomendasi triwulan sebelumnya :

Inspektur Mutu mengoptimalkan kegiatan desk audit dengan lebih detail untuk mendapatkan gambaran kondisi yang sebenarnya pada unit pengolahan dengan lebih baik. (IKU2)

Tindaklanjuti :

- a) Meminimalisir kelemahan Inspektur secara virtual maka Inspektur Mutu telah melakukan desk audit secara detail untuk mendapatkan gambaran kondisi UPI yang akan diinspeksi dengan lebih lengkap.
- b) telah melakukan koordinasi dengan Penanggungjawab Pembina CDIB dari Direktorat Teknis Penguatan Daya Saing Perikanan dan Kelautan melalui via whatsapp dan telepon.



3. Rekomendasi sebelumnya :

Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar untuk dilakukan sosialisasi cara penanganan ikan yang baik serta sanitasi dan hygiene, pada pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu semester II. (IKU 4)

Tindakan lanjut :

Pada triwulan II tahun 2025 belum dilakukan koordinasi dengan pihak pengelola pasar, koordinasi dan sosialisasi akan dilakukan pada triwulan III bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan.

4. Rekomendasi sebelumnya :

Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang kegiatan evaluasi kesesuaian penerbitan HC dan detail pelaksanaannya. (IKU5)

Tindakan lanjut :

Telah dilakukan sosialisasi kepada Inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan II tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- a. Briefing siang petugas pelayanan dan inspektur mutu yang dilaksanakan secara luring pada tanggal 10 April 2025.
- b. Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Penerapan Aplikasi SIAP MUTU yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh pelaku usaha dan inspektur mutu pada tanggal 15 April 2025.
- c. Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Unit Pengolahan Ikan yang dilaksanakan secara luring dan dihadiri oleh inspektur mutu pada tanggal 16 April 2025.

5. Rekomendasi sebelumnya :

Dilakukan monitoring terhadap konsistensi pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium (IKU6)

Tindakan lanjut :

Telah dilakukan monitoring pelaksanaan Program Sistem Manajemen Mutu SNI
ISO/IEC 17025:2017 pada Triwulan II Tahun 2025

Lampiran Perjanjian Kinerja 2025

Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	-	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	-	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	-	Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	-	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	-	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	70	70	0	0	0	0	0	0	70
Realisasi	100	100	0	0	0	0	0	0	0
%Capaian	142,85	142,85	0	0	0	0	0	0	0

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BPPMHPK mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan.
- BPPMHPK Makassar saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPiB) Di Kapal Perikanan;
 - Sertifikat Cara Pembinaan Ikan Yang Baik (CPiB);
 - Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBiB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPiB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOiB);
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOiB);

- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah sertifikat yang diberikan kepada kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, dan obat ikan.
- Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB) adalah pedoman dan tata mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan pengelolaan lingkungan.
- Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyisipan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Cara Distribusi Ikan Yang Baik yang selanjutnya disebut CDDIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh proses distribusi Obat Ikan sehingga pengguna mendapatkan jaminan konsistensi mutu, keamanan, dan khasiat Obat Ikan.
- Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik yang selanjutnya disingkat CPOIB adalah pedoman untuk mengatur seluruh produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku, produk antara, dan/atau produk rumahan dan pengawasan mutu guna menghasilkan yang aman bermutu dan berkhasiat.
- Capaian indikator kinerja utama (IKU) ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{Xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDDIB

yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPVB Kapal

Xn = Jumlah dari Unsur Pembentuk

$$A/B/C/D/E/F = \frac{\text{Jumlah sertifikat yang terbit}}{\text{Jumlah permohonan}} \times 100\%$$

Adapun jumlah permohonan dan jumlah sertifikat yang terbit dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Permohonan Yang Lolos Verifikasi Berkas	Jumlah Sertifikat yang Terbit	Persentase Unit Usaha yang Menerapkan Sertifikasi
1	Sertifikasi CPVB Kapal	8	8	100 %
2	Sertifikasi CBIB	2	2	100 %
3	Sertifikasi CPIB	0	0	0
4	Sertifikasi CPPIB	0	0	0

Dengan demikian realisasi Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan II adalah 100 %.

Jika dibandingkan dengan realisasi capaian Triwulan I Tahun 2025, maka realisasi pada triwulan II adalah sama yaitu 100%. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2024 karena merupakan IKU baru.

Pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat Permohonan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) namun telah dilakukan surveilan dalam rangka penilaian dan verifikasi konsistensi dan efektivitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit pembenihan yang telah tersertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sebanyak 4 unit. Adapun kegiatan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) untuk triwulan II tahun 2025 tidak dapat terealisasi karena sampai dengan akhir triwulan II belum ada permohonan masuk.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Pada tanggal 5 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi *Plan Of Action (PoA)* dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit DG Sante Uni Eropa secara hybrid di Aula Kantor Badan Mutu KKP Makassar yang diikuti oleh 88 orang peserta yang terdiri dari perwakilan BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Surabaya I, Pelabuhan Perikanan Utara; DPMPTSP, para koordinator penyuluh perikanan dari kabupaten/kota sentra perikanan, perusahaan eksportir dan pengolah hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Selatan, Jakarta dan Surabaya yang memiliki pemasok bahan baku dari Sulawesi Selatan.
- Pada tanggal 19 Mei 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Utara terkait percepatan sertifikasi CPIB Kapal Perikanan.
- Pada tanggal 27 Mei 2025 mengikuti pertemuan reguler I Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) tuna provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MPDI).
- Mengikut himpun desk yang diselenggarakan oleh Pusat Mutu Produksi Primer setiap hari Selasa pada bulan Juni 2025 yang membahas terkait progres percepatan sertifikasi primer dan kendala/kendala yang dihadapi.
- Pada tanggal 24 Juni 2025 telah dilaksanakan Sosialisasi Persamaan Persepsi pengisian checklist Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).
- Pada tanggal 25 Juni 2025 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dengan PT. Ocean Champ Seafood terkait percepatan sertifikasi CPIB Kapal.

SDM

- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan inspeksi CBIB pada TW II sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan inspeksi CPIB pada TW II sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan inspeksi CPIB Kapal pada TW II sebanyak 4 orang yang terdiri dari 3 Inspektur Mutu dan 1 Asisten Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar.

ANGGARAN

- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 95.000.000 kemudian direvisi menjadi Rp 18.820.000 yang digunakan untuk inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer Rp. 18.820.000.
- Untuk anggaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi produksi primer semula Rp. 18.820.000 menjadi Rp. 24.600.000 karena adanya revisi anggaran (relaksasi blokir).

PROGRAM NASIONAL

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan Ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu).
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

ASPEK PEMANFAATANNYA

- Pemanfaatan realisasi anggaran sampai dengan TW II Tahun 2025 sebesar Rp. 8.430.000,- atau sebesar 34,27 % dengan rincian sebagai berikut :

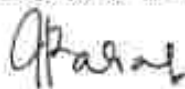
NO.	URAIAN	PAGU (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)
1.	Inspeksi penerapan sertifikasi produksi primer	24.600.000	8.430.000	16.170.000
Jumlah		24.600.000	-	16.170.000

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Adanya persyaratan pemenuhan ijin terkait dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan sertifikasi
- Sebagian besar awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Simbolis Tekniks Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPiB Kapal perikanan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Melakukan koordinasi dengan pihak BPSP Makassar dalam rangka percepatan penerbitan PKKPRL - Melakukan koordinasi dengan PP Untia dan Dinas Perikanan Kab. Sinjai terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Ditjen Teknis	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Hasil Tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Tindak lanjut rekomendasi 1 : Pada tanggal 5 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan perwakilan BPPMHKP Jakarta II, BPPMHKP Surabaya I, Pelabuhan Perikanan Untia, DPMPTSP (pendamping QSS) selaku narasumber, para koordinator penyuluh perikanan dari kabupaten/kota sentra perikanan, perusahaan eksportir dan pengolah hasil perikanan dari wilayah Sulawesi Selatan, Jakarta dan Surabaya yang memiliki pemasok bahan baku dari Sulawesi Selatan - Tindak lanjut rekomendasi 2 : pada tanggal 19 Mei 2025 telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Pelabuhan Perikanan Untia terkait Percepatan Sertifikasi CPiB Kapal di Aula Kantor BPPMHKP Makassar - Tindak lanjut rekomendasi 3 : Setelah mendapatkan informasi dari PU Pusat bahwasanya untuk sertifikasi kapal perikanan dibawah 3 GT sudah dapat dilaksanakan proses sertifikasi.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 7 Juli 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc

DAFTAR RUANG LINGKUP SERTIFIKASI CBIB
(RIKUAL... II TAHUN 2025)

No.	Nama U.R	Materi Pokok	Grafik	No. Sertifikat
1	T.S KAN SUKSES BERSADA	oda (g) untuk (Ctaperisels kandungan)	B	D-UBB-73-P-250104 Tanggal 30 Juni 2025
2	CV ANEKA CRUSTACEA CEMERLANG	oda (g) untuk (Ctaperisels kandungan)	B	D-UBB-73-P-250105 Tanggal 30 Juni 2025

DAFTAR SERTIFIKASI CPIB KAPAL TRIWULAN II TAHUN 2025

NO	NAMA KAPAL	ALAMAT	SIKORAS KAPAL	LOKASI KAPAL	TRIMESTER BERLAKU	KELOMPOK KAPAL	LOKASI KAPAL	LOKASI KAPAL	LOKASI KAPAL	LOKASI KAPAL
1	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
2	MS. Nelayan	Jl. Gajah Mada RT002/0001, Desa Gajah Mada, Kecamatan Gajah Mada, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
3	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
4	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
5	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
6	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
7	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
8	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
9	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan
10	MS. Nelayan	Pada-Batang-Luar, RT002/0001, Desa Pada-Batang, Kecamatan Pada-Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah	22-02	Pelungup	18 Mei 2025	Tanah	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan	PT. Nelayan

**DOKUMENTASI KEGIATAN
SURVEILAN CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK
DI MUTIARA BENUR JALANGNGE
30 JUNI 2025**



DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
DI PT. SINAR SUKSES PERSADA KABUPATEN JENEPONTO
17 JUNI 2025



**DOKUMENTASI KEGIATAN
INSPEKSI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK DI ATAS KAPAL
24 MEI 2025 – 21 JUNI 2025**



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PLAN OF ACTION (POA) DAN TINDAK LANJUT
REKOMENDASI AUDIT DG SANTE UNI EROPA
05 JUNI 2025



**KOORDINASI DENGAN PELABUHAN PERIKANAN UNTIA TERKAIT PERCEPATAN
SERTIFIKASI CPIB KAPAL
19 MEI 2025**



**HELP DESK OLEH PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER
BULAN JUNI 2025**



DOKUMENTASI KEGIATAN
PERTEMUAN REGULER I KOMITE PENGELOLA BERSAMA PERIKANAN (KPBP)
TUNA PROVINSI SULAWESI SELATAN
27 MEI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
PERSAMAAN PERSEPSI DALAM PENGISIAN CHECKLIST CBIB
BADAN MUTU KKP MAKASSAR
24 JUNI 2025



DOKUMENTASI KEGIATAN
RAPAT KORDINASI DENGAN PT. OCEAN CHAMP SEAFOOD TERKAIT
PERCEPATAN SERTIFIKASI CPIB KAPAL
25 JUNI 2025



**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM
MAKASSAR TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	:	Pengendalian kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan II

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70							70
Realisasi	115,08	83,81							
% Capaian	164,4	119,7							

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SIKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) melalui Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen Pada triwulan II 2025 melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)
2. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

Kegiatan Sertifikasi Pasca Panen merupakan salah satu IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua dan ke empat KKP yaitu

- Prioritas kedua KKP yaitu Penerapan sistem kuota dalam penangkapan ikan untuk menjaga kelestarian sumber daya dimana, setiap hasil tangkapan harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.
- Prioritas keempat KKP yaitu Pengembangan budidaya perikanan di laut, pesisir, dan darat yang memperhatikan aspek keberlanjutan dimana, setiap hasil budidaya harus dijamin mutu dan keamanannya melalui sertifikasi SKP dan HACCP sebelum dapat diekspor ke negara tujuan, sehingga keberterimaan produk perikanan Indonesia di pasar global dapat meningkat.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan melalui kegiatan inspeksi/sertifikasi SKP dan HACCP diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten-ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

CARA PENGUKURAN

- Perhitungan berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

Dimana :

%X =	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
A =	Persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
B =	Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSOP
xn =	Total dari unsur pembentuk (2)

Adapun target sertifikasi HACCP pada tahun 2025 sebanyak 272 sertifikat sedangkan target sertifikasi SKP pada tahun 2025 sebanyak 319 sertifikat. Pada rumus perhitungan di atas belum dijelaskan rumus perhitungan untuk memperoleh A dan B. Untuk memudahkan perhitungan maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$A = \frac{\text{Jumlah sertifikat HACCP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sertifikat SKP yang terbit (realisasi)}}{\text{Jumlah sertifikat yang expired (target)}} \times 100\%$$

Jumlah rekomendasi yang masuk

Persyaratan dalam penerbitan SKP mengacu pada Permen KP No. 17 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan SKP, sedangkan persyaratan dalam penerbitan sertifikasi HACCP mengacu pada Permen KP No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Pencapaian IKU ini dapat dilihat pada matriks berikut :

No	Kegiatan	TW I 2025		
		Target/Rekomendasi	Realisasi	Persentase
1	Sertifikasi HACCP (A)	69	62	89,85%
2	Sertifikasi SKP (B)	108	84	77,78%

Catatan :

1. Realisasi sertifikasi HACCP hanya mencapai 89,85%.
2. Realisasi sertifikasi SKP mencapai 77,78% karena terdapat beberapa rekomendasi dari bulan sebelumnya yang baru memenuhi persyaratan sehingga baru terbit sertifikatnya, dan masih terdapat 24 rekomendasi SKP dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan revisi.

$$\begin{aligned} \%X &= \frac{89,85 + 77,78}{2} \\ &= 83,81 \% \end{aligned}$$

Realisasi: persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan sebesar 83,81 %, dari target 70%. Dengan demikian capaian IKU ini adalah sebesar 119,73 %.

Adapun kegiatan pendukung pada IKU pasca panen adalah kegiatan sertifikasi Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perigelolaan Sistem Distribusi Ikan, sertifikat SPDI (Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan) diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan penyimpanan, pengadaan, sortasi dan grading serta yang melakukan kegiatan distribusi ikan dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai KBLI terkait, menerapkan cara distribusi ikan yang baik (CDIB) dan memenuhi persyaratan pembinaan dari Direktorat Teknis.

Sehubungan tindak lanjut dari Plan of Action (PoA) dan rekomendasi hasil audit DG SANTE – Uni Eropa (UE), Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu) – KKP perlu segera melakukan sertifikasi terhadap pemasok yang mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE. Sertifikasi tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia bahwa pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan di tahap hulu hingga hilir, sehingga permasalahan ekspor ke UE bisa terselesaikan. UPT Balai Mutu Makassar diberikan target sebanyak 18 (delapan belas) unit pemasok yang termasuk dalam pemasok ke UPI approval number Uni Eropa.

Namun demikian pelaksanaan SPDI mengalami kendala karena dasar hukum yaitu PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berbasis Risiko belum memuat ketentuan terkait pelaksanaan SPDI. Atas dasar tersebut telah terbit Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan No 31 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier, maka menjadi acuan dalam menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier pada Triwulan II Tahun 2025.

Pada Triwulan II Tahun 2025, inspeksi penerapan HACCP di Supplier dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) unit pemasok dan telah diterbitkan sertifikat Penerapan Hazard Analysis And Critical Control Point di Supplier sebanyak 18 (delapan belas) lembar sesuai ruang lingkup sertifikasi.

Penyerapan anggaran pada Triwulan II 2025 sebesar Rp. 3.343.000,-, atau sebesar 35,49%. Tidak adanya realisasi pelaksanaan inspeksi CPIB Supplier triwulan I 2025 dikarenakan belum adanya permohonan pengajuan inspeksi pada unit pemasok, sebagaimana realisasi pelaksanaan inspeksi penerapan HACCP di Supplier berdasarkan permohonan dari unit pemasok.

Output dari kegiatan ini berupa sertifikat SKP dan HACCP serta didukung oleh sertifikasi SPDI atau CPIB supplier. Dengan adanya sertifikasi SKP dan HACCP ini, Unit Pengolahan Ikan atau UMKM dapat melakukan kegiatan ekspor produk perikananannya dengan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terjamin serta memenuhi standar negara tujuan ekspor. Hal ini didukung dengan adanya sertifikasi SPDI atau CPIB supplier yang dapat menjamin mutu dan keamanan pasokan bahan baku yang masuk ke unit pengolahan dan UMKM.

Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu serta pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Anggaran awal kegiatan pasca panen pada tahun 2025 sebesar Rp. 210.000.000,- di blokir sebesar Rp. 169.228.000,- dan pagu revisi sebesar Rp. 40.772.000,- realisasi ditriwulan I sebesar Rp.34.001.000,- atau sebesar (83,39%). Jika dibandingkan dengan TW I tahun 2025 sebesar Rp.22.365.000,- atau sebesar (38,43%) mengalami sebesar 44,96%.

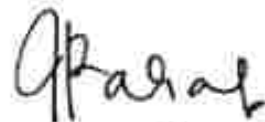
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Inspektur Mutu belum memahami secara detail Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko;

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Melaksanakan kegiatan Sharing Session peningkatan kompetensi Inspektur Mutu	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Untuk meminimalisir kelemahan inspeksi secara virtual maka Inspektur Mutu telah melakukan desk audit secara lebih mendetail untuk mendapatkan gambaran kondisi UPI yang akan diinspeksi dengan lebih lengkap; - Telah dilakukan koordinasi dengan PJ. Pembinaan CDIB dari Direktorat Teknis Penguatan Daya Saing Perikanan dan Kelautan melalui via Whatsap dan telepon (dokumentasi terlampir); - Telah dilakukan Koordinasi percepatan Kep. Ka. Badan No 31 Tahun 2025 pada tanggal 12 Juni 2025 (dokumentasi terlampir).	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 8 Juli 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) DI UPI





DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI KONSISTENSI PENERAPAN HACCP DI UPI







DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI CPIB DI SUPPLIER





1. Rapat Koordinasi tindak lanjut plant of action (PoA) dan Rekomendasi hasil audit Dg Sante, Tanggal 05 Mei 2025



2. Rapat percepatan Kep Ka badan No 31 Tahun 2025, Tanggal 12 Juni 2025



3. Koordinasi dengan PJ. Sertifikasi pembinaan CDIB Direktorat Teknis PSDPKP



**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
MAKASSAR TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan II

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target		1	1						1
Realisasi		1	1						
%Capaian		100	100						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pada tahun 2025 terdapat penambahan IKU baru yaitu Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi primer lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi), yang ditahun sebelum hanya berupa IKU pendukung.

Balai Besar KIPM Makassar adalah salah satu unit kerja yang mendapatkan target lokasi monitoring cemaran perairan dari Kepala Pusat Mutu Produksi Primer BPPMHKP pada tahun 2025 lokasi monitoring 1 lokasi yaitu perairan wilayah Takalar yang terdiri dari 1 titik monitoring yaitu TPI Beba.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui apakah komoditi perikanan yang diperoleh dari perairan terpapar racun hayati laut dan logam berat serta mendapatkan data dan informasi pengujian kandungan racun hayati laut dan logam berat pada ikan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten.

Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu pada setiap semester dengan sasaran titik pendaratan ikan yang ditangkap di perairan Takalar atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan

adanya data monitoring yang mutakhir sehingga menjadi bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di perairan Makassar.

Adapun rencana kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan monitoring cemaran perairan meliputi :

- Sarana dan Prasarana : Penerapan standar sanitasi dan higienis pada TPI/PPI merupakan indikator jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipasarkan sehat dan aman untuk konsumsi
- Pengambilan Contoh uji yang diambil kemudian dibawa ke Laboratorium Balai Besar KIPM Makassar untuk pengujian parameter logam berat (*Pb, Cd, Hg*) dan pengujian mikrobiologi untuk parameter *E.Coli, Salmonella* dan dikirim ke Laboratorium BUSKIPM untuk pengujian racun hayati laut parameter *ciguatoks* dikarenakan pengujian racun hayati belum masuk ruang lingkup di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Kegiatan monitoring cemaran perairan merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke - 2 Presiden RI yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya kerja ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan melalui kegiatan monitoring cemaran perairan di perlukan sumberdaya manusia (Inspektur mutu) yang berkompeten ASN harus terus belajar dan mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Kegiatan monitoring cemaran perairan, berdasarkan program Tahunan yang telah disusun pada tahun 2025 memiliki 1 target lokasinya yaitu TPI Beba Kab. Takalar.

Kegiatan monitoring cemaran perairan telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 dengan titik lokasi monitoring cemaran perairan di TPI Beba Kab. Takalar.

Adapun ikan sampel yang diambil adalah :

- Ikan demersal (Ikan Katamba, Ikan Baracuda, Ikan Kaneke) untuk pengujian parameter pengujian logam berat (*Pb, Cd, Hg*) dan *ciguatoks* dan pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *E. Coli*
- Untuk parameter pengujian logam berat yaitu (*Pb, Cd, Hg*) dan pengujian mikrobiologi dengan parameter *Salmonella* dan *E. Coli* dilakukan pengujian di Laboratorium penguji BPPMHKP Makassar, sedangkan untuk pengujian kimia untuk parameter *ciguatoks* dilakukan sub kontrak di laboratorium penguji BUSPM Jakarta.

- Hasil pengamatan sarana dan prasarana sesuai dengan ceklist yang tersedia pada lokasi monitoring, cemaran perairan tahun 2025 pada triwulan II tahun 2025 didapatkan nilai kesesuaian sebesar 62,5 % dan nilai ketidaksesuaian sebesar 37,5 %. Adapun ceklist sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM No. 96 tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemaran perairan

Tabel Hasil pengujian monitoring cemaran perairan di PPI Beba

No	Lokasi	Jenis ikan	Parameter Uji			E coli	TW II
			Logam berat (Hg, Cd, Pb)	Ciguat oxin	Salmonella		
1	PPI Beba	Ikan Barakuda	✓	✓	✓	✓	Bawah ambang batas
		Ikan Kanekel	✓	✓	✓	✓	Bawah ambang batas
		Ikan Katamba	✓	✓	✓	✓	Bawah ambang batas

Dengan terlaksananya tersebut di atas, maka realisasi kegiatan monitoring cemaran perairan triwulan II tahun 2025 telah tercapai 100%. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh sampel dinyatakan memenuhi standar atau berada di bawah ambang batas.

Adapun kondisi sarana dan prasarana pada lokasi target cukup memadai namun terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu mendapatkan perhatian dari instansi terkait:

- Lokasi memiliki tata ruang yang memadai, namun bangunan yang ada tidak mampu menampung seluruh penjual ikan, sehingga masih ada penjual ikan melaksanakan aktifitas di luar bangunan yang disediakan
- Lantai bangunan sudah memakai keramik, namun pembersihan lantai hanya dilakukan pada saat kegiatan selesai dilakukan. Selain itu konstruksi lantai belum dirancang dengan kemiringan yang memungkinkan air dapat mengalir ke saluran pembuangan yang disediakan
- Pertemuan antara lantai dan dinding tidak melengkung sehingga sulit dibersihkan
- Saluran pembuangan tidak memiliki kemiringan yang cukup sehingga air tidak mengalir dengan lancar
- Belum dilengkapi dengan keranjang yang dapat diangkat untuk menampung limbah padat (menggunakan kantong plastik)
- Saluran air hanya dibersihkan pada saat ada kegiatan lelang saja
- Belum tersedia program pembersihan untuk langit langit
- Jumlah, desain dan fasilitas toilet tidak memadai begitu juga dengan jumlah lokasi, desain dan fasilitas pencuci tangan juga tidak memadai.
- Toilet tidak dilengkapi dengan desinfektan (sabun)
- Belum semua penjual ikan menggunakan es dalam jumlah yang cukup untuk menjaga sistem rantai dingin sehingga masih ditemukan ikan yang suhunya rata

rata melampaui batas standar yang ditentukan yakni suhu maksimal antara 4-5 °C

- Timbangan yang digunakan tidak dilakukan kalibrasi secara periodik.
- Alat yang digunakan memindahkan ikan belum tersedia alat angkut khusus.
- Peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang kontak langsung dengan produk belum terjamin kebersihannya sehingga masih memungkinkan terjadinya kontaminasi. Masih ada penjual ikan yang belum menggunakan meja atau tempat khusus pada saat menjual ikan, sehingga memungkinkan terjadinya kontaminasi pada produk yang diperjualbelikan.

SDM yang terlibat dalam kegiatan monitoring cemaran perairan tahun 2025 adalah 4 orang Inspektur Mutu

Anggaran awal kegiatan monitoring cemaran perairan pada tahun 2025 sebesar Rp. 10.000.000,- setelah buka blokir anggaran bernilai Rp. 8.240.000,-

Realisasi anggaran triwulan II sebesar Rp.3.010.000,- atau sebesar 36,53% yang digunakan untuk pembelian sampel, computer supplies, biaya pengujian dan biaya perjalanan dinas biasa.

Sebagai perbandingan anggaran triwulan I sebesar Rp.380.000,- atau sebesar (8,15%) yang digunakan untuk pembelian sampel pada kegiatan pengawasan mutu domestik sedangkan pada triwulan II tahun 2025 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.010.000,- atau sebesar 36,53%, sehingga terjadi kenaikan realisasi dari triwulan I ke triwulan II sebesar Rp.2.630.000,- atau sebesar 692 %

Anggaran Kegiatan monitoring cemaran perairan triwulan II tahun 2024 pagu sebesar Rp. 86.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.516.000,- atau sebesar 11,07 %

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah dapat terjadi jika Inspektur mutu kurang akurat dalam proses pengambilan sampel monitoring cemaran perairan sehingga memungkinkan hasil monitoring tidak menggambarkan kondisi cemaran perairan

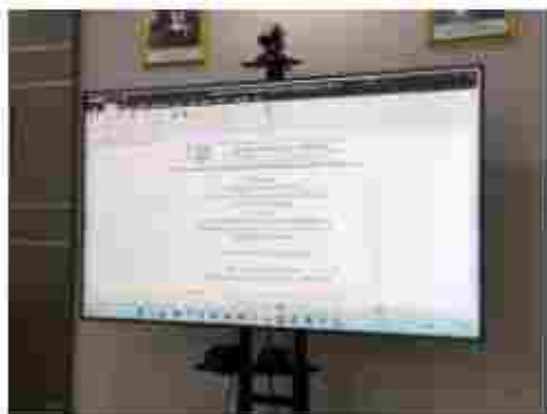
Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan refreshment cara pengambilan dan penanganan sampel	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah melakukan Refreshment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu melalui bincang inspiratif terkait Keputusan Kepala BKIPM No. 96	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu , dan Keamanan Hasil Perikanan

tahun 2020 tentang Petunjuk teknis monitoring cemarairan perairan	
--	--

Makassar, 7 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Moh. Zamrud, S.Pi, M.Si

DOKUMENTASI KEGIATAN
Refresment/Sharing session peningkatan kompetensi inspektur mutu
melalui bincang inspiratif



**DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN MONITORING CEMARAN PERAIRAN
DI PPI BEBA, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR,
PROPINSI SULAWESI SELATAN**





DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUJIAN LABORATORIUM





KEMENTERIAN KESEHATAN DAN PERUBAHAN
BADAN KANANTINGA KAKI, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKAMAN
SALAH SUDAN KANANTINGA KAKI, PENGENDALIAN
MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKAMAN
JALAN RAKA SUDAN KAKI, SUDAN KAKI, JAKARTA TIMUR 10000
Telp: (021) 847 3371 / 847 3387, Fax: (021) 847 3322
LAMAN: www.kemkes.go.id
KEBUTUHAN: www.kemkes.go.id

HASIL UJI
TEST RESULT

Number/No: 007/00000000000000000000

Memastikan /
This is certify that

1. Nama Pelanggan / Customer : 00000000000000000000
2. Alamat / Address : J. Duta No. 24 Sukang Raya - Makassar
Telp: 081214444444 Email: info@makassarlab.com
3. Tanggal Penyerahan / Receipt Date : 15 Mei 2020
4. Kode Cetak Uji / Test Sample Code : 0057
5. Tanggal Pengujian / Date of analysis : 15 Mei 2020

No	Kode Pemeriksaan / Test Item	Nama Pasien / Test Sample Name	Salah Cetak / Test Sample Code	Pemeriksaan / Examination	Hasil / Result / Result Code	Pemeriksaan / Test / Examination	Hasil / Result / Result Code	Salah Cetak / Test Sample Code
1	Lab. Kimia	00000000000000000000	00000000000000000000	Examination Test Sample Examination	Result Code Examination	Examination Test Sample Examination	Result Code Examination	00000000000000000000
2	Lab. Kimia	00000000000000000000	00000000000000000000	Examination Test Sample Examination	Result Code Examination	Examination Test Sample Examination	Result Code Examination	00000000000000000000
3	Lab. Kimia	00000000000000000000	00000000000000000000	Examination Test Sample Examination	Result Code Examination	Examination Test Sample Examination	Result Code Examination	00000000000000000000

- NOTE: 1. Hasil uji ini merupakan prosedur yang dilaksanakan di laboratorium ini dan tidak berlaku untuk prosedur lain yang berbeda.
This result of the test is only for the procedure performed in this laboratory and is not valid for other procedures.
2. Laporan hasil uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar dan 1 (satu) lembar.
This report of the test result consists of 1 (one) page and 1 (one) page.
3. Laporan hasil uji ini tidak boleh dipertukarkan, karena laporan akan menjadi tidak sah jika dipertukarkan.
This report of the test result is not to be exchanged, as the report will become invalid if exchanged.

(Makassar, 22 Mei 2020)
Penanggungjawab Laboratorium



Makassar, 22 Mei 2020
Penanggungjawab Laboratorium

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator (4)	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)
Nama Tim/ja	:	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	:	Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama indikator Kinerja	:	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Lokasi)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	1	0	1	1	0	1	1	100	1
Realisasi	1	0	1						
%Capaian	100	0	100						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat, penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik merupakan salah IKU yang mendukung Asta Cita ke-2 Presiden RI yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas KKP yaitu :

- Program Prioritas Kedua KKP yaitu penerapan sistem kuota dalam penangkapan dan memastikan keberlanjutan sumber daya ikan, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan tangkap yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan,
- Program Prioritas Ketiga KKP yaitu pengembangan budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik untuk komoditas ekspor maupun konsumsi lokal, dimana pada kegiatan pengawasan mutu BPPMHKP Makassar memastikan produk hasil perikanan

hasil budidaya yang didistribusikan kemasyarakat melalui tempat pelelangan ikan (TPI/PPI), pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.

BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain dan instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir. Dalam hal ini BPPMHKP memiliki peran penting antara lain:

1. Pengawasan Mutu: BPPMHKP melakukan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.
2. Pengendalian Mutu: BPPMHKP melakukan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kualitas dan keamanan pangan.

Dengan demikian BPPMHKP juga dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan di pasar domestik dan internasional.

Indikator kinerja ini mendorong peningkatan budaya ASN Ber-AKHLAK terutama pada nilai kompeten, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu perikanan, diperlukan sumberdaya manusia (Inspektur Mutu) yang berkompeten. ASN harus terus belajar mengembangkan kemampuannya untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah.

Pada tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 1 lokasi yaitu kota Makassar dengan jumlah 1 lokus. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional.

Pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik. Balai Besar KIPM Makassar hanya melaporkan hasil pengawasan perikanan domestik yang dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025 dan telah diverifikasi oleh tim BPPMHKP Oleh Pusat Mutu Pasca Panen. Kegiatan selanjutnya dilakukan pada triwulan III 2025.

Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik tahun 2025 sebesar Rp. 31.500.000,- Anggaran indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan pemerintah untuk efisiensi anggaran. Namun kebijakan pemerintah tersebut tidak menjadi penghalang pada kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.188.660.000,- yang terealisasi pada TW II tahun 2024 sebesar Rp. 57.858.086,- atau 4,9%.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah yang terjadi pada triwulan II tahun 2025 adalah pemahaman inspektur mutu terhadap detail kegiatan pengawasan mutu domestik yang dirangkaikan dengan pengawasan produk perikanan pada hari raya besar keagamaan perlu ditingkatkan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan sharing session peningkatan kompetensi Inspektur mutu	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan instansi terkait mengenai pengawasan mutu domestik pada triwulan II tahun 2025	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Makassar, 7 Juli 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja


 Mohammad Zamrud

PERHITUNGAN UNTUK PERSENTASE (%) JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN di WILAYAH KOTA MAKASSAR SEMESTER I TAHUN 2025

A. Penilaian sarana dan prasarana

Perhitungan bobot penilaian sarana prasarana dengan rumus:

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan:

Kriteria	Nilai	Kriteria ditemukan
Sangat Baik	100	-
Baik	75	1
Cukup	50	-
Kurang	30	-
Total		1

Maka perhitungan yang dilakukan adalah penjumlahan dari kriteria baik sekali, kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria kurang

$$\frac{0 \times 100}{1} + \frac{1 \times 75}{1} + \frac{0 \times 50}{1} + \frac{0 \times 30}{1} = 75$$

B. Penilaian pengujian produk

Penilaian bobot pengujian produk dilakukan berdasarkan nilai/skor parameter hasil uji yang terdiri dari 5 parameter yakni organoleptik, bakteri ALT, E. coli, Salmonella dan Formalin. Kriteria dari 5 parameter tersebut sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata} = 1/n \sum_{i=1}^n (X_i - 1) \times n \times \bar{Y}_i (i) \cdot f$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey ditemukan nilai organoleptik dari produk. Maka rata-rata didapatkan dengan:

$$(8 + 8 + 8 + 8 + 8) / 5 = 8 \times 10 = 80$$

Perhitungan kriteria ALT, E.coli, Formalin, Salmonella rumus:

$$\text{Total nilai kriteria} = (\text{kriteria ditemukan} \times \text{nilai}) / (\text{total kriteria ditemukan})$$

Setelah dilakukan survey ditemukan:

Kriteria Nilai	Kriteria ditemukan	Kriteria Nilai	Kriteria ditemukan	Kriteria Salmonella	Kriteria ditemukan	Kriteria Formalin	Kriteria ditemukan	Rata-Rata
<1 x 10 ³	0	<3	0	Tidak	0	Tidak	0	0
>1 x 10 ³	5	>3	5	Tidak	0	Tidak	0	100

Perhitungan ALT dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria $>5 \times 10^3$ dan $<5 \times 10^3$

$$\frac{0 \times 10}{5} + \frac{5 \times 100}{5} = 100$$

Perhitungan bakteri *E.coli* dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria >3 dan <3

$$\frac{0 \times 10}{5} + \frac{5 \times 100}{5} = 100$$

Perhitungan bakteri *Salmonella* dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{5} + \frac{5 \times 100}{5} = 100$$

Perhitungan Formalin dilakukan dengan penjumlahan dari kriteria positif dan negatif

$$\frac{0 \times 10}{5} + \frac{5 \times 100}{5} = 100$$

Penilaian rata-rata dari pengujian produk didapatkan dengan rumus rata-rata

$$\text{rata-rata} = 1/n \sum_{i=1}^n (i-1) \cdot n \cdot Y_i$$

"jumlah data dibagi banyak data"

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai organoleptik dari produk = 80
2. Nilai kriteria bakteri ALT = 100
3. Nilai kriteria bakteri *E. coli* = 100
4. Nilai kriteria bakteri *Salmonella* = 100
5. Nilai kriteria Formalin = 100

Maka rata-rata nilai pengujian produk didapatkan dengan

$$\frac{80 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} = 96$$

C. Penilaian jaminan mutu

$$\text{jaminan mutu} = (60\% \times \text{nilai sarana prasarana}) + (40\% \times \text{nilai pengujian produk})$$

Setelah dilakukan survey didapatkan

1. Nilai sarana prasarana = 75
2. Nilai pengujian produk = 96

$$(60\% \times 75) + (40\% \times 96) = 83,4\%$$

Secara sederhana dapat dinyatakan jaminan mutu kepatuhan produk perikanan di Kota Makassar pada semester I tahun 2025 adalah **83,4%** dalam kriteria yang memenuhi persyaratan, sedangkan **16,6%** dalam kriteria yang belum memenuhi persyaratan.

Diperiksa oleh : Agnita Awanita, S.Tr. Pj

Tanggal : 2 Juni 2025

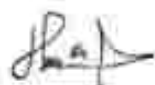
Tanda Tangan:



Diteliti oleh : Hendri, S.Pj, M.Si

Tanggal : 3 Juni 2025

Tanda Tangan:



FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIMULAN II TAHUN 2025

Nama Indikator	Ratio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Tim/ja	Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan	Trimulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	Ratio Ekspor Ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99						99
Realisasi	100	99,96	99,98						
% Capaian	101	100	100						

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.II = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
Sistem Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tumbuh seiring dengan perkembangan tuntutan akan jaminan mutu dan keamanan pangan di tataran internasional yang semakin ketat, dan tidak hanya fokus pada mutu dan keamanan dari produk akhir. Sistem jaminan mutu dan keamanan terhadap proses merupakan tuntutan dan penerimaan masyarakat dunia (internasional) akan keberterimaan pangan, termasuk hasil perikanan. Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh internasional, harus dipenuhi oleh seluruh negara peng ekspor, yang dinyatakan pada sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan yang menyertai setiap produk yang dipasarkan, baik untuk pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor. Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) merupakan bukti bahwa hasil perikanan yang dipasarkan telah diproses berdasarkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterbitkan apabila suatu produk/hasil perikanan telah memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku sehingga aman untuk dikonsumsi manusia. Dengan berkembangnya sistem manajemen mutu, maka penerbitan SMKHP didasarkan pada hasil pengawasan mutu terhadap efektivitas penerapan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada Unit Usaha Pembenihan, Pembesaran dan Unit Pengolahan ikan serta hasil pengujian contoh. Peningkatan ekspor perikanan ke negara tujuan merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 5 yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan sumberdaya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pada Asta Cita ke 5 terdapat tiga kegiatan utama yaitu peningkatan ekspor produk perikanan tangkap, pembangunan industri hilir dan industri penangkapan ikan serta penjaminan mutu dan keamanan pangan akuatik komoditas perikanan budidaya. Dukungan BPPMHKP terhadap Asta Cita ini sejalan dengan program prioritas kedua KKP yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dimana BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang diekspor ke negara tujuan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian

mutu di laboratorium dan penyediaan sertifikat mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua IKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu hulu hilir.

Balai Besar KIPM Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ke negara tujuan.

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar wilayah Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya SMKHP di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Perhitungan IKU ini berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2025 yaitu :

$$X = \frac{A - B}{A}$$

X : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A : SMKHP yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B : Jumlah SMKHP yang ditolak oleh negara tujuan

IKU ini menggunakan formula diatas sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah SMKHP ekspor yang memenuhi syarat mutu} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah SMKHP mutu ekspor yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$\frac{(3.125 - 1)}{3.125} \times 100\% = 99,96\%$$

Berdasarkan formula diatas, realisasi IKU ini di triwulan II tahun 2025 adalah 99 %; Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan didapatkan penurunan persentase antara Triwulan I tahun 2025 dan triwulan II tahun 2024 sebanyak 1%; Data pada triwulan II Tahun 2025 menunjukkan terdapat 1 (satu) kali notifikasi penolakan produk perikanan yang dikirim ke negara tujuan yaitu Rusia pada produk gurita beku. Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP telah mengeluarkan surat bernomor R.468/BPPMHKP.2/KI.530/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 tentang Pemberlakuan Internal Suspend CV. Prima Indo Tuna (RB-B-049-27). Unit Pengolahan Ikan tersebut juga telah diinvestigasi oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP bersama Inspektur Mutu BPPMHKP Makassar pada tanggal 7 Mei 2025.

Pada triwulan II tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 65.482,64 ton senilai Rp. 4,004 T dengan jumlah sertifikat ekspor (SMKHP) yang diterbitkan sebanyak 3.125 sertifikat. Sebagai perbandingan, pada triwulan I tahun 2025 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 47.586,71 ton (koreksi data LCK Triwulan I tahun 2025 sebesar 45,04 ton) senilai Rp. 1,5 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.840 sertifikat (koreksi data LCK triwulan I tahun 2025 sebesar 2.798 sertifikat).

Volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 24.435 ton senilai Rp. 1,4 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.156 sertifikat. Jika dibandingkan triwulan II tahun 2025 dan triwulan II tahun 2024 terdapat peningkatan jumlah sertifikat ekspor sebesar 44,94 % di triwulan II tahun 2025. Hal ini juga terlihat dari peningkatan volume ekspor di triwulan II tahun 2025 jika dibandingkan triwulan II tahun 2024 sebesar 167%.

Kegiatan sertifikasi ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional Inspektur mutu sebanyak 18 orang serta didukung oleh tenaga PPNPTI sebanyak 12 orang dan PILP sebanyak 12 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengawasan, dan pelayanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

Selain dengan peningkatan pelayanan sertifikasi ekspor produk perikanan, terdapat beberapa kegiatan peningkatan kompetensi untuk mendukung IKU ini telah diikuti oleh petugas pelayanan maupun Inspektur mutu antara lain sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Penyelenggara	Waktu Kegiatan
1.	Briefing 51ang Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	10 April 2025
2.	Bincang Inspiratif Penguatan Program Kerja Badan Mutu KKP Dalam Menunjang Program Prioritas KKP	BPPMHKP Makassar	9 Mei 2025
3.	Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Mutu Lingkup Badan Mutu KKP	Sekretariat BPPMHKP	14 – 16 Mei 2025
4.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	15 Mei 2025
5.	Briefing Pagi Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu	BPPMHKP Makassar	24 Juni 2025

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

1. Monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra.
2. Monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP
3. Investigasi kasus penolakan ekspor di negara tujuan.

I. Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra

Pada triwulan II tahun 2025 belum dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan di triwulan III dan triwulan IV tahun 2025. Sasaran dari kegiatan ini adalah UPI yang sedang bermohon penerbitan nomor registrasi untuk negara tujuan China serta UPI yang belum memanfaatkan secara maksimal nomor registrasi ke negara tujuan.

II. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP

Pada triwulan II tahun 2025 BPPMHKP Makassar telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada 8 (delapan) UPI yang melaksanakan ekspor ke negara tujuan. Selengkapnya dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan	Inspektur Mutu
1.	PT. Mufit Monodon Indonesia	23 April 2025	Mohammad Zamrud Suprianto
2.	PT. Mitra Kartika Sejati	28 April 2025	Wade Suharni Warsa Zakaria Sapan
3.	CV. Bintang Megah Jaya Perkasa	2 Mei 2025	Kamaruddin Taufiq
4.	PT. Rika Rayhan Mandiri	6 Mei 2025	Andi Rahmanlan Muzakkr
5.	PT. Biro Laut Nusantara	8 Mei 2025	Putriawati Arfandi
6.	PT. Dunia Marine Products	2 Juni 2025	Wade Suharni Fatima Tayang
7.	PT. Keumikang Industri Indonesia	3 Juni 2025	Anugrah Ekayani Taufiq
8.	PT. Bumi Laut Pertiwi	5 Juni 2025	Kamaruddin Arfandi

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP pada UPI dilakukan berdasarkan profiling Unit Pengolahan Ikan dalam kegiatan pelayanan sertifikasi ekspor ke negara tujuan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan money adalah memastikan bahwa kegiatan penilaian kesesuaian penerbitan SMKHP pada pelaku usaha berjalan sesuai ketentuan regulasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai serta memudahkan BPPMHKP Makassar dalam melakukan penilaian ke pelaku usaha kelautan dan perikanan khususnya pelaku usaha ekspor. Hasil dari kegiatan money ini menjadi dasar dalam pemberian skoring tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penerbitan SMKHP. Kegiatan monitoring dan evaluasi kesesuaian penerbitan SMKHP dilaksanakan tanpa menggunakan APBN karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dan belum adanya buku blokir sehingga dilaksanakan secara mandiri oleh Inspektur Mutu.

III. Investigasi Kasus Penolakan Ekspor Di Negara Tujuan

Pada triwulan II tahun 2025 terdapat notifikasi penolakan ekspor dari negara tujuan di UPT BPPMHKP Makassar sebanyak 1 (satu) kali dari negara tujuan Rusia. BPPMHKP Makassar menerima surat dari Kepala Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP sebagai berikut :

- Nomor R.468/BPPMHKP.2/KI.530/VI/2025 tanggal 1 Mei 2025 tentang Pemberlakuan Internal Suspend CV. Prima Indo Tuna (R.R.B-049-27).
- Nomor T.379/BPPMHKP.2/KI.530/VI/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampahan Informasi DWPE 16 – 81 PT. Phillips Seafoods Indonesia
- Nomor T.380/BPPMHKP.2/KI.530/VI/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyampahan Informasi DWPE 16 – 81 PT. Wahyu Pradana Binamulla

Sebagai catatan, untuk PT. Wahyu Pradana Binamulla tidak terdapat notifikasi penolakan ekspor karena Amerika Serikat bukan negara mitra yang diayungi oleh MRA (Mutual Recognition Arrangement) dengan Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan di triwulan II tahun 2025 adalah melakukan pendampingan pada kegiatan investigasi penolakan ekspor di negara tujuan yang dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP. Kegiatan pendampingan investigasi tersebut untuk mencari akan masalah terjadinya kasus produk perikanan pada tahun sebelumnya. Adapun data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No	Nama UPI	Waktu Kegiatan Investigasi	Produk	Penyebab	Inspektur Mutu
1.	CV. Prima Indo Tuna	7 Mei 2025	Frozen Cephalopod	Arsenik yang melebihi ambang batas	Wara Zakaria Anugra Ekayanti
2.	PT. Wahyu Pradana Binamulla	8 Mei 2025	Frozen Tuna	Salmonella	Mohammad Zamrud Muzakki
3.	PT. Phillips Seafoods Indonesia	8 Mei 2025	Frozen Tuna	Salmonella	Suprianto Fatima Tayang

Berdasarkan tabel diatas, telah dilaksanakan kegiatan pendampingan investigasi pada 3 (tiga) UPI di Sulawesi Selatan oleh Inspektur mutu BPPMHKP Makassar. Untuk PT. Wahyu Pradana Binamulla dan PT. Phillips Seafoods Indonesia dikenakan status *Detention Without Physical Examination (DWPE)* oleh US FDA yang merupakan ketidaksesuaian yang telah masuk pada *Red List of Import Alert 16 – 81 Detention Without Physical Examination of Seafood Products Due to Presence of Salmonella*. Temuan ketidaksesuaian tersebut menginformasikan terdapat pengujian sarpipel tuna Ready To Eat (RTE) beku dari beberapa negara Asia Tenggara yang dikumpulkan sejak Mei 2024. Pada pengujian tersebut ditemukan 7 dari 140 sampel dari Indonesia mengandung *Salmonella*. Salah satunya adalah sampel tuna dari produk PT. Wahyu Pradana Binamulla dan PT. Phillips Seafoods Indonesia. Untuk PT. Wahyu Pradana Binamulla dan PT. Phillips Seafoods Indonesia tidak menerima notifikasi penolakan dari negara tujuan.

Adapun untuk CV. Prima Indo Tuna terdapat notifikasi otoritas kompeten Rusia (Roselkhoznadzor) nomor FS-AMV-7/6530-1 didasarkan dari hasil pemeriksaan pengawasan resmi pasar (*official control on the market*) dimana ditemukan produk gurita beku (*frozen octopus*) yang diekspor pada tahun 2024 dengan

nomor Health Certificate 02.0-03094-2024 mengandung kandungan logam berat (arsenik) melebihi ambang batas yang diperbolehkan yaitu 9,05 mg/kg (ambang batas Rusia < 5 mg/kg).

Berdasarkan hasil Investigasi terhadap ketiga UPI tersebut maka diperoleh akar masalah dan rekomendasi sebagai berikut :

No	Nama UPI	Akar Masalah	Rekomendasi
1.	CV. Prima Indo Tunia	Pengendalian terhadap potensi kontaminasi logam berat (arsen) belum optimal dijalankan	1. Pemutakhiran data pengujian logam berat sesuai dengan lokasi asal bahan baku 2. Perlu adanya monitoring logam berat.
2.	PT. Wahyu Perdana Binamulia	1. Pelaksanaan prosedur sanitasi belum konsisten dijalankan 2. Pengendalian proses perlu ditingkatkan	1. Program swab peralatan untuk dibuat lebih detail sehingga seluruh peralatan dapat terwakil 2. Intensitas pelatihan personil terkait sanitasi dan higiena perlu ditingkatkan 3. Pengendalian terhadap fasilitas yang mensupport proses produksi pada UPI perlu ditingkatkan dan dilakukan perbaikan jika terjadi masalah 4. Penyempurnaan sop pada pengendalian proses
3.	PT. Phillips Seafoods Indonesia		1. Pemutakhiran pada GMP tahapan penerimaan 2. UPI menyampaikan data terupdate antara lain : - Program pengendalian air dan es - SOP <i>environmental monitoring procedure</i> - Program pengujian swab peralatan

Kegiatan yang mendukung IKU ini beserta pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Lock Pagu	Realisasi Anggaran TW II 2025	Persentase Realisasi
1	7010.ABR.001 Harmonisasi Persyaratan/Tetapan Negara Mitra dan Negara Tujuan Ekspor	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0
2	3989.QIC.002 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 25.000.000,-	0	0
3	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor-impor-nya	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	0	0

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini pada tahun 2025 sebesar Rp. 45.000.000. Adapun anggaran untuk indikator kinerja ini masih belum terealisasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 terdapat alokasi anggaran untuk mendukung IKU ini sebesar Rp. 60.000.000 dimana terjadi penurunan pagu anggaran sebesar 25% dan realisasi pada triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 15.793.000.

Pada triwulan II tahun 2025 belum ada anggaran yang terealisasi disebabkan belum adanya kebijakan buka blokir. Diharapkan dengan adanya kebijakan buka blokir kegiatan yang mendukung IKU ini dapat terealisasi di triwulan selanjutnya.

Pada triwulan II tahun 2024 terdapat kegiatan pendukung yaitu monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi negara mitra dengan sisa alokasi anggaran sebesar Rp. 2.859.000. Selain itu, terdapat realisasi anggaran kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor sebesar Rp. 1.575.000.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Masih ditemukan anomali data dalam sertifikasi mutu.
- Terdapat kegiatan pendukung IKU berupa monitoring dan evaluasi nomor registrasi negara mitra yang perlu diakselerasi pelaksanaannya.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Melakukan evaluasi tentang anomali data kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu. - Akan melaksanakan sharing session/brainstorming tentang monev nomor registrasi negara mitra beserta detail pelaksanaannya.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
1) Telah dilakukan sosialisasi kepada inspektur mutu dan stakeholder/pelaku usaha pada triwulan II tahun 2025 yaitu sebagai berikut : a. Briefing singkat petugas pelayanan dan inspektur mutu yang dilaksanakan secara luring pada tanggal 10 April 2025. b. Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Penerapan Aplikasi SIAP MUTU yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh pelaku usaha dan inspektur mutu pada tanggal 15 April 2025. c. Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Kesiapan Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Unit Pengolahan Ikan yang dilaksanakan secara luring dan dihadiri oleh inspektur mutu pada tanggal 16 April 2025.	Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan

Makassar, 7 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

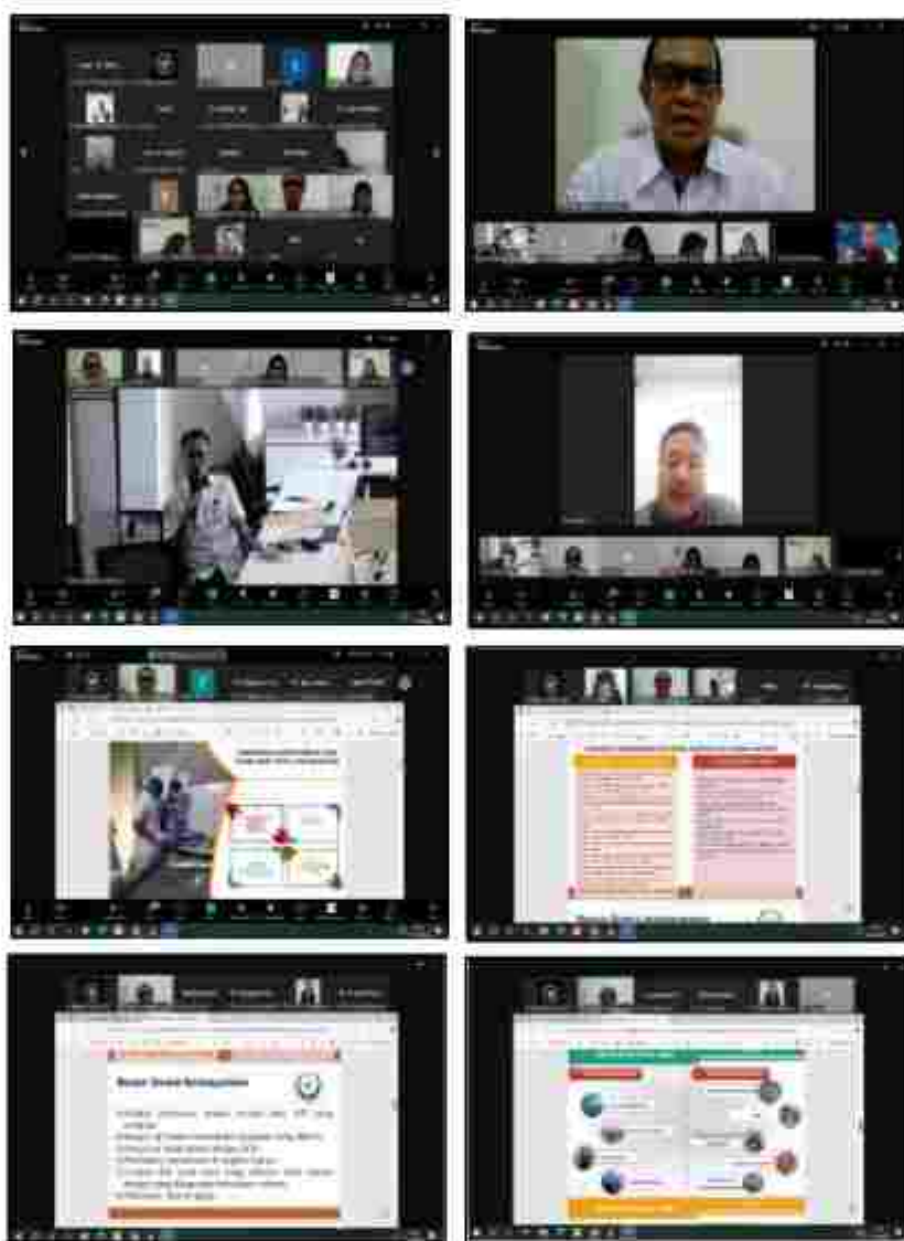

Mohammad Zamrud

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Briefing Staff Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu Pada Tanggal 10 April 2025



2. Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Penerapan Aplikasi SYAF MUTU Pada Tanggal 15 April 2025



3. Rapat Persiapan Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Tanggal 15 April 2025



4. Monitoring dan Evaluasi Kesesuaian Penerbitan SMKHP di Unit Pengolahan Ikan



5. Investigasi Penolskan Ekspor di Negara Tujuan



FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator :	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Timja :	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Iklan, Mutu dan Keamanan Hasil Periklanan
Periode Laporan :	:	Triwulan II Tahun 2025
Nama Sasaran Kegiatan :	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja :	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target:	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi:	91,23	91,23							
%Capaian	121,64	121,64							

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai meliputi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$K = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

- K = Rata-rata
- $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n
- n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

- Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian adalah kegiatan pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar. Selama Triwulan II Tahun 2025, terdapat 2.326 kali pengujian laboratorium yang terdiri dari :
 - Pengujian Organoleptik sebanyak 750 kali
 - Pengujian Mikrobiologi sebanyak 556 kali
 - Pengujian Kimia sebanyak 474 kali
 - Pengujian Air dan Es sebanyak 146 kali
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 18 orang mulai dari Manager Puncak hingga analis dan staf laboratorium yang kompeten dalam melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium.
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat dan aman dikonsumsi berupa komoditi perikanan dan Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.
- KU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan dengan memberikan pelayanan laboratorium pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan.
- Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DIPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan II tahun 2025 mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 36.537.000,- di Triwulan I Tahun 2025 menjadi Rp. 61.446.000,- di Triwulan II Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 menurun sebesar 10,8% dari sebelumnya sebesar Rp. 70.000.000,- di tahun 2024.
- Pada Triwulan II Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 13.350.000,- atau sebesar 21,58 % dari anggaran tahun 2025. Sisa anggaran sebesar Rp. 49.096.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan III, dan IV sesuai dengan jadwal penerapan sistem manajemen mutu laboratorium untuk kegiatan kalibrasi alat, uji profisiensi, dan uji banding.
- Kegiatan Verifikasi Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian ini dilaksanakan hanya satu kali dalam satu tahun. Untuk itu hasil penilaian verifikasi pada Triwulan II Tahun 2025 ini masih mengikut hasil verifikasi pada Triwulan I. Pada Triwulan I Tahun 2025, telah dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium pada tanggal 20 Maret 2025 oleh Pusat Manajemen Mutu. Dari kegiatan verifikasi tersebut, berdasarkan Kuesioner Verifikasi Penerapan SMM SNI ISO/IEC 17025:2017 maka Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai sebesar 91,23 dari target sebesar 75. Sehingga output kegiatan penerapan sistem manajemen mutu telah terealisasi sebesar 121,64 %.
- Pada Triwulan II Tahun 2025 ini telah dilakukan Surveilans Penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Badan Akreditasi Nasional pada Tanggal 20 Mei 2025. Hasilnya disebutkan bahwa Balai Besar KIPM Makassar masih konsisten dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium. Namun perlu melakukan tindakan perbaikan terhadap 14 temuan ketidaksesuaian Surveilans SMM SNI ISO/IEC 17025:2017.

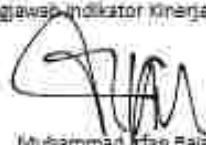
Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Tindakan perbaikan surveilans SNI ISO/IEC 17025:2017 masih berlangsung hingga 20 Juli 2025. Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu laboratorium adalah tindakan perbaikan yang perlu di pantau penyelesaiannya di Triwulan III Tahun 2025.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung jawab
Penyelesaian tindakan perbaikan Surveilans II SNI ISO/IEC 17025:2017 di Triwulan III Tahun 2025	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode uji

Rasio Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya.	Penanggung Jawab
Telah dilakukan monitoring pelaksanaan Program Sistem Manajemen Mutu SNI ISO/IEC 17025:2017 pada Triwulan II Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 8 Juli 2025
 Penanggungjawab Indikator Kinerja



Muhammad Rifan Rais

1. 2010年10月1日起，凡在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，均应按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及实施细则缴纳增值税。

LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN PENGUJIAN LABORATORIUM TRIWULAN II TAHUN 2025



LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN SISTEM MANAJEMEN MUTU SNI ISO/IEC 17025:2017



FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator :	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Timja :	:	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Periode Laporan :	:	Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan :	:	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar
Nama Indikator Kinerja :	:	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target:	75	75	75	75	75	75	75		75
Realisasi:	93,33	89,93	91,58						
%Capaian	124,29	119,91	122,11						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020).
- Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai meliputi:
 1. Persyaratan Umum
 2. Persyaratan Struktural
 3. Persyaratan Sumberdaya
 4. Persyaratan Proses
 5. Persyaratan Sistem Manajemen
- Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah kegiatan surveilan penerapan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Selama Triwulan II Tahun 2025, terdapat 77 kali pelaksanaan surveilan penerapan HACCP.
- Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

dimana :

 - $\bar{x}$ = Rata-rata
 - $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke-1, 2, 3, ..., n
 - n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu laboratorium ini dilaksanakan oleh 21 orang mulai dari Manager Puncak hingga Inspektur mutu hasil perikanan yang telah memiliki nomor registrasi inspektur mutu dan/atau telah mengikuti pelatihan HACCP dasar.
- Kegiatan pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi ini mendukung Asta Cita ke-2 dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional yaitu swasembada pangan melalui ekonomi biru. Pemenuhan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi memberikan jaminan kepada negara-negara importir akan pangan yang sehat.

dan anjuran konsumsi berupa komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan. Pemenuhan sistem manajemen mutu juga memberikan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

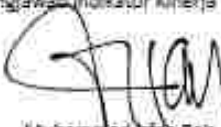
- IKU ini mendukung budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di Ungluap Balai Besar KIPM Makassar yaitu Kompeten dimana ASN dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sesuai dengan tantangan yang ada. Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dalam penjaminan mutu hulu hingga hilir, ASN Inspektur mutu dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan mengupdate regulasi-regulasi terbaru.
- Anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu bersumber dari DiPA Balai Besar KIPM Makassar Triwulan II tahun 2025 yang mengalami perubahan menjadi Rp. 27.304.000,- dari sebelumnya sebesar Rp. 3.500.000,- di Triwulan I Tahun 2025. Bila dibandingkan dengan anggaran pada tahun sebelumnya, maka anggaran tahun 2025 meningkat sebesar 36,52% bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.000.000,-.
- Pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025, anggaran pemenuhan sistem manajemen mutu telah direalisasikan sebesar Rp. 2.804.000,-. Sisa anggaran sebesar Rp. 24.500.000,- rencananya akan direalisasikan pada Triwulan IV sesuai dengan jadwal re-akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012.
- Pada Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025, belum dilakukan penilaian Verifikasi Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi oleh Pusat Manajemen Mutu pada Balai Besar KIPM Makassar. Berdasarkan Surat Kepala Pusat Manajemen Mutu nomor 8.827/BPPM/MKP.2/TU.210/VI/2025 tanggal 8 Juli 2025, maka pencapaian IKU Nilai Kualitas Penerapan SMM Lembaga Inspeksi menggunakan nilai capaian rata-rata seperti capaian Pusat Manajemen Mutu, yaitu pada Triwulan I sebesar 93,33, Triwulan II sebesar 89,93, dan Semester I sebesar 91,58. Sehingga terjadi perubahan capaian kinerja di Triwulan I Tahun 2025 seharusnya adalah 93,33.
- Pada Triwulan II Tahun 2025 tepatnya pada tanggal 2 Juni 2025, Balai Besar KIPM Makassar telah melakukan Evaluasi Pelaksanaan Surveilans HACCP untuk menyamakan persepsi Inspektur mutu mengenai pelaksanaan Surveilans HACCP yang sering menjadi perbedaan diantara Inspektur mutu. Contohnya adalah penugasan temuan di dalam checklist, penentuan kategori temuan, dan re-review hasil temuan tim teknis dalam penerapan surveilans HACCP.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah dalam penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi adalah perbedaan persepsi diantara Inspektur mutu yang kemungkinan masih terjadi sehingga diperlukan pemeliharaan kompetensi Inspektur mutu.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya :	Penanggung Jawab
Pemeliharaan kompetensi Inspektur mutu melalui kegiatan sharing session yang dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung jawab
Berdasarkan hasil monitoring pada Triwulan II, terdapat dua kegiatan yaitu pengecekan antara status kalibrasi peralatan inspeksi dan pelaksanaan surveilans sertifikasi HACCP di UPI/UPTL telah berjalan dengan baik.	Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji

Makassar, 8 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Muhammad Rifan Rais

[illegible]

LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN PENERAPAN SNI ISO/IEC 17020:2012
TRIMULAN II TAHUN 2025



LAMPIRAN. DOKUMENTASI KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN SURVEILAN HACCP
TANGGAL 2 JUNI 2025



**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan II 2025
Nama Sasaran Kegiatan	:	Terseleenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
TARGET	92	92	92						92
Realisasi	100	97,28	97,28						
%Capaian	109	105,75	105,75						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)



Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan satu pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dan belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi OM-SPAN. Penilaian IKPA diatur pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang Lingkup :

PER-5/PB/2024 tanggal 2 Mei 2024 mengatur mengenai pengukuran dan penilaian secara sistematis dan objektif atas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dengan menggunakan IKPA dan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh DJPB.

Aspek Pengukuran dan Indikator Kinerja :

Pengukuran IKPA meliputi 3 aspek :

1. Kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:
 - a. Rasio DIPA bobot 10%
 - b. Deviasi halaman 3 DIPA bobot 15%
2. Kualitas implementasi pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini terdiri dari:

- a. Penyerapan anggaran bobot 20%
 - b. Belanja Kontraktual bobot 10% berubah menjadi 0%
 - c. Penyelesaian Tagihan bobot 10% berubah menjadi 0%
 - d. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10%
 - e. Dispensasi Surat Perintah Membayar bobot 0%
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA. Indikator kinerja untuk pengukuran dan penilaian pada aspek ini adalah capaian output. Bobot capaian output adalah 25%.

Total Konversi Bobot pada Aspek pengukuran dan Indikator Kinerja pada Tahun Anggaran 2025 adalah 80%

KEMAJUAN YANG DIKONDISIKAN

Capaian nilai IKPA Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 97,38 persen dari target 100 persen. Pada tahun ini berbeda dari tahun 2024 yaitu Konversi bobot hanya 80 persen tidak mencapai 100 persen sehingga perhitungan untuk mendapatkan capaian kinerja adalah:

Capaian Kinerja IKPA diperoleh sebagai berikut:

Capaian kinerja IKPA = (Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran + Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran) / Konversi Bobot 80 %

Perhitungan perolehan dari Nilai Akhir Kualitas Perencanaan Anggaran, Nilai Akhir Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Akhir Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran dengan indikator pendukung pada masing-masing adalah hasil perhitungan otomatis dari Aplikasi Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi Money PA.

Berikut tampilan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran Triwulan II tahun 2025 pada Balai Besar KIPM Makassar.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Keaslian Anggaran 100%

No.	Kode IKPA	Kode SK	Kode Sub-SK	Jenis Siklus	Kategori	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Kategori Bobot	Rendahnya SPM Penganggaran	Nilai Akhir atau Target/Konversi Bobot
						Revisi SPM	Revisi Anggaran (SOP)	Penghapusan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penghapusan Tagihan	Penghapusan UP dan TUP	Tagihan Output					
1	106	122	670000	GAS (Gedung, Asrama, Kantor, dan Fasilitas)	Revisi SPM	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	80%	0.00	97.38	
					Revisi Anggaran (SOP)	0	0	0	0	0	0	0					
					Revisi SPM	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
					Revisi Anggaran (SOP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Dibawah ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran:

- Tabel perbandingan capaian kinerja pelaksanaan anggaran TW I 2025 dan TW II 2025

Indikator Kinerja	Periode TW I 2025 (100+400)		Periode TW II 2025 (100+400)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Deviasi DIPA	40	32	32	32
Deviasi Halv DIPA	32	32	32	32,50
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	30	30	30	32,75
Saluran Kotorisasi	0	0	0	0
Penyerapan Tagihan	10	0	0	0
Penggunaan UUP dan TUP	30	30	30	30
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	30	30	30	30
Capaian SPN (Pangung)	0	0	0	0
Nilai Total	80	80,00	80	77,25
Nilai Rata-rata		100,00		96,56
Capaian (Realisasi/Target 0,8)		100		100,00

Pada tabel diatas terlihat adanya penurunan nilai KPA pada TW II 2025 dibandingkan TW I 2025 sebesar 3,25. Penurunan TW II 2025 dipengaruhi oleh terbitnya surat dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran Nomor:50/PB.2/2025 tanggal 20 Februari 2025 tentang penyesuaian data dan perhitungan indikator KPA pada periode Triwulan I TA 2025.

Beberapa hal yang mengakibatkan tidak maksimalnya nilai Deviasi halaman 3 DIPA sebagai indikator dari kinerja kualitas Perencanaan anggaran adalah:

- Perencanaan yang tidak akurat. Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tidak sesuai dengan realisasi anggaran dapat menyebabkan deviasi yang tinggi;
- Kemunduran jadwal belanja. Keterlambatan atau percepatan pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi realisasi anggaran dan menyebabkan deviasi;

Sedangkan penyebab rendahnya dari realisasi anggaran adalah adanya pagu blokir sebagai akibat dari efisiensi anggaran.

- Tabel perbandingan capaian kinerja indikator pelaksanaan anggaran TW II 2025 dan TW II 2024

Indikator Kinerja	Periode TW II 2024 (100+40,75)		Periode TW II 2025 (100+400)	
	Bobot	Nilai Akhir	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
Deviasi DIPA	40	32	32	32
Deviasi Halv DIPA	32	32	32	32,50
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
Penyerapan Anggaran	30	30,00	30	32,75
Saluran Kotorisasi	0	0	0	0
Penyerapan Tagihan	10	0	0	0
Penggunaan UUP dan TUP	30	30	30	30
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
Capaian Output	30	30	30	30
Capaian SPN (Pangung)	0	0	0	0
Nilai Total	100	60,00	80	77,25
Nilai Rata-rata		60,00		96,56
Capaian (Realisasi/Target 0,6)		100,00		100,00

Pada tabel diatas terlihat adanya kenaikan nilai KPA pada TW II 2025 dibandingkan TW II 2024 sebesar 0,25. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan capaian TW II 2025 adalah penetapan target KPA TA 2025 lebih kecil dari penetapan target TA 2024.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pelaksanaan anggaran, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 10 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: B.329/KPA-BB KIPM.MKS/QT.210/I/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: B.009/KPA-BB KIPM.MKS/QT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Pemandatanganan SPN;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK
- Surat Perintah Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Nomor: B.005/KPA-BB KIPM.MKS/QT.210/I/2025 tgl. 2 Januari 2025 dengan beranggotakan 1 Pegawai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

ANGGARAN dan ASPEK PEMANFAATANNYA

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan manajemen keuangan dan layanan perkantoran gaji dan tunjangan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya:

- Layanan manajemen keuangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp25.450.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 0 persen. Pagu kegiatan ini masih terblokir seluruhnya. Output dari layanan manajemen keuangan adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran gaji dan tunjangan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp6.583.259.000. Pada TW I 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar 3.666.191.892 atau 52,53 persen. Output dari layanan perkantoran gaji dan tunjangan adalah pembayaran gaji dan tunjangan seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar.

Total pagu anggaran untuk mendukung capaian kinerja pelaksanaan anggaran adalah sebesar Rp7.006.709.000 dengan realisasi anggaran 3.666.191.892 atau 52,35 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan II 2024, kegiatan pada indikator kinerja ini hanya didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp10.632.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.097.000 atau 85,56 persen. terdapat penurunan realisasi anggaran pada Triwulan II 2025. Hal ini disebabkan pada Triwulan II 2025 pagu anggaran kegiatan layanan manajemen keuangan masih terblokir seluruhnya dan pagu anggaran pada Triwulan II 2024 sangat kecil.

PROGRAM NASIONAL

Pada indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Aka Cita.

LAMPIRAN REKAPITULASI TRIWULAN II 2025 IKU II

Tangkapan Layar IKPA Triwulan II 2025 pada Aplikasi Monev PA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENGUSAHA KEMAJUAN

REKAPITULASI PELAKSANAAN INDIKATOR

Rekapitulasi IKU II

No	Indikator	Sub-Indikator	Kategori	Status	Kategori Pelaksanaan Kegiatan					Kategori Pelaksanaan Kegiatan	Kategori Pelaksanaan Kegiatan	Kategori Pelaksanaan Kegiatan	Kategori Pelaksanaan Kegiatan	Kategori Pelaksanaan Kegiatan
					Indikator	Sub-Indikator	Indikator	Sub-Indikator	Indikator					
1	IKU II.1	IKU II.1.1	IKU II.1.1.1	IKU II.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
2	IKU II.2	IKU II.2.1	IKU II.2.1.1	IKU II.2.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
3	IKU II.3	IKU II.3.1	IKU II.3.1.1	IKU II.3.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
4	IKU II.4	IKU II.4.1	IKU II.4.1.1	IKU II.4.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	
5	IKU II.5	IKU II.5.1	IKU II.5.1.1	IKU II.5.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	IKU II.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	

Dokumentasi Rapat Kegiatan Strategi Penyerapan Anggaran Semester I 2025 (23 Juni 2025)



- Monitoring dan Nilai hasil penginputan capaian output TWI 2025, sebagai bahan dari akar masalah TWI 2025



- PPK dan Operator Komitmen melakukan penginputan



Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Tidak tercapainya deviasi Hal III DIPA seringkali menjadi salah satu kendala masih rendahnya nilai IKPA satker Balai Besar KIPM Makassar

Rekomendasi rencana aksi Triwulan III 2025

- Melakukan komunikasi kepada seluruh jajaran sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan tentang pengelolaan keuangan.

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi Triwulan I 2025

- PPK dan Operator Komitmen telah melakukan penginputan target dan capaian output pada Aplikasi

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

SAKTI Modul Komitmen dan telah mendapatkan nilai 100 persen	
--	--

Makassar, 8 Juli 2023
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Kerwit, S. Ti

**Lampiran 1. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ya	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan II 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	71,5	71,5					71,5		71,5
Realisasi	100	93,44							
%Capaian									

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKAK- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan revisi angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; dan
- Pembentukan penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan untuk mendukung tercapainya target kinerja ini antara lain :

- Penyusunan revisi anggaran
- Rapat pembahasan percepatan realisasi anggaran triwulan II tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 di BPPMHRP Makassar

Aplikasi Monev Kementerian Keuangan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai Kinerja Anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Money Kemenkeu:



Dashboard Aplikasi Money Kemenkeu

Penjelasan Dashboard Nilai Kinerja Anggaran Triwulan II tahun 2025:



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 11,02 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48,65 %

Nilai kinerja perencanaan anggaran sebesar 11,02% yang terlihat pada aplikasi <https://money.kemenkeu.go.id> belum dapat menjelaskan kondisi riil nilai kinerja perencanaan anggaran yang ada di Balai Besar KIPM Makassar. Hal ini disebabkan karena data yang digunakan aplikasi <https://money.kemenkeu.go.id> belum update yang dibuktikan dengan statement pada aplikasi yaitu "Nilai kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RD) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi".

Untuk itu perhitungan kinerja perencanaan anggaran Balai Besar KIPM Makassar diperoleh dari aplikasi <https://eparmt.kemenkeu.go.id> di login MONEVPA. Nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 adalah 93,44%, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada detail indikator halaman 3 DiPA pada aplikasi <https://spanint.kemendikau.go.id>

Berdasarkan table di atas, pada Triwulan II Tahun 2025 nilai perencanaan anggaran belum optimal terutama terlihat pada kode akun belanja 52 yaitu belanja barang. Terpantau nilai deviasi antara perencanaan dan penyerapan anggaran pada bulan April dan Mei Tahun 2025 masih cukup tinggi yaitu 31,36% dan 32,44% namun pada bulan Juni Tahun 2025 telah dilakukan optimalisasi penyerapan anggaran pada kode akun belanja 52 sehingga terjadi penurunan deviasi yaitu menjadi 14,89%. Namun demikian secara total nilai perencanaan anggaran masih melebihi target yaitu 93,44% dari target 71,5% atau capaian sebesar 130,68%.

Untuk mendukung tercapainya KOU ini, Balai Besar KIPM Makassar membentuk sebuah tim pengelola anggaran yang terdiri dari 9 pegawai yang dituangkan pada :

- Surat Perintah Tugas Pengelola Anggaran Nomor: 8.329/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang merupakan revisi dari Surat Perintah Tugas Nomor: 8.009/KPA-BBKIPM.MKS/OT.210/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 karena adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Besar KIPM Makassar. Tim ini terdiri dari 9 orang yaitu:
 - 1 Orang Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 1 Orang Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 1 Orang Pejabat Penandatangan SPN;
 - 1 Orang Bendahara Pengeluaran;
 - 3 Orang Staf KPA dan;
 - 2 Orang Staf PPK.

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar.

Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran pada kegiatan layanan perencanaan dan penganggaran dan layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan. Berikut adalah masing masing penjelasan pagu dari realisasi anggarannya.

- Layanan Perencanaan dan penganggaran
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 57.675.000,-. Pada TW II 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 17.406.459,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.
- Layanan perkantoran, perawatan, Gedung dan Bangunan
Kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 263.504.000,-. Pada TW II 2025 anggaran pada kegiatan ini telah terealisasi sebesar Rp. 31.775.000,- Output dari layanan perencanaan dan penganggaran adalah mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan untuk perbendaharaan dan administrasi keuangan.

Pada Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai Besar KPM Makassar tidak terdapat kegiatan yang menjadi Program Nasional pada tahun 2025. Namun sabtikan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh presiden melalui INPRES No: 2 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 memperkuat Program Prioritas nasional melalui Asa cita.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Pengelola anggaran kurang konsisten dalam melakukan monitoring dan evaluasi perencanaan anggaran diselaraskan dengan pelaksanaan anggaran;
- Kurangnya komunikasi antara perencanaan anggaran dengan ketua tim kerja dan pelaksana kegiatan.

Rekomendasi rencana aksi triwulan III 2025	Penanggung Jawab
- Melakukan monitoring dan evaluasi konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW II Tahun 2025	Penanggung Jawab
- Telah melakukan penginputan target dan capaian output bulan Januari sampai Maret 2025 melalui aplikasi SAKTI modul komitmen; - Telah mengoptimalkan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran Tahun 2025; - Telah merindaklanjuti hasil monitoring tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 9 Juli 2025

Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwati S.P.

Dokumentasi Rapat Pembahasan Percepatan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 di BPPMHKP Makassar



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



Rapat Pembahasan Percepatan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Badan Mutu KKP Makassar

23 Juni 2025



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025
TRIWULAN II TAHUN 2025

Nama Indikator (10)	:	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%)
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan II 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintah yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	100	100	100	100	100	100	100	-	100
Realisasi	100	100	100	-	-	-	-	-	-
%Capaian	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Deskripsi :

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas Internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemerisa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)" dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$\%P = (A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2025;

Pada triwulan II tahun 2025 tidak terdapat pemeriksaan BPK, sehingga realisasi dari IKU ini dinilai mencapai 100%, jika dibandingkan TW I 2025 yaitu 100% dan pada TW II Tahun 2024 capaian realisasinya 100%. Dengan demikian penyelesaian temuan BPK pada lingkup Balai Besar KIPM Makassar dinilai konsisten.

Kegiatan yang Dilaksanakan :

Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung tercapainya indikator ini, yakni dengan melakukan pemeriksaan, verifikasi dan validasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja untuk menentukan bahwa tagihan tersebut layak untuk dilakukan pembayaran. Dengan aktivitas tersebut diharapkan pengelolaan anggaran dapat dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku sehingga tidak ada temuan dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional baik internal maupun eksternal;

Persentase penyelesaian temuan BPK mendukung Misi Asta Cita ke-7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan Korupsi dan Narkoba". Hal ini karena dengan adanya IKU ini dapat mendorong instansi pemerintah dalam hal ini Balai Besar KIPM Makassar untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta mematuhi penyelesaian temuan BPK tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" ASN bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kinerja adalah sebesar Rp. 159.910.000,- yang terdiri dari :

- Layanan Perkantoran, Perawatan Kendaraan Bermotor Rp. 135.310.000,-;
- Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu semula Rp. 9.000.000,- menjadi Rp. 24.600.000,-;

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah direalisasikan anggaran Rp. 60.916.494,- atau 38% yang digunakan untuk Layanan perkantoran, Perawatan kendaraan bermotor sebesar Rp. 47.855.173,- dan Layanan perkantoran, pertemuan/jamuan delegasi/misi/tamu sebesar Rp. 13.061.321,-

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025	Penanggung Jawab
Memastikan kecermatan verifikasi keuangan secara berjenjang (Verifikator Keuangan/Analisis Keuangan, PPK dan Bendahara) dengan penggunaan lembar checklist	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi TW I Tahun 2025	Penanggung Jawab
Telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh bukti tagihan belanja, dan dituangkan dalam lembar checklist	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

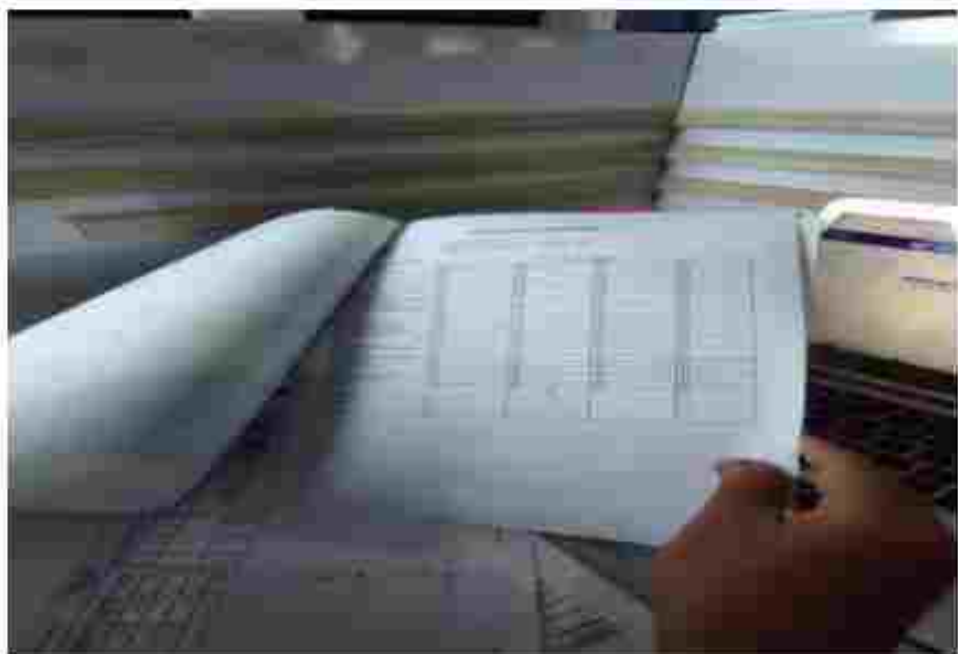
Makassar, 8 Juli 2025

Penanggung Jawab Indikator Kinerja

Karwi

Dokumentasi : kegiatan verifikasi keuangan dengan menggunakan lembar checklist BPPMHPK Makassar







LAPORAN CAPAIAN KINERJA | LCK | TW II BALAI BESAR KIPM TAHUN 2025

Nama Indikator (11)	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan II

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target			81			87	87		87
Realisasi			85.95						
%Capaian			106						

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4

= Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.1

= Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2

= Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan

= Capaian di akhir tahun 2025

2. Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DEKURPS:

Menurut UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada dasar salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau profil tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu mengukur tingkat profesionalitas ASN pada instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh BPSDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan

- c. Surat Ptl. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN.

KEGIATAN YANG DILAKSAJAKAN

Nilai Realisasi IP ASN Semester I Tahun 2024 adalah 90,05, Target Tahunan IP ASN Tahun 2025 adalah 87 dengan periode pelaporan Semester I nilai target 81 dan Semester II nilai target 87.

Nilai Realisasi IP ASN Semester I Tahun 2025 adalah 85,96

Telah dilakukan update data Pendidikan dan sertifikat pelatihan pada aplikasi MyAsn dan aplikasi SIASN yang dilakukan oleh pegawai dan operator verifikasi/approval.

Peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara untuk menjawab tantangan yang selalu berubah (kompeten) dengan kinerja pegawai yang meningkat dibuktikan Aparatur Sipil Negara menginput sertifikat pelatihan yang telah diikuti pada aplikasi Myasn dan nilai Indeks Profesionalitas ASN yang meningkat. Kompetensi meningkatkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara Balai Besar KIPM Makassar.

Peningkatan kompetensi menjadikan budaya kerja berupa sikap dan perilaku Aparatur Sipil negara untuk melaksanakan tugas sesuai pelatihan/keterampilan yang telah dimiliki. Pelatihan fleksibel skill yang telah diikuti akan merubah pola pikir dalam menyesuaikan diri dengan perubahan jangka pendek dan jangka panjang sehingga bisa menangani masalah atau tugas yang tidak terduga secara efektif.

Nilai IP ASN dicapai dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi;
 - b. Kompetensi;
 - c. Kinerja; dan
 - d. Disiplin.
2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN BBKIPM Makassar, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3
 - b. Pendidikan S-2
S2 Keahlian : 7 orang
 - c. Pendidikan S-1 /D-IV
S-1 /D-IV Keahlian : 12 orang
S-1 /D-IV Pengawas : 1 orang
S 1 /D-IV Pelaksana : 4 orang
 - d. Pendidikan L-III ;
L-III Keterampilan : 4 orang
L-III Pelaksana : 1 orang
 - e. SLTA :
SLTA Keterampilan : 2 orang
SLTA Pelaksana : 4 orang
3. Berdasarkan Surat Ptl. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 1. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal lebih tinggi di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh lima);
 2. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 3. ASN yang memperoleh ijazah jenjang pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh)

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Persentase
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Cukup Baik		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Predikat Kinerja yang diperoleh ASN BBKIPM Makassar pada tahun 2024 adalah BAIK dan SANGAT BAIK

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang; dan
 - Hukuman disiplin berat.

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Aparatur Sipil Negara Lingkup Balai Besar KIPM Makassar tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin sehingga semua ASN mendapatkan nilai 5

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi, meliputi:
- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Penempatan Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemuktahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN;
 - Dimensi kompetensi adalah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari aplikasi SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN;
 - Dimensi kinerja adalah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN / rekonsiliasi data laporan kinerja ke SIASN BKN / data riwayat Kinerja pada SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori; dan
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, terdiri atas:
- Kualifikasi memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - Kompetensi memiliki bobot 40% (empat puluh persen);
 - Kinerja memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - Disiplin memiliki bobot 5% (lima persen).

9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2019

$$\begin{aligned}
 IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i & IP_1 &= W_{1j} \cdot R_{1j} \\
 & & IP_2 &= W_{2k} \cdot R_{2k} \\
 & & IP_3 &= W_{3l} \cdot R_{3l} \\
 & & IP_4 &= W_{4m} \cdot R_{4m} \\
 &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4
 \end{aligned}$$

Berdasarkan Aplikasi <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

$$\text{Nilai IP ASN} = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$85,96 = 21,71 + 34,11 + 25,14 + 5$$

$$\text{IP ASN BBKIPM Makassar} = \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN B 'KIPM Makassar'}}{\text{jumlah pegawai ASN B 'KIPM Makassar'}}$$

$$85,96 = \frac{3008,15}{35}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN, antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai aktif yang berkedudukan hukum sebagai ASN, meliputi:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

12. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar dibiaya.

Sebagai perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut:

- Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 83,45 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 85,96 masih lebih tinggi dengan selisih 2,51

! **Salah satu** 3 30 0,49 0,0 329 0 0,04 1 85 0,4 700

- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran dengan nilai IP ASN 83,42 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 85,96 masih lebih tinggi dengan selisih 2,54

! **Salah satu** 3 30 0,49 0,0 329 0 0,04 1 85 0,4 700

Sumber data : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn> pertanggal 10 Juli 2025.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN

Balai Besar KIPM Makassar, mempunyai SDM Aparatur Sipil Negara sebanyak 35 Pegawai yang sebelumnya 38 pegawai yang pensiun (Hasbullah, S. St), mutasi ke Biro umum (Abdul Mubarak Aziz, S.T, dan Poltek Bone (Ir Anwar, M. Si)

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Subbagian Umum	1
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	8
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir	1
7.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	2
10.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
11.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	1
12.	Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir	1
13.	Pelaksana	9
	Total	35

Anggaran

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2024 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 77.288.000
- Anggaran Setelah revisi sebesar Rp. 73.833.000
- Realisasi Rp. 73.434.365 (99,46%)

Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar, Dukungan Manajerial, 3987.EBA.962.A Layanan Umum, Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur Tahun 2025 :

- Anggaran Awal sebesar Rp. 18.064.000
- Anggaran Setelah Blokir sebesar Rp. 0

Program Nasional

Pada indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai Besar KIPM Makassar memperkuat Program Prioritas Nasional melalui Asta Cita, dengan meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara akan meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dalam pelayanan publik.

Aspek Pemanfaatan

Kompetensi ASN Lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar bermanfaat bagi kemajuan organisasi dan individu. IP ASN merupakan area pengembangan diri dalam Upaya peningkatan profesionalitas sebagai ASN dan IP ASN sebagai kontrol sosial agar ASN bertindak profesional dalam kaitan pelayanan publik.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Efisiensi Anggaran berdampak pada pengembangan kompetensi pegawai sehingga tidak dapat dilakukan pelatihan secara langsung

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya

Penanggung Jawab

- Aparatur Sipil Negara mengikuti pelatihan secara daring

Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya

Penanggung Jawab

1. Data Pelatihan di Menu Riwayat Sertifikasi pada aplikasi MyASN secara otomatis masuk ke data Diklat tanpa verifikasi dan aproval
2. Aparatur Sipil Negara telah menginput sertifikat Pelatihan dengan dibuktikan nilai IP ASN yang meningkat

Ketua TIM Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 7 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit

FOTO KEGIATAN UPDATE DATA SERTIFIKAT PADA APLIKASI MYASN



DOKUMENTASI NILAI IP ASN
PADA <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>



Staphylococcus aureus



No	Uraian	Jumlah Pagarang Siklus	Kualifikasi Dulu		Kompetensi Dulu		Keterampilan Dulu		Keahlian Dulu		Total - Keterampilan
			P	Profil	P	Profil	P	Profil	P	Profil	
1	Keahlian Keterampilan Dulu	15	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100
2	Keahlian Keterampilan Dulu	20	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100
3	Keahlian Keterampilan Dulu	20	10	50%	20	100%	20	100%	30	100%	100
4	Keahlian Keterampilan Dulu	20	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100
5	Keahlian Keterampilan Dulu	20	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100
6	Keahlian Keterampilan Dulu	20	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100
7	Keahlian Keterampilan Dulu	20	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100
8	Keahlian Keterampilan Dulu	20	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100
9	Keahlian Keterampilan Dulu	20	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100
10	Keahlian Keterampilan Dulu	20	20	100%	30	100%	20	100%	30	100%	100

INFORMASI INPUT DATA PADA APLIKASI MYASN



**PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA
LINGKUP BALAI BESAR KIPM MAKASSAR**

NAMA	PELATIHAN/SOSIALISASI/ WORKSHOP	WAKTU PELAKSANAAN
Amiyanti, A.Md, S.A.P	Penyusutan Arsip Dinamis	23 Januari 2025
Oktovianus	Penyusutan Arsip Dinamis	23 Januari 2025
Oktovianus	Pengembangan Kompetensi SDM Kearsipan	14 Januari 2025
Amiyanti, A.Md, S.A.P	Pengembangan Kompetensi SDM Kearsipan	14 Januari 2025
Zulyana Arlina, A.Md	Pengembangan Kompetensi SDM Kearsipan	14 Januari 2025
Amiyanti, A.Md, S.A.P	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Arliandi	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Erlina Kadang, S.Kom	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Rosdiana, A. Md	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Ardiana, A. Md. Pi	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Hapi, S. A. P	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025

Taufiq, S. PKP	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Niza Mahaputri Zainal	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Sri Rahayu Setyaningsin, S.St.Pi., M.Sc	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Wara Zakaria Sapan, A.Pi	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Patmawati M, S.St.Pi	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Junaedi, S.E	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Bakhtiar, S.Pi	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Ir. Habrin Yake. MM	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Waode Suharni, S.Pi	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Halim	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Karwit, S.Pi	Implementing Quality Management System ISO 9001:2015	30 Januari 2025
Arniyanti, A.Md, S.A.P	Penguatan peran APiP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025

Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Arfiandi	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Bakhtiar, S.Pi	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Erlina Kadang, S.Kom	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Fatima Tayang, S.St.Pi, MM	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Hapi, S.A.P	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Idawati Barung, A.Md.Pi	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Ir Anwar, M. Si	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Irma Syam	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Jumhana, A.Md	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Junaedi, S.E	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025
Karwit, S.Pi	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Pebruari 2025

Muhammad Arman, S.A.P	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Niza Mahaputri Zainal	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Oktovianus	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Patmawati M, S.St.Pi	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Rosdiana, A. Md	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Taufiq, S. PKP	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Wara Zakaria Sapan, A.Pi	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Waode Suharni, S.Pi	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Zulyana Arlina, A.Md	Penguatan peran APIP dalam mengawal Program Prioritas Nasional	4 Februari 2025
Jumhana, A.Md	Coretax bagi Instansi Pemerintah; Pembuatan Bukti Potong, Pembayaran dan Pelaporan	5 Februari 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Strategi menghadapi pemeriksaan pajak terkait transfer pricing untuk perusahaan PMA	6 Februari 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi	20 Februari 2025

Amiyanti, A.Md, S.A.P	Yuk Kenalan dengan ISO 17065 2012	26 Februari 2025
Arfiandi	Yuk Kenalan dengan ISO 17065 2012	26 Februari 2025
Patmawati M, S.StPi	Yuk Kenalan dengan ISO 17065 2012	26 Februari 2025
Taufiq, S. PKP	Yuk Kenalan dengan ISO 17065 2012	26 Februari 2025
Idawati Barung, A.Md.Pi	NgoMik #10 Evaluating Culture Media Performance as per ISO 11133 2014	28 Februari 2025
Ir. Habrin Yake. MM	NgoMik #10 Evaluating Culture Media Performance as per ISO 11133 2014	28 Februari 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	NgoMik #10 Evaluating Culture Media Performance as per ISO 11133 2014	28 Februari 2025
Muzakkir, S.Pi	NgoMik #10 Evaluating Culture Media Performance as per ISO 11133 2014	28 Februari 2025
Ardiana, A. Md. Pi	NgoMik #10 Evaluating Culture Media Performance as per ISO 11133 2014	28 Februari 2025
Taufiq, S. PKP	NgoMik #10 Evaluating Culture Media Performance as per ISO 11133 2014	28 Februari 2025
Waode Suharni, S.Pi	NgoMik #10 Evaluating Culture Media Performance as per ISO 11133 2014	28 Februari 2025
Rosdiana, A. Md	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Muhammad Arman, S.A.P	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025

Junaedi, S.E	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Niza Mahaputri Zainal	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Jumhana, A.Md	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Zulyana Arlina, A.Md	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Bakhtiar, S.Pi	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Halim	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Erlina Kadang, S.Kom	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Hapi, S.A.P	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Darmawan, S.P	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025
Irma Syam	Coretax Instansi Pemerintah pada Satker di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	4 Maret 2025

Oktovianus	Penilaian Usul Musnah Tahun 2025	10 Maret 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
Arfiandi	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
Muzakkir, S.Pi	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
Idawati Barung, A.Md.Pi	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
Patmawati M, S.St.Pi	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
	Sosialisasi Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB)	13 Maret 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Fleksibel Skills	4 Maret 2025
Muhammad Arman, S.A.P	Fleksibel Skills	13 Maret 2025
Junaedi, S.E	Fleksibel Skills	13 Maret 2025

Bakhtiar, S.Pi	Sosialisasi Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output TA 2025	13 Maret 2025
Niza Mahaputri Zainal	Fleksibel Skills	17 Maret 2025
Zulyana Arlina, A.Md	Fleksibel Skills	17 Maret 2025
Jumhana, A.Md	Fleksibel Skills	17 Maret 2025
Rosdiana, A. Md	Fleksibel Skills	17 Maret 2025
Hapi, S.A.P	Fleksibel Skills	17 Maret 2025
Karwit, S.Pi	Fleksibel Skills	27 Maret 2025
Muzakkir, S.Pi	Sosialisasi Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	21 Maret 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	Sosialisasi Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	21 Maret 2025
Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi., M.Sc	Sosialisasi Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	21 Maret 2025
Waode Suharni, S.Pi	Sosialisasi Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	21 Maret 2025
Patmawati M, S.St.Pi	Sosialisasi Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional	21 Maret 2025
Bakhtiar, S.Pi	Pengelolaan Konflik Kepentingan	24 Maret 2025

Arfiandi	Kebijakan Pengembangan Budaya Udang Nasional	28 Maret 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi, M.P	Kebijakan Pengembangan Budaya Udang Nasional	28 Maret 2025
Muzakkir, S.Pi	Kebijakan Pengembangan Budaya Udang Nasional	28 Maret 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Kebijakan Pengembangan Budaya Udang Nasional	28 Maret 2025
Taufiq, S. PKP	Kebijakan Pengembangan Budaya Udang Nasional	28 Maret 2025
Amiyanti, A.Md, S.A.P	Kebijakan Pengembangan Budaya Udang Nasional	28 Maret 2025
Muhammad Arman, S.A.P	Pengelolaan Konflik Kepentingan	10 April 2025
Oktovianus	Pengelolaan Arsip dalam rangka mewujudkan transparansi,akuntabilitas dan kepastian hukum	12 April 2025
Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Ardiana, A. Md. Pi	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Arfiandi	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Amiyanti, A.Md, S.A.P	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025

Fatima Tayang, S.St.Pi, MM	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Ir. Habrin Yake, MM	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Idawati Barung, A.Md.Pi	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi, M.P	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Muzakkir, S.Pi	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Patmawati M, S.St.Pi	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Sri Rahayu Setyaningsih, S.St.Pi, M.Sc	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Taufiq, S. PKP	Kebijakan Pengembangan Rumput Laut Nasional; Rencana Kerja 2025 - 2029 dan dampak kebijakan president	16 April 2025
Arniyanti, A.Md, S.A.P	Sosialisasi Kebijakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025	21 April 2025
Muzakkir, S.Pi	Sosialisasi Kebijakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025	21 April 2025

Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Ardiana, A. Md. Pi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Arfiandi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Ir. Habrin Yake: MM	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Muzakkir, S.Pi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Wara Zakaria Sapan, A.Pi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Ardiana, A. Md. Pi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Arfiandi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Ir. Habrin Yake: MM	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012,SNI ISO/IEC 17067:2013,and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025

Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17067:2013, and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Muzakkir, S.Pi	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17067:2013, and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Wara Zakaria Sapan, A.PI	Conformity Assessment Based on SNI ISO/IEC 17065:2012, SNI ISO/IEC 17067:2013, and SNI ISO/IEC TR 17026:2015	23 April 2025
Karwit, S.Pi	Produktivitas Kerja Bagi ASN	25 April 2025
Arniyanti, A.Md, S.A.P	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025
Erlina kadang, S. Korn	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025
Ir. Habrin Yake. MM	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025
Muzakkir, S.Pi	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025
Patmawati M, S.St.Pi	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025
Arfiandi	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025
Taufiq, S. PKP	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025
Patmawati M, S.St.Pi	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11.2027	30 April 2025

Muzakkir, S.Pi	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Taufiq, S. PKP	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Anugra Ekayani A. Lantara Pawiseang, S.St.Pi	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Ardiana, A. Md. Pi	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Arniyanti, A.Md, S.A.P	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Idawati Barung, A.Md.Pi	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Ardiana, A. Md. Pi	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Idawati Barung, A.Md.Pi	Uji Konfirmasi Bakteri Salmonella dengan Teknik PCR berdasarkan SNI 2332.11:2027	30 April 2025
Muhammad Arman, S.A.P	Pelatihan Pelayanan Publik	30 April 2025
Muhammad Arman, S.A.P	Produktivitas Kerja Bagi ASN	30 April 2025
Ardiana, A. Md. Pi	Audit Technique om ISO 190112018 requirements	30 April 2025
Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P	Audit Technique om ISO 190112018 requirements	30 April 2025

Rosdiana	Strategi Peningkatan Kualitas Inovasi Pelayanan Publik	30 April 2025
Bakhtiar, S.Pi	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Erlina Kadang, S.Kom	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Halim	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Hapi	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Irma Syam	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Jumhana	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Niza Mahaputri Zainal	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Karwit, S.Pi	Sosialisasi Aplikasi Monev PBJ KKP	5 Mei 2025
Karwit, S.Pi	Pelatihan Pelayanan Publik	12 Mei 2025
Ardiana, A. Md. Pi	Optimalisasi Workflow Pangan untuk Deteksi Patogen sesuai regulasi iso dengan teknologi Biokar dan Hygiena	15 Mei 2025
Ir Habrin Yake, M.M	Optimalisasi Workflow Pangan untuk Deteksi Patogen sesuai regulasi iso dengan teknologi Biokar dan Hygiena	15 Mei 2025

Muzakkir, S.Pi	Optimalisasi Workflow Pangan untuk Deteksi Patogen sesuai regulasi iso dengan teknologi Biokar dan Hygiena	15 Mei 2025
Waode Suharni, S. Pi	Optimalisasi Workflow Pangan untuk Deteksi Patogen sesuai regulasi iso dengan teknologi Biokar dan Hygiena	15 Mei 2025
Kamdani, S.Pi, M.M	Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Triwulan I - 2025	16 Mei 2025
Kamdani	Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2025	4 Juni 2025
Arniyanti	Sosialisasi Permen KP Nomor 9 Tahun 2025	4 Juni 2025
Muzakkir	Pengelolaan Konflik Kepentingan Tahun 2025	4 Juni 2025
Mohammad Zamrud	International Day for The Fight Against Illegal Unreported and Unregulated Fishing 2025	5 Juni 2025
Arniyanti	Microlearning Mengenal dan Menghindari Gratifikasi	5 Juni 2025
Arniyanti	Microlearning Pelayanan Prima	5 Juni 2025
Idawati Barung, A.Md.Pi	Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Pengujian Molekuler	25 Juni 2025
Ardiana	Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Pengujian Molekuler	25 Juni 2025
Muzakkir	Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran dalam Pengujian Molekuler	25 Juni 2025
Karwit	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	9 Juni 2025

Muhammad Zamrud	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	10 Juni 2025
Kamdani	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	11 Juni 2025
Niza Mahaputri Zainal	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	11 Juni 2025
Zulyana Arlina	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	11 Juni 2025
Wara Zakaria	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	11 Juni 2025
Erlina Kadang	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	11 Juni 2025
Hapi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	11 Juni 2025
Taufiq	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	11 Juni 2025
Junaedi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	12 Juni 2025
Waode Suharni	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	12 Juni 2025
Darmawan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	12 Juni 2025
Bakhtiar	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	12 Juni 2025
Darmawan	Fleksibel Skills	16 Juni 2025

Ardiana	Pemeriksaan Parasit Anisakis sp secara mikroskopis	25 Juni 2025
Muzakkir	Pemeriksaan Parasit Anisakis sp secara mikroskopis	25 Juni 2025
Idawati Barung	Pemeriksaan Parasit Anisakis sp secara mikroskopis	25 Juni 2025
Irma Syam	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	17 Juni 2025
Darmawan	Pengelolaan Konflik Kepentingan	17 Juni 2025
Darmawan	Produktifitas Kerja Bagi ASN	17 Juni 2025
Arniyanti	Forum Keterbukaan Informasi Publik	18 juni 2025
Jumhana	Forum Keterbukaan Informasi Publik	18 juni 2025
Mohammad Zamrud	Forum Keterbukaan Informasi Publik	18 juni 2025
Muhammad Arman	Forum Keterbukaan Informasi Publik	18 juni 2025
Taufiq	Forum Keterbukaan Informasi Publik	18 juni 2025

**Lampiran 12. FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR M MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	-	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	-	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	-	Triwulan II tahun 2025
Nama Sasaran Kegiatan	-	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	-	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2025	TARGET Th.2025
	Q1	Q2	Sm1	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	86	86	86	86	86	86	86		86
Realisasi	49,61	71,5							
%Capaian	57,68	83,13%							

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4"

Sm1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan Instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %
Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :
Renstra 2025-2029, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Yang sudah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2025 yaitu : penyusunan RKAKL dan Rencana Aksi Renja mencapai 22,5 %.

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %
Pengukuran Kinerja ini telah terselesaikan Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :
Penyusunan Manual IKU tahun 2025 yang telah diselesaikan pada triwulan I terealisasi mencapai 30%

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %
Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2025, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah disampaikan Laporan Kinerja Triwulan I dan Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2025 sehingga realisasi tercapai 6,5 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %
Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerja yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Sampai dengan triwulan II tahun 2025 telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal realisasi tercapai 12,5% .

Bobot realisasi capaian :

$$= \text{Parameter 1 (22,5\%)} + \text{parameter 2 (30 \%)} + \text{parameter 3 (6,5 \%)} + \text{parameter 4 (12,5 \%)} \\ = 71,5 \%$$

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x Target

$$= \frac{71,5}{86} \times 100 \\ = 83,13 \%$$

Indikator ini di hitung Tahunan

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan II adalah :

1. Mengikuti Launching Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP sesuai Surat Sekjen Biro Perencanaan nomor B.1694/SK.1/RC.610/V/2025 tanggal 23 Mei 2025 memberikan pemahaman dan kapasitas aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah (SAKIP) serta Implementasi Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029.

2. Tim SAKIP telah melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh KKP melalui aplikasi E-Milia sesuai Surat Tugas Nomor B.1592/BBKIPM.MKS/KP.440/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025. Jumlah pegawai 35 Orang
3. Telah dilaksanakan optimalisasi capaian kegiatan dan dilakukan penginputan pada aplikasi SAKTI dengan penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 49,16 %

- Penilaian Mandiri SAKIP mendukung misi Asta Cita ke-7 yaitu “Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba”. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penilaian mandiri sakip dapat meningkatkan output dari program kegiatan yang terdapat dalam Tugas dan Fungsi Balai Besar KIPM Makassar.
- IKU ini mendukung terciptanya budaya kerja ASN Ber-AKHLAK di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu “Akuntabel” ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, hal ini disebabkan karena setiap pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dipertanggungjawabkan secara tertulis dan disertai dengan dokumentasi kegiatan yang detail dan lengkap.
- Untuk pemanfaatan melaksanakan indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp.42.795.000 yang mengalami blokir sebesar Rp.42.795.000. Jika dibandingkan pemanfaatan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 dengan pagu Rp.24.998.000 teralisasi anggaran sebesar Rp.5.593.000 atau 22,37 %
- Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi masalah dapat terjadi jika monitoring terhadap capaian kegiatan tidak berjalan optimal

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kegiatan secara berkala untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan solusi yang tepat	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Telah mengoptimalkan capaian kegiatan melalui evaluasi koordinasi internal yang intensif dan evaluasi capaian secara mendetail (dokumentasi terlampir), sehingga realisasi penyerapan anggaran hingga akhir Triwulan II mencapai 49,16 %.	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 9 Juni 2025

Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwit

DOKUMENTASI KEGIATAN

Sosialisasi SAKIP



Rapat kegiatan evaluasi internal yang intensif dan evaluasi capaian secara mendetail



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (13)	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan II

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, lincah, dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	85	85	85	85	85	85	85		85
Realisasi	100	94,12	97,06						
% Capaian	117,65	110,73	114,19						

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Diskripsi :

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi ltjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh unit kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan pada unit kerja}} \times 100 \%$$

Kegiatan yang Dilakukan :

Pada triwulan II Tahun 2025 terdapat Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 dari Inspektorat Jenderal KKP yang menghasilkan 1 temuan dengan 4 rekomendasi sesuai dengan LHP Nomor B.137/ITJ.4/HP.430/V/2025. Sampai dengan penyusunan laporan ini telah dilakukan tindak lanjut melalui surat Nomor B.1859/BBKIPM.MKS/TU.210/VI/2024 tanggal 30 Juni 2025, B.2346/BPPMHKP.1/HM.460/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 dan penjelasan tambahan bahwa sampai dengan tanggal 3 Juli 2025, Website SIPPN KemenPAN RB belum dapat diakses, bukti tambahan Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SP Balai Besar KIPM Makassar, serta bukti pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik yaitu jumlah sertifikat yang terbit setiap harinya dan diposting secara harian..

Hasil dari keseluruhan tindak lanjut tersebut menghasilkan nilai realisasi indikator kinerja ini mencapai 94,12%. Jika dibandingkan dengan triwulan I Tahun 2025 pencapaian nilai realisasi indikator kinerja mencapai 100% demikian pula jika dibandingkan dengan triwulan yang sama pada Tahun 2024 mencapai 100%.

Anggaran :

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran semula Rp.1.502.912.000,- setelah adanya revisi buka blokir menjadi Rp.1.852.749.000,- yang sampai dengan triwulan II tahun 2025 terealisasi sebesar Rp.864.986.923,- atau 46,69% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp.665.222.000,- terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 278,52%.

Sumberdaya Manusia :

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang.

Program Nasional, Budaya Kerja dan Pemanfaatan :

Indikator kinerja ini jika tercapai maka akan mendukung keberhasilan program prioritas KKP maupun Program Prioritas Nasional Asta Cita. Indikator kinerja ini secara spesifik mendukung Program Prioritas Nasional Asta Cita ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi dan narkoba".

IKU ini juga mendorong meningkatnya budaya kerja Ber-AHLAK di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar yaitu "Akuntabel" dimana ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan dan harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.

Tercapainya target kinerja ini mencerminkan bahwa organisasi telah melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan dan standar yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan dan anggaran telah dilaksanakan dengan akuntabel dan tepat waktu.

Aspek pemanfaatan yang diperoleh dari kegiatan IKU ini yaitu memberikan informasi mengenai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, sehingga dapat mengambil tindakan dan Keputusan secara cepat, tepat dan akurat.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
- Operator SIDAK melakukan pemantauan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan Itjen secara berkala. - Satuan Kerja melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Itjen secara lebih cepat.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

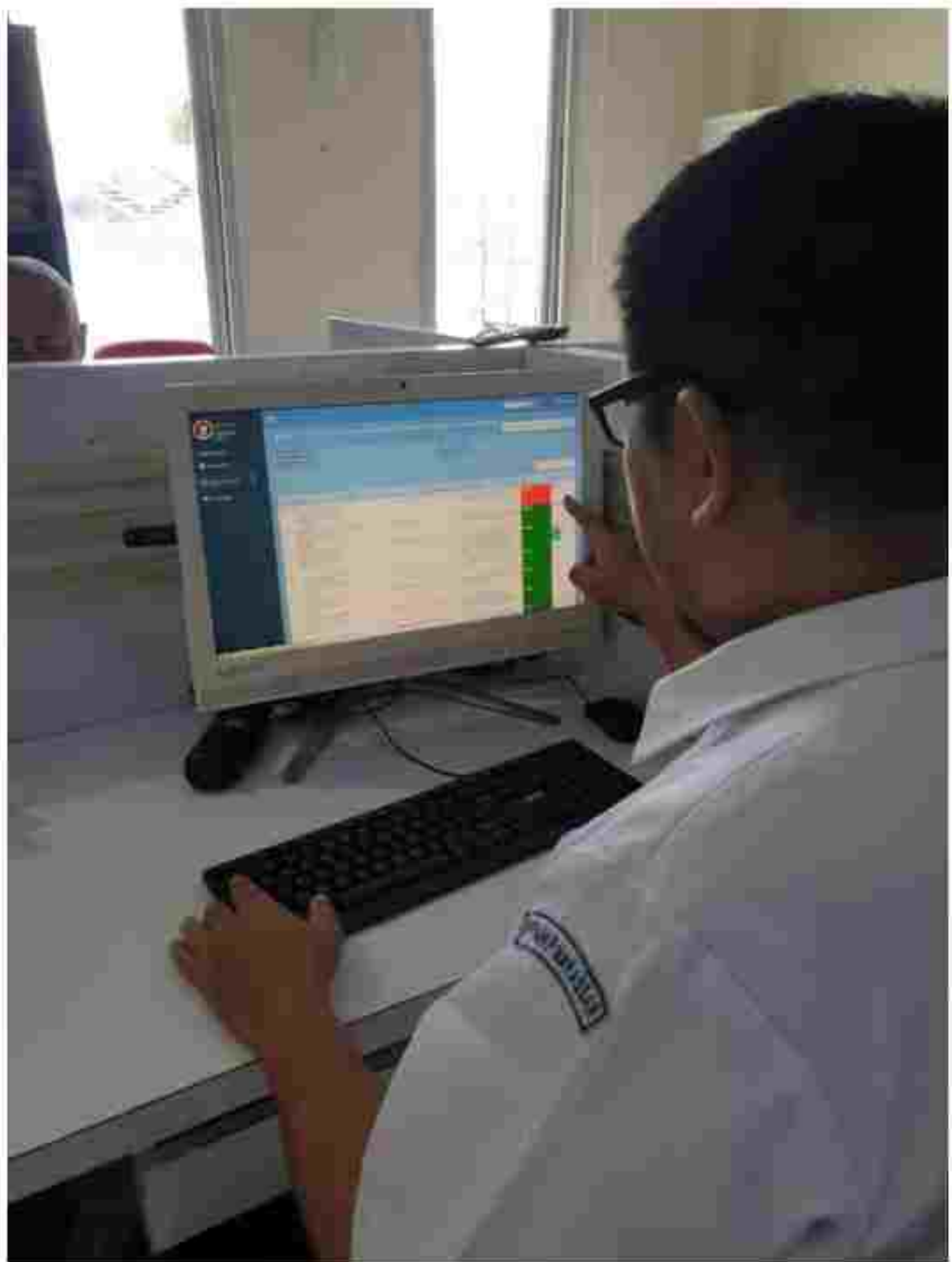
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
- Telah dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan Itjen pada aplikasi SIDAK periode triwulan II Tahun 2025.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 8 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit

<https://sidak.kkp.go.id/beranda/9/373>





**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) TW II BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2025**

Nama Indikator	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim Kerja	:	Dukungan Majemen
Periode Laporan	:	Triwulan II

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja (14)	:	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	76	76	-	-	-	-	76,00	-	76,00
Realisasi	99,06	100							
% Capaian	130,34	131,57							

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SiRUP lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (%) menggunakan rumus sebagai berikut :

Persentase RUP PBJ yang diumumkan di SiRUP

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SiRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 2 892 982 000}}{\text{Rp. 2 892 982 000}} \times 100\% = 100 \%$$

Dengan demikian realisasi IKU pada triwulan II adalah sebesar 100 % dari target 76 % atau capaiannya sebesar 131,57 %. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 99,06 % maka terjadi kenaikan sebesar 0,94 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

1. Menginventarisir kegiatan dan anggaran yang telah direvisi pada RKA- KL;
2. Operator menginput data barang dan jasa ke dalam aplikasi SIRUP, terlebih dahulu berkoordinasi dan komunikasi dengan pemegang akun KPA, PPK dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial untuk menunggu arahan dan petunjuk selanjutnya;
3. Mengupload Rencana umum pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar ke dalam aplikasi SIRUP

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Pada triwulan II telah dilakukan revisi kegiatan dan anggaran sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/ Jasa perlu menyesuaikan, diinput serta diumumkan ke dalam portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Adapun paket RUP yang telah diupload dan diumumkan sebesar Rp.2.892.982.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 5 kegiatan Manajemen Mutu dengan jumlah anggaran Rp. 114.750.000,-
- b. Paket Penyedia sebanyak 6 kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran Rp. 9.176.000,-
- c. Paket Penyedia sebanyak 21 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 2.694.056.000,-
- d. Paket E-Purchasing sebanyak 1 kegiatan Dukungan Manajemen Internal dengan jumlah anggaran Rp. 75.000.000,-

Adapun periode pelaporan untuk IKU ini adalah tahunan sehingga capaian triwulan tidak bisa diukur hanya menggambarkan progres kegiatan PBJ yang diperoleh setiap triwulan. Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Rencana Umum Pengadaan (RUP) Balai Besar KIPM Makassar yang telah diinput ke dalam aplikasi SIRUP LKPP.go.id yang dilaksanakan oleh tim Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, BPPMHP persentase capaian IKU ini adalah 100 %

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan II sebagai berikut :

1. Menginput data kegiatan dan anggaran yang telah direvisi ke dalam aplikasi SIRUP pada tanggal 12 Mei 2025;
2. Mengikuti bimbingan/ diskusi terkait Sistem Informasi Rencanaa Umum Pengadaan (SIRUP)) yang dipandu oleh Kepala Subbagian Umum/ Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada hari Senin, 19 Juni 2025.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2025 sebanyak 7 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 120.504.000,- yang terdiri dari :

1. 3987.EBA.994, 002.OE Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja = Rp. 45.504.000,-
2. 3987.EBA.994, 002.OF Kesehatan dan Daya Tahan Tubuh = Rp. 75.000.000,-

Pada triwulan I 2025 alokasi anggaran untuk IKU ini adalah Rp.0,-, namun dengan adanya kebijakan pembukaan blokir pada triwulan II 2025 maka pagu anggaran nilainya menjadi Rp 120.504.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.145.000,- dengan persentase 2,51 %. Adapun sisa pagu anggaran yang belum terealisasi akan dilaksanakan dan direalisasikan pada triwulan III.

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) berbasis Web (Web based) mendukung misi Asta Cita ke-7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". Hal ini disebabkan karena dengan adanya aplikasi SiRUP maka transparansi pada pengelolaan sistem pemerintahan dapat terlaksana dengan baik, masyarakat dapat secara langsung mengakses pengadaan barang dan jasa.

Manfaatnya sebagai berikut :

1. SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP
2. SiRUP bertujuan untuk mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya.
3. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.
4. Pengguna langsung mengisi RUP ke dalam aplikasi SiRUP pada website LKPP dengan alamat : inaproc.lkpp.go.id/sirup;
5. Untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi Balai Besar KIPM Makassar dalam pengadaan barang/ jasa

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Ketidaksesuaian nilai paket pengadaan yang diinput dengan nilai paket pengadaan yang terumumkan pada portal aplikasi SiRUP

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Menginput data kegiatan dan anggaran dalam portal SiRUP.go.id agar lebih cermat dan lebih teliti	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Hasil tindak lanjut rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Operator telah mengikuti bimbingan/ diskusi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dipandu oleh Kepala Subbagian Umum/ Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

Makassar, 9 Juli 2025

Penanggung jawab Indikator Kinerja,


Karwin S. Pr

RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
TRIWULAN II - 2025

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

TAHUN ANGGARAN : 2025

RA-RD: Sahdan Kage	Kemudahan Keluaran Dan Penerimaan: Berdasarkan Kemudahan Dan Penerimaan Mula Dan Kemudian Hasil Penerimaan Maklumi:
PAKPA	Mohamad Zaidul, S.P., S.P. 0067001700022000

© 2007 The Authors
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 399–406

http://www.elsevier.com/locate/jmb

† Mainly *Phlox*

4.5. Paket Pengendalian Terintegrasi

[illegible]

For more information, contact the National Sea Grant Institute, University of Maryland System, P.O. Box 38, Piversville, MD 21150.

[illegible]

Sl. No.	Project Name	Project Type	Project Status	Project Location	Project Description	Project Outcome	Project Cost (Rs. Lakhs)
1	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
2	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
3	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
4	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
5	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
6	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
7	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
8	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
9	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00
10	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Construction	Completed	New Delhi	Construction of a new building for the Government of India, New Delhi.	Completed	100.00

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Foto Dokumentasi Operator mengikuti bimbingan/ diskusi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)) yang dipandu oleh Kepala Subbagian Umum/ Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator (15)	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Timja	:	Timja Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan II Tahun 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2025							Capaian 2025	Target 2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	-	-	-	-	-	75	75	-	75
Realisasi	-	-	75,19	-	-	-	-	-	-
% Capaian	-	-	100,25	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Tw.1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;
 Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2;
 Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4;
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang Terjadi dan Implikasinya?)

Deskripsi :

- Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
- Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa untuk terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta

kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja di instansi pemerintah;

- Balai Besar KIPM Makassar telah memperoleh predikat WBK sejak tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2018. Untuk mempertahankan predikat tersebut, maka Balai Besar KIPM Makassar harus konsisten dalam penerapannya khususnya penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh jajaran pegawai Balai Besar KIPM Makassar beserta *stakeholder* yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2022 sesuai Surat Inspektur Jenderal KKP Nomor B.420/ITJ.5/HP.550/XI/2022 tanggal 18 November 2022 Hal Hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada Balai Besar KIPM Makassar, diperoleh nilai total sebesar 82,24 yang terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 43,49 (Pemenuhan 21,40 dan Reform 22,09) dan Komponen Hasil sebesar 38,75. Nilai secara total telah memenuhi ambang batas menuju WBK, namun terdapat tiga area di Komponen Pengungkit (satu area pada Pemenuhan yaitu Penataan Tata Laksana dan dua area pada Reform yaitu Penataan Tata Laksana dan Penataan Sistem Manajemen SDM) yang tidak mencapai ambang batas 60%;
- Sesuai surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.360/BPPMHKP.1/OT.720/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 Hal Persiapan Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, Balai Besar KIPM Makassar bersama 4 UPT lainnya ditetapkan sebagai unit kerja yang akan dilakukan penilaian implementasi WBK dan WBBM oleh TPI (Tim Penilai Internal) KKP Tahun 2025-2026;

Kegiatan yang Dilaksanakan :

- Pada triwulan II tahun 2025 telah dilakukan serangkaian kegiatan guna mendukung dan membuktikan implementasi zona integritas WBK pada Balai Besar KIPM Makassar, diantaranya adalah :
 - (a) Penyiapan dokumen penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing penanggung jawab unsur;
 - (b) Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK masing-masing unsur oleh tim sekretariat :
 - Unsur manajemen perubahan (1) dilakukan verifikasi pada tanggal 30 April 2025;
 - Unsur penataan tata laksana (2) telah diverifikasi pada tanggal 11 Juni 2025;
 - Unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3) telah diverifikasi pada tanggal 17 April 2025;
 - Unsur penguatan akuntabilitas, (4) telah dilakukan verifikasi pada tanggal 24 April 2025;
 - Unsur penguatan pengawasan (5) diverifikasi pada tanggal 17 April 2025;
 - Unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6) dilakukan verifikasi pada tanggal 22 Mei 2025;

- (c) Internalisasi/sosialisasi penerapan zona integritas WBK oleh masing-masing unsur pada kegiatan apel pagi :
 - Unsur manajemen perubahan (1) pada tanggal 21 April 2025;
 - Unsur penataan tata laksana (2) pada tanggal 28 April 2025;
 - Unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3) tanggal 5 Mei 2025;
 - Unsur penguatan akuntabilitas, (4) pada tanggal 19 Mei 2025;
 - Unsur penguatan pengawasan (5) pada tanggal 26 Mei 2025;
 - Unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6) pada tanggal 16 Juni 2025;
 - Unsur penguatan hasil pada tanggal 23 Juni 2025;
- (d) Internalisasi/sosialisasi agen perubahan tentang reformasi birokrasi oleh tim agen perubahan Balai Besar KIPM Makassar pada tanggal 30 Juni 2025;
- (e) Instruksi dari pimpinan dan unsur manajerial terkait konsistensi penerapan zona integritas WBK untuk seluruh pegawai (ASN dan non ASN) lingkup Balai Besar KIPM Makassar dalam briefing petugas pelayanan pada tanggal 15 Mei 2025 dan 14 Juni 2025;
- (f) Penerbitan surat tugas dengan mencantumkan himbauan tidak melakukan KKN saat bertugas dan penyampaian melalui WAG pegawai dan pelaku usaha;
- (g) Penegasan tidak memberikan komisi atau keuntungan dari penyedia kepada pengelola anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, serta penandatanganan pakta integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa;
- (h) Pemenuhan fasilitas pelayanan publik berupa perbaikan fasilitas difabel, pengadaan papan informasi digital, dan penataan ruang pelayanan publik;
- Perhitungan nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebagai berikut :
 - (1) Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
 - (2) Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
 - (3) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50 dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,50 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5,00;
 - (4) Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15,00;
 - (5) Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal KKP;

Sumberdaya Manusia :

- Sumberdaya manusia yang terlibat dalam penerapan kinerja ini adalah seluruh pegawai lingkup Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 58 orang, yang terdiri dari ASN 34 orang dan non ASN 24 orang;

Anggaran :

- Alokasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja ini pada tahun 2025 semula sebesar Rp. 12.489.000,-, namun setelah adanya kebijakan efisiensi,

anggarannya dialihkan menjadi Rp. 0,-. Anggaran untuk operasional zona integritas WBK menyatu dengan anggaran keperluan perkantoran.

Program Nasional :

- Penerapan zona integritas WBK merupakan salah satu program prioritas nasional yang tergambar dalam misi Asta Cita ke 7 yaitu "Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba". Hal ini berarti Asta Cita ke 7 fokus pada peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang adil dan upaya berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan narkoba. Asta Cita ke 7 juga sejalan dengan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang mencakup berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan dan susu gratis di sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan peningkatan produktivitas lahan pertanian;
- Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir, Balai Besar KIPM Makassar secara konsisten telah menerapkan zona integritas WBK. Hal ini dapat mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan ke 3 "Pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, serta ke 4 "Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil".

Aspek Pemanfaatan :

- Penerapan nilai-nilai integritas menuju WBK pada suatu unit kerja memiliki berbagai manfaat, yakni :
 - (a) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;
 - (b) Mencegah terjadinya korupsi;
 - (c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik;
 - (d) Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - (e) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
 - (f) Meningkatkan reputasi instansi pemerintah;
 - (g) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024;

Target indikator kinerja ini bersifat tahunan, namun pada triwulan II tahun 2025 telah diperoleh hasil penilaian sementara dari BPPMHKP. Berdasarkan penilaian dari tim penilai internal BPPMHKP diperoleh nilai total 75,19 atau 100,25% dari target, yang terdiri dari komponen pengungkit 37,16 dan komponen hasil 38,03. Rekapitulasi hasil penilaian disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Unsur	Bobot Nilai	Perolehan Nilai	%
1	2	3	4	5
A.	Pengungkit :	60,00	37,16	61,93
I.	Pemenuhan :	30,00	27,28	90,94
1	Manajemen Perubahan	4,00	3,32	83,04
2	Penataan Tataaksana	3,50	2,92	83,33
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,36	87,16
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	4,47	89,31
5	Penguatan Pengawasan	7,50	7,22	96,25
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
II.	Reform :	30,00	9,88	32,92
1	Manajemen Perubahan	4,00	2,83	70,83
2	Penataan Tataaksana	3,50	2,17	61,95
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	3,50	70,77
4	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
5	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
	Total Pengungkit		37,16	
B.	Hasil	40,00	38,03	95,08
	Total Hasil		38,03	
	Nilai Akhir		75,19	

Akar Masalah (Mengapa Hal Tersebut Terjadi ?)

Potensi kelambatan verifikasi dan validasi dokumen penerapan zona integritas WBK dikarenakan penanggung jawab unsur lambat menyampaikan dokumen tersebut ke Sekretariat WBK;

Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Berikutnya	Penanggung Jawab
- Para penanggung jawab unsur melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan; - Tim sekretariat sebagai verifikator melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK sebelum divalidasi oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	Penanggung Jawab
- Masing-masing penanggung jawab unsur telah menyampaikan dokumen penerapan zona integritas WBK sesuai tanggung jawabnya melalui google sheet yang disediakan; - Tim sekretariat telah melakukan verifikasi dokumen implementasi WBK pada semua unsur.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 9 Juli 2025

Penanggung Jawab Indikator Kinerja,



Karwit

Dokumentasi Kegiatan :

No 1	Tanggal 2	Uraian Kegiatan 3	Dokumentasi 4
1	17-04-2025	Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur penguatan pengawasan (5)	
2	17-04-2025	Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (4)	
3	21-04-2025	Internalisasi WBK Unsur Manajemen Perubahan (1)	
4	24-04-2025	Verifikasi dokumen penerapan WBK unsur penguatan akuntabilitas (4)	

5	28-04-2025	Internalisasi zona integritas WBK unsur penataan tata laksana (2)	
6	30-04-2025	Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur manajemen perubahan (1)	
7	05-05-2025	Internalisasi zona integritas WBK unsur penataan sistem manajemen SDM aparatur (3)	Internalisasi Penerapan Zona Integritas WBK unsur WBSM (Unit 10 Peningkat Sistem Manajemen SDM Aparatur) 
8	15-05-2025	Briefing petugas pelayanan	

9	19-05-2025	Internalisasi zona integritas WBK unsur penguatan akuntabilitas (4)	
10	22-05-2025	Verifikasi dokumen penerapan zona integritas WBK unsur peningkatan kualitas pelayanan publik (6)	
11	26-05-2025	Internalisasi ZI WBK Unsur Penguatan Pengawasan (5)	
12	14-06-2025	Briefing petugas pelayanan	

13	16-06-2025	Internalisasi ZI WBK Unsur Pelayanan Publik (6)	
14	16-06-2025	Verifikasi ZI WBK Unsur Penataan Tata Laksana (2)	
15	23-06-2025	Internalisasi zona integritas WBK unsur penguatan hasil	
16	30-06-2025	Sosialisasi agen perubahan tentang reformasi birokrasi	

FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan II 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Terselenggarannya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian	Target
	Q1	Q2	Sm. I	Q3	Q4	Sm. II	Tahunan	Th. 2025	Th. 2025
Target							1	1	1
Realisasi									
% Capaian									

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;
 Sm. I = Capaian Q1 + Capaian Q2;
 Sm. II = Capaian Q3 + Capaian Q4;
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

DESKRIPSI

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sesuai Peraturan Menteri PANRB No.30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik perlu dilakukan pembangunan dan pengembangan inovasi pelayanan publik pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah secara kompetitif, adaptif, pertukaran pengalaman dan berkelanjutan melalui kompetisi, inovasi, system informasi inovasi, pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi, peningkatan kapasitas dan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan K/L, Pemerintah Daerah, BMUN dan BUMD, Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun Kriteria Inovasi yaitu :

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan;
- c. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian publik;
- d. Dapat ditransfer/ direplikasi, yaitu dapat dan/ atau telah dicontoh dan/ atau menjadi rujukan dan/ atau diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik lainnya;
- e. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Di dalam peraturan Menteri PANRB No.91 tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan :

- Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ ide kreatif orisinal dan/ atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Pengembangan Inovasi pelayanan publik dapat ditingkatkan melalui berbagai cara seperti Penggunaan Teknologi, Pelatihan, dan Kolaborasi.

a. Penggunaan teknologi

1. Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam upaya untuk meningkatkan kegiatan pemerintah
 2. Menggunakan teknologi mobile
 3. Menggunakan e-meterai/ meterai digital dan tanda tangan elektronik
 4. Menggunakan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE.
Verifikasi biometrik dan Single Sign On (SSO) adalah teknologi yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mengakses aplikasi SPBE.
- Verifikasi biometric
 - Teknologi yang memverifikasi identitas pengguna dengan menggunakan ciri fisik atau perilaku unik, seperti wajah, sidik jari, atau iris mata
 - Data biometrik disimpan dalam sistem sebagai template digital
 - Saat pengguna mencoba mengakses layanan, sistem

membandingkan data biometrik baru dengan template yang sudah disimpan

- Verifikasi biometrik lebih aman dibandingkan dengan metode tradisional seperti PIN atau kata sandi
- Single Sign On (SSO)
 - Sistem verifikasi yang memungkinkan pengguna hanya menggunakan satu username dan password saja untuk masuk ke semua aplikasi SPBE
 - SSO mengintegrasikan berbagai aplikasi administrasi ke dalam satu sistem
 - SSO meningkatkan efisiensi dan keterpaduan layanan digital pemerintah
 - Penerapan verifikasi biometrik dan SSO pada aplikasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan memberikan kemudahan bagi pengguna
- Aplikasi SPBE adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sendiri adalah konsep dan upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam memberikan pelayanan publik

b. Pelatihan

1. Melakukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pegawai sektor publik
2. Meningkatkan kompetensi petugas pemberi pelayanan
3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif

c. Kolaborasi

1. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti kursus tentang kreativitas, teknologi, dan kepemimpinan inovatif
2. Memfasilitasi kemitraan dengan pihak swasta
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan kualitas pelayanan publik

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Publik, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan beberapa kegiatan :

- a. Penyampaian kepada seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar disetiap apel senin pagi untuk senantiasa berpedoman pada budaya kerja PNS sebagai nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku Budaya kerja untuk menciptakan aparatur yang profesional, berintegritas, dan melayani masyarakat secara efektif dan efisien agar tetap berkomitmen menjadi ASN BerAKHLAK yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, selalu menjaga etika dan integritas, dapat meningkatkan disiplin kerja serta berorientasi pada hasil.

Tujuan penyampaian budaya kerja ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani. Manfaat budaya kerja ini sangat penting bagi individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan.

Manfaat yang diperoleh dari budaya kerja pegawai yaitu meningkatkan produktivitas motivasi pegawai, mendorong kolaborasi dan kerja tim, meningkatkan reputasi instansi, mengurangi konflik internal, mendorong inovasi, serta mampu mempercepat adaptasi terhadap perubahan.

- b. Pada tanggal 15 Mei 2025, tim inovasi SI JEMPOL JALA EKSPOR dan inspektur mutu BPPMHKP bersama penyuluh perikanan bidang pengolahan KKP melakukan pendampingan pada salah satu pelaku usaha menengah kecil kelautan dan perikanan di Sulawesi Selatan yaitu SMK Neg 9 Makassar. Adapun permasalahan yang diidentifikasi antara lain UMK SMK Neg 9 Makassar tersebut ingin mengembangkan aktivitas bisnisnya dengan membuat kelengkapan Aspek legal terkait sertifikasi SKP, dimana UMK sudah memiliki aspek legal seperti NPWP, IPRT, NIB dan sertifikat halal dengan produk yang sudah diproduksi seperti Dimsum, odeng, ekado, bakpia tuna, dan kripik rumput laut.

Pada kegiatan pendampingan tersebut, inspektur mutu memberikan edukasi/penyadartahuan tentang kesesuaian nomor KBLI pada izin usaha serta melakukan kunjungan lapangan ke calon UMKM yang akan disertifikasi SKP.

Beberapa insight yang diperoleh pada pendampingan ini antara lain inspektur mutu makassar mengkomunikasikan ke pj. kegiatan SKP mengenai kondisi tersebut dan kemungkinan untuk dilakukan sertifikasi SKP, kelayakan sistem produksi pada UMKM SMK Neg 9 Makassar.

- c. Pada tanggal 20 Mei 2025 melakukan pendampingan kepada pelaku usaha PT. Sakinah Bahari Indonesia dalam kegiatan Roadshow Inovasi Si Jempol Jala Ekspor terhadap permasalahan yang diidentifikasi antara lain perusahaan tersebut ingin mengembangkan aktivitas bisnisnya dengan membuat sister company pada kawasan yang sama dengan perusahaan yang eksisting saat ini tetapi dengan plant yang berbeda. Sister company yang dibuat tersebut bernama PT. Samalona Bay Seafood dengan rencana ruang lingkup frozen demersal fish, frozen pelagic fish, frozen cephalopod dan frozen slipper lobster. Pihak perusahaan juga sudah melengkapi aspek legal seperti NIB, NPWP, Akta Notaris. Terdapat Sertifikasi Standar yang diberi keterangan belum terverifikasi. Kegiatan pendampingan tersebut, inspektur mutu memberikan edukasi/penyadartahuan tentang kesesuaian nomor KBLI pada izin usaha serta melakukan kunjungan lapangan ke calon UPI yang akan disertifikasi.
- d. Breafing pagi dan evaluasi petugas pelayanan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 yang dipimpin oleh Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar, tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendiskusikan isu-isu terkait pelayanan kepada pelaku usaha, serta penyampaian perlunya inspektur mutu dan petugas pelayanan memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, mengembangkan pengetahuan yang ada di KKP serta meningkatkan kompetensi dan kapasitas personil dalam menghadapi dinamika informasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang berkembang pesat karena Balai Besar KIPM Makassar sebagai instansi pelayanan publik menjadikan kualitas pelayanan sebagai Indikator keberhasilan organisasi dalam mendukung program Asta Cita.
- e. Untuk pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025 lingkup KKP, Balai Besar KIPM Makassar telah mengirimkan proposal keikutsertaan kegiatan pelaksanaan KIPP dan sesuai Berita Acara Hasil Penilaian Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik BPPMHKP Tahun 2025 tanggal 16 Mei 2025 untuk penilaian tingkat eselon I BPPMHKP maka Inovasi Pelayanan Publik "SI JEMPOL JALA EKSPOR" Balai Besar KIPM Makassar memperoleh nilai 80,36 yang terdiri dari penilaian Aspek Kebaruan dengan nilai 12,56, Aspek Efektifitas dan Manfaat dengan nilai 43,88, Aspek Adaptabilitas dengan nilai 9,07, serta Aspek Keberlanjutan dengan nilai 14,86. Namun untuk penilaian di tingkat Sekretariat Jenderal sesuai dengan Berita Acara Hasil Sidang Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025 nomor : B.474/SJ/TU.220/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 untuk penilaian proposal inovasi pelayanan publik maka Inovasi Pelayanan Publik "SI JEMPOL JALA EKSPOR" Balai Besar KIPM Makassar belum masuk dalam kategori Proposal Yang Memenuhi Kriteria Penilaian.

51 Jempol Jala Ekspor (Balai Besar KIPM Makassar)

No	Aspek	Bobot Aspek	Sub-Aspek	Bobot Sub-Aspek	Nilai 1	Sub-Aspek 1	Aspek 1
1	Keuangan	14%	Laba Bersih	14%	91.00	17.29	12.56
			Tujuan	22%	88.00	20.47	
			Cara Kerja Inovasi	30%	48.00	27.00	
			Keunggulan dan Keunggulan	28%	99.00	24.90	
2	Efisiensi dan Manfaat	50%	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi	11%	81.00	25.72	47.88
			Dampak Sosial	39%	88.00	58.68	
3	Adaptabilitas	17%	Umpan Balik dan Feedback Inovasi	100%	53.33	53.33	9.07
4	Ketertarikan	17%	Sumber Daya	42%	88.00	36.96	14.88
			Keunggulan Keunggulan	58%	97.00	50.40	
Total Penilaian 1							80.36

- f. Dalam mendukung IKU ini terdapat beberapa kegiatan yang diikuti oleh Pegawai Balai Besar KIPM Makassar yaitu :

No	Pelatihan/ Sosialisasi/ Workshop	Pelaksanaan	Penyelenggara
1	Sosialisasi Kebijakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2025	21 April 2025	Pusat Data dan Informasi KKP
2	Peningkatan Kompetensi Pelayanan Publik	29 April 2025	BPPMHKP
3	Pelatihan Pelayanan Publik	30 April 2025	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
4	Strategi Peningkatan Kualitas Inovasi Pelayanan Publik	30 April 2025	SmartID
5	Sosialisasi penggunaan Sinovik	6 Mei 2025	Bidang Pelayanan Publik Menpan RB
6	Entri meeting Evaluasi Pelayanan Publik	6 Mei 2025	BPPMHKP
7	Microlearning Pelayanan Prima	5 Juni 2025	Balai Diklat Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan
8	Forum Keterbukaan Informasi Publik	18 juni 2025	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar negeri

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan inovasi pelayanan publik adalah seluruh pegawai Balai Besar KIPM Makassar sebanyak 59 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 36 pegawai dan pegawai PPNP/PJLP sebanyak 23 pegawai.

ANGGARAN

Untuk mendukung kegiatan Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2025, anggaran tersedia pada Pagu 3987.EBA.962.051.0D sebesar Rp.3.600.000,-

Sampai dengan triwulan II tahun 2025, telah terealisasi sebesar Rp. 1.267.500,- atau sebesar 35,21%. Ini mengalami kenaikan sebesar 17,61 % dari TW I Tahun 2025 yaitu sebesar Rp.633.500,- atau 17,60%

PROGRAM NASIONAL

Didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar untuk Indikator Kinerja Inovasi Pelayanan Publik lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar tidak termasuk dalam kegiatan Program Nasional pada tahun 2025 namun Inovasi Pelayanan Publik umumnya tergolong sebagai kegiatan yang mendukung program nasional dalam reformasi birokrasi, transformasi digital pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing dan kualitas SDM

ASPEK PEMANFAATANNYA

Inovasi pelayanan publik bermanfaat untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah

Manfaat inovasi pelayanan publik yaitu :

- **Meningkatkan kualitas layanan**
Inovasi dapat membuat pelayanan publik lebih efektif, efisien, dan mudah diakses sehingga mampu memberikan rasa kepuasan yang lebih tinggi.
- **Meningkatkan Citra dan Kepercayaan Publik**
Kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat ketika layanan terasa lebih manusiawi, responsive dan pemberi layanan terpercaya.
- **Efisiensi Biaya dan Waktu**
Proses yang tadinya lambat dan birokratis bisa dipangkas serta mampu menghemat anggaran operasional.
- **Mempersiapkan menghadapi perubahan**
Inovasi dapat membantu pemerintah beradaptasi dengan perubahan dan tantangan di masa mendatang.
- **Menjawab kebutuhan masyarakat**
Inovasi dapat membantu pemerintah mengembangkan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

--

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Inkonsistensi tim inovasi dalam melakukan pengumpulan data dukung inovasi

Rekomendasi rencana aksi triwulan III 2025	Penanggung Jawab
1. Tim Inovasi lebih proaktif dalam menggali potensi masalah yang dihadapi masyarakat terutama di level UMKM melalui sinergitas penyuluh perikanan. 2. Evaluasi tim kerja inovasi	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan II 2025	Penanggung Jawab
Telah dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi tim inovasi dan pelayanan public melalui kegiatan sosialisasi....	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Makassar, 9 Juni 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja

Karwit



LAMPIRAN KEGIATAN



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS

KKP
07/08



Apel, Doa dan Briefing Pagi Badan Mutu KKP Makassar

19 Mei 2020



KKP
08/08

08

EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



Briefing dan Evaluasi Petugas Pelayanan Badan Mutu KKP Makassar

24 Juni 2020



**ROADSHOW INOVASI SI JEMPOL JALA EKSPOR DAMPINGI PELAKU USAHA DALAM
PERIZINAN BERUSAHA**



PENDAMPINGAN UMKM SMK NEG 9 MAKASSAR



FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

Nama Indikator	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
Nama Tim/ja	:	Dukungan Manajerial
Periode Laporan	:	Triwulan II 2025

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.2	Tahunan		
Target	88	88	88	88	88	88	88		88
Realisasi	93,32	92,84							
%Capaian	106,04	105,5							

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm.1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm.2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyalakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (Survey kepuaSAN masyarakat) melalui link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana. Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 9 (sembilan) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPPMHKP nomor 45 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yaitu: 1. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)</i> 2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (<i>Ekspor</i>) 3. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air 4. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 5. Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan 6. Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik

7. Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik
8. Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik
9. Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$S = \frac{X^2 NP (1-P)}{d^2 (N-1)} + \frac{X^2 P (1-P)}{d^2}$$

X² = Nilai chi square tabel = 3,841
dimana df = 1 dan α = 5% = 0,05
P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka P = 0,5)
N = Jumlah Populasi
d = tingkat toleransi kesalahan (0,05)

$$S = \frac{3,841 \times 48 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05^2 \times 47) + (3,841 \times 0,5 \times 0,5)}$$

$$S = \frac{46,092}{1,1175} = 41,286 \approx 42$$

Responden No	Sampel (1)	Responden No	Sampel (2)	Responden No	
1	1	16	16	31	31
2	2	17	17	32	32
3	3	18	18	33	33
4	4	19	19	34	34
5	5	20	20	35	35
6	6	21	21	36	36
7	7	22	22	37	37
8	8	23	23	38	38
9	9	24	24	39	39
10	10	25	25	40	40
11	11	26	26	41	41
12	12	27	27	42	42
13	13	28	28	43	43
14	14	29	29	44	44
15	15	30	30	45	45

Jumlah layanan yang dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 sebanyak 7.932 kali, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 8.000 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 234 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 674, hal ini sudah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Peningkatan jumlah responden ini didukung oleh kesadaran Petugas Pelayanan dan Inspektur Mutu/Asisten Inspektur Mutu dalam memberikan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di Triwulan II ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{9}{9} = 1$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

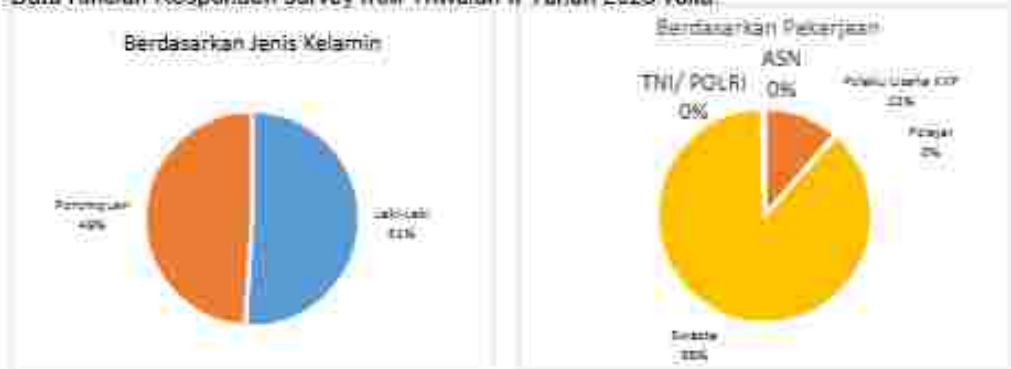
$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan II Tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 674 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,71 atau sebesar 92,84 setelah dikonversi (Sangat Baik). Nilai IKM tersebut melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 88 atau capaian 105,5%. Apabila data Hasil IKM Triwulan I Tahun 2025 dibandingkan dengan TW II Tahun 2025, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut:

N O	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan I - 2025	Triwulan II - 2025	
1	Kesesuaian persyaratan	3.733	3.730	↓
2	Kemudahan prosedur	3.731	3.724	↓
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.724	3.674	↓
4	Kesesuaian biaya	3.711	3.757	↑
5	Kesesuaian produk	3.741	3.737	↓
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.706	3.685	↓
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.716	3.693	↓
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.746	3.740	↓
9	Kualitas isi/sarana	3.706	3.702	↓
	Nilai IKM	93,32	92,84	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan II Tahun 2025 yaitu:





Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur unsur kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah), unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk nilai unsur yang paling rendah adalah unsur unsur kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah), unsur Kesesuaian jangka waktu penyelesaian, serta unsur Kemudahan dalam penggunaan fitur walaupun nilai unsur tersebut sudah berada dalam kategori Sangat Baik.

Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi Aplikasi SIAP Mutu (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu) dalam rangka penerbitan SMKHP digunakan pertanggal 1 Maret 2025 secara serentak semua UPT BPPMHKP yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya plikasi SIAP Mutu masih dalam tahap pengembangan, sehingga masih dirasakan cukup mengganggu bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan II pada tahun 2024, maka nilai IKM pada triwulan II 2025 mengalami peningkatan dari 92.54 menjadi 92.84. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode triwulan I tahun 2025, maka nilai IKM pada triwulan II 2025 mengalami penurunan dari 93.32 menjadi 92.28. Menurunnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari Triwulan I Tahun 2025 ke Triwulan II 2025 sejalan dengan layanan konsultasi petugas pelayanan pasca transisi penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Selama masa transisi aplikasi ini petugas pelayanan memberikan informasi dan solusi terhadap kebingungan pelaku usaha tentang penerapan regulasi ekspor komoditi perikanan. Sehingga nilai IKM dapat ditingkatkan dari unsur Layanan konsultasi dan Pengaduan pada Triwulan II Tahun 2025.

Balai Besar KIPM Makassar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan:

- Pada tanggal 10 April 2025 dilaksanakan Briefing siang Petugas Pelayanan, Verifikator Dokumen dan Penandatanganan SMKHP.
- Pada tanggal 15 April 2025 dilaksanakan Sosialisasi Kepatuhan Pelaku Usaha Tahun 2025 secara daring. Disampaikan bahwa saat ini telah dilaunching platform SIAP MUTU sebagai

tools dalam pelayanan sertifikasi ekspor. Beberapa potensi masalah yg terjadi dalam pelayanan antara lain masih relatif tingginya permohonan revisi SMKHP.

- Pada tanggal 15 Mei 2025 dan tanggal 24 Juni 2025 dilaksanakan Briefing Petugas Pelayanan pada inspektur mutu dan petugas pelayanan untuk memutakhirkan diri dengan ketentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan kompetensi dan kapasitas personil dalam menghadapi dinamika informasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang berkembang pesat.

Bukti komitmen petugas pelayanan dan IMUT/AIMUT tersebut menghasilkan jumlah responden pada Triwulan II 2025 meningkat dari 197 menjadi 674.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas menjadi faktor penting dalam meningkatkan indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya	4
2.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda	9
3.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	2
4.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Penyelia	1
5.	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	2
6.	PPNPN	12
7.	PJLP	12
	TOTAL	42

Anggaran

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum ada atau sebesar Rp. 0,-, karena anggaran yang ada masih diblokir dan belum dapat dicairkan.

Alokasi anggaran awal kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2025 yaitu 3987 EBA 994.002 B Semula Rp. 1.292.244.000,- dan terjadi revisi anggaran awal menjadi Rp. 476.445.000,-. Hingga Triwulan II tahun 2025, anggaran yang sudah terealisasi sebanyak Rp. 165.076.254,- pada langganan daya dan jasa, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 311.368.746,-.

Program Nasional

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu prioritas nasional karena dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah memberikan perhatian atas percepatan digitalisasi pelayanan publik sejalan dengan Asta Cita yang ke 5 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tools untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana Survey ini dapat mengetahui kritik, saran dan masukan dari Masyarakat pengguna layanan pada Balai Besar KIPM Makassar untuk memperbaiki layanan menjadi pelayanan public yang prima.

ASN BERAHLAK

IKU ini mendukung budaya ASN yang berakhlak di lingkup Balai Besar KIPM Makassar yaitu Berorientasi Pelayanan. ASN berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ini mencakup memahami kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta terus melakukan perbaikan. Survey Kepuasan Masyarakat sebagai alat untuk mengetahui saran kritik masukan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar untuk memberikan pelayanan yang prima.

Aspek Pemanfaatan

Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai Besar KIPM Makassar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna jasa di Sulawesi Selatan untuk menyatakan persepsi atas kepuasan layanan yang telah diperoleh oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Survey kepuasan Masyarakat ini sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu masih kurang menyampaikan layanan apa yang harus diisi di aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna jasa sesuai layanan yang sudah diberikan. Sehingga Pengguna Jasa masih ada kekeliruan dalam memilih layanan yang sudah didapatkan. Yaitu pengguna jasa harusnya memilih layanan Surveilans/ Jasa Pengujian tapi mengisi layanan Inspeksi/ Penjaminan HACCP.

Petugas Layanan dan Inspektur Mutu/ Asisten Inspektur Mutu harus lebih aktif meminta kritik saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan publik Balai Besar KIPM Makassar.

Rekomendasi rencana aksi triwulan berikutnya:	Penanggung Jawab
- Perlu dilakukan briefing/ sharing session kepada petugas pelayanan dan inspektur mutu untuk lebih aktif meminta kritik saran dan masukan kepada pengguna layanan untuk perbaikan pelayanan publik. - Sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai Layanan terbaru Balai Besar KIPM Makassar terkait dengan Keputusan Menteri KP nomor 20 Tahun 2025 mengenai Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik lingkup KKP.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen
Hasil Tindak Lanjut rekomendasi rencana Aksi triwulan sebelumnya:	Penanggung Jawab
Briefing kepada Petugas Layanan pada tanggal 10 April, 15 Mei dan 24 Juni 2025 tentang 2025 Inspektur mutu dan petugas pelayanan memutakhirkan diri dengan	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen

kefentuan regulasi, memperkaya diri dengan pengetahuan baru yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang hasilnya jumlah responden meningkat di triwulan II 2025 dari 197 menjadi 674.

Makassar, 8 Juli 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja



Karwi

Laporan IKM Bulat

Daftar IKM

IKM Bulat per Bulan: 2025 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

IKM Bulat per Bulan: 2025 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

No.	Nama IKM	Tahun	Qtr	Angka	Nilai IKM	Perbandingan
1	IKM 1	2025	2	4.45	44.50	100%
2	IKM 2	2025	2	4.15	41.50	93%
3	IKM 3	2025	2	4.35	43.50	97%
4	IKM 4	2025	2	4.10	41.00	92%
5	IKM 5	2025	2	4.30	43.00	96%
6	IKM 6	2025	2	4.25	42.50	95%
7	IKM 7	2025	2	4.15	41.50	93%
8	IKM 8	2025	2	4.10	41.00	92%
9	IKM 9	2025	2	4.20	42.00	94%
10	IKM 10	2025	2	4.15	41.50	93%
11	IKM 11	2025	2	4.10	41.00	92%
12	IKM 12	2025	2	4.25	42.50	95%

Screenshot Aplikasi SUSAN KKP yang memperlihatkan nilai IKM Triwulan II Tahun 2025

Survey Kepuasan Masyarakat

Uraian: Uraian tentang pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
2. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
3. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
4. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
5. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
6. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
7. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
8. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
9. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?
10. Bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah?

Daftar jawaban:

Nama: _____

Alamat: _____

Telepon: _____

Screenshot tampilan isian survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SUSAN KKP

DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2025



DOKUMENTASI BRIEFING PETUGAS PELAYANAN TRIWULAN II TAHUN 2025



Briefing Petugas Pelayanan, 10 April 2025





DOKUMENTASI SOSIALISASI KEPATUHAN PELAKU USAHA TAHUN 2025



DOKUMENTASI PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN II TAHUN 2025

- Instagram



- Facebook



- X/Twitter



- Digisign



- Website PPID KKP



- Website KKP



